

PERPUSTAKAAN DAN KEBANGKITAN BANGSA

(Kumulasi Pemikiran Pustakawan, UGM)

Seri Pengembangan Kepusakawanan - 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PERPUSTAKAAN DAN KEBANGKITAN BANGSA

(Kumulasi Pemikiran Pustakawari UGM)

Penulis:

- Ida Fajar Priyanta

- Purwono

- Purwani Istiana

- Nurhayati

- Sri Rumani

- Heri Abi Burrachman Hakim

- Pergola Irianti

- Lasa Hs

PERPUSTAKAAN DAN KEBANGKITAN BANGSA

Copyright © Lasa Hs dkk.

All rights reserved

Penulis:

- Ida Fajar Priyanta
- Purwono
- Purwani Istiana
- Nurhayati
- Sri Rumani
- Heri Abi Burrachman Hakim
- Pergola Irianti
- Lasa Hs

Diterbitkan

Lembaga Pemberdayaan Perpustakaan dan Informasi
(LPPI)

Nologaten Rt I/ 33 CT

Depok Sleman Yogyakarta

Cetakan 1, 2008

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Lasa Hs dkk.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Renungkan

Ide besar kadang tidak berhasil karena
tidak serius. Ide sederhana malah berhasil
karena serius
(Lasa Hs. September 2008)

Kata Pengantar

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan kesadaran tinggi, pustakawan Universitas Gadjah Mada ingin menuangkan pemikiran tentang peran perpustakaan dalam kebangkitan bangsa yang terekam dalam kumpulan tulisan ini. Pemikiran ini terbit untuk menyambut 100 tahun Kebangkitan Nasional kita.

Kebangkitan suatu bangsa dipengaruhi kesadaran dan semangat berkebangsaan bangsa itu sendiri. Semangat ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan pengetahuan bernegara dan berpolitik mereka.

Pengetahuan yang mereka peroleh melalui pendengaran, penglihatan, dan mereka rasakan itulah yang mendorong suatu bangsa untuk ber

gerak menentang segala bentuk penjajahan. Sebab penjajahan tidak sesuai dengan keadilan dan hak-hak azasi manusia.

Melalui bacaan sejumlah literatur dan diskusi, mereka mengasah otak, memperoleh wawasan, dan tambahan ilmu pengetahuan. Bacaan besar pengaruhnya terhadap pembentukan pribadi dan kemajuan bangsa. Maka tidak ada sejarah yang mencatat kehebatan seseorang yang tidak dibarengi dengan gemar membaca dalam arti luas.

Ilmu pengetahuan dan informasi yang terekam pada karya tulis, karya cetak, dan karya rekam itu dapat menjadi roh kebangkitan dan pembangunan bangsa. Maka kemajuan suatu bangsa sebanding dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa itu sendiri.

Universitas Gadjah Mada sebagai universitas tertua dan terbesar di negeri ini dengan berbagai langkahnya telah memberikan sumbangan pemikiran dan telah mendidik anak bangsa. Dalam hal ini, pustakawan UGM sebagai salah satu komponen pendidikan, berperan dalam penyediaan sumber informasi dalam proses pendidikan di perguruan tinggi kerakyatan tersebut.

Mereka memiliki kesadaran tinggi untuk mengembangkan pemikiran tentang peran perpustakaan pada proses kebangkitan bangsa dalam bentuk tulisan bersama. Tulisan Mangan Ra Mangan

Moco Buku karya Ida Fajar Priyanto mengisyaratkan semangat berpengetahuan dalam kondisi apapun. Purwono kali ini menguraikan Catatan Memori Bangsa Pembangkit Nasionalisme. Semangat Kebangkitan Nasional diharapkan mampu meningkatkan peran perpustakaan dan pustakawan dalam masyarakat merupakan pemikiran Istiana Purwani Hajari kiranya perlu dicermati. Nurhayati kali ini menulis artikel Jadikan Nilai-Nilai Bangsa Sebagai Pembangkit Semangat Kerja. Kemudian Sri Rumani mempertanyakan apakah tahun 2008 ini merupakan kebangkitan atau kebangkrutan bagi dunia kepustakawanan. Sedangkan Pergola Irianti mencoba memahami perilaku pengguna merupakan suatu pendekatan psikologis terhadap pengguna jasa perpustakaan. Lalu Heri B. Hakim mengungkapkan perangkat lunak gratis yang dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan yang akan melakukan otomasi perpustakaan. Maka penyelenggaraan otomasi perpustakaan tidak harus mengeluarkan biaya besar, asal pengelola perpustakaan mau berinovasi dan kreatif antara lain memanfaatkan software gratis yang bisa diperoleh melalui internet itu.

Sementara itu Lasa Hs menutup karya bersama ini dengan mengemukakan pemikiran bahwa tahun 2008 ini diharapkan menjadi tahun Kebangkitan Kepustakawanan. Dengan merebaknya pendidikan perpustakaan, meningkatnya

kesadaran menata perpustakaan, kemajuan teknologi informasi, dan dorongan Pemerintah dengan lahirnya berbagai peraturan dan perundangan merupakan faktor pendorong kebangkitan dunia perpustakaan di Indonesia. Hal ini berpulang kepada para pengelola perpustakaan dan pustakawan sendiri dalam memajukan dunia mereka.

Selamat merenungkan dan memahami pemikiran-pemikiran pustakawan UGM dalam bentuk buku yang terbit pertama kali ini.

Wabillahit taufieq wal hidayah
Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, Juli 2008

Lasa Hs. Editor .

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	7
Daftar Isi.....	11
1. Mangan Ra Mangan Moco Buku <i>Ida Fajar Priyanta</i>	13
2. Buku dan Perpustakaan: Catatan Memori Bangsa Pembangkit Nasionalisme.. <i>Purwono</i>	33
3. Mengusung Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Meningkatkan Peran Perpustakaan dan Pustakawan dalam Masyarakat <i>Purwani Istiana</i>	61
4. Jadikan Nilai-nilai Bangsa Sebagai Pembangkit Semangat Kerja <i>Nurhayati</i>	83
5. Tahun 2008; Tonggak Kebangkitan Atau Kebangkrutan Kepustakawanan? <i>Sri Rumani</i>	103

6. Perangkat Lunak Gratis: Awal Kebangkitan Perpustakaan Di Tanah Air <i>Heri Abi Burrachman Hakim</i>	123
7. Memahami Perilaku Pengguna <i>Pergola Irianti</i>	137
8. Kebangkitan Kepustakawanan <i>Lasa Hs.</i>	151
Para Penulis.....	197

***Mangan Ra Mangan Moco Buku -
Eating or Starving, Read Books!***

Oleh: Ida F Priyanto

Gadjah Mada University Library Yogyakarta, Indonesia

**WORLD LIBRARY AND INFORMATION
CONGRESS: 74TH IFLA GENERAL
CONFERENCE AND COUNCIL**

10-14 August 2008, Québec, Canada

<http://www.ifla.org/iv/ifla74/index.htm>

Abstract

Mangan ra Mangan Moco Buku! That's the slogan used for the reading campaign to commemorate our late hero of literacy—Grandpa Dauzan Farook. He was one of the former volunteers with 400 reading communities.

Yogyakarta is a city of culture and education. Besides having a lot of educational institutions, there are volunteers and social organizations working together to fight against illiteracy. Some volunteers work in the banks of the river in the middle of the city where many children become uneducated minority of the urban. Some others work in the rural areas riding bikes or motor-bikes offering books to read. Other groups commute

from the city to remote areas meeting children and play games with them while offering books to read. Without budget from the local authority, all volunteers work hard to fight against illiteracy. As these activities are self-funded, some problems arise such as budget constraints, lack of reading materials etc.

Mangan ra Mangan Moco Buku! is the slogan to boost the literacy program by holding various more activities both in the city and rural areas as well as discussing the solution to illiteracy. The activities include sock doll making, fiction writing by children, comic writing, and children art performances.

Gadjah Mada University Library contributes the training on library management for the volunteers as well as invites them to share their ideas and solve any arising problems.

Introduction

UNESCO reported that in 1973 Indonesia was still considered as a nation that was “hungry” for books. The report said that Indonesia had not published one single book. However, in 1996s a weekly publication reported that “Indonesia lacked of books.

The above facts were now already in the past. The national political change in 1998 opened a new wave of freedom to express ideas and more reading materials have been available; more mass

media to read; and more electronic media to watch and listen to. Books have been published on various subjects and access to internet has also been available since then.

During the last decade there have grown organizations to boost literacy by holding various activities such as reading, writing, discussion as well as providing reading materials for the communities. Comics, fictions, and movies were the media highly attracted the organizations to establish reading communities. The types of organizations or communities were also varied. They could be literary discussion clubs, private libraries for the communities, individuals providing books to read, playing and reading clubs, book publishing associations, movie show and discussion clubs, reading clubs, writers' organizations, bookshop association, and so on. The establishment of those organizations or associations has shown how high the awareness of people to read and get reading materials.

Many literacy activities held by various agents in the earlier years, i.e. 1998-2005, seemed to be without any directions. Each organization or community has its own motivation and direction. While some organizations were established as NGOs, some were only individuals who had big ideas about literacy in the communities where they live. However, after some time they realized

that their struggle to make people literate beneficial for the community. Therefore, more and more people wanted to get reading materials.

These organizations and individuals later grew bigger and attracted some foundations as well as individuals to support the literacy activities. Among them include *Sampoerna Foundation*, *Coca-Cola Indonesia Foundation* and an individual like *Hashim Djojohadikusumo*. Those individuals and foundations have seen the hardship and struggle the individuals and organizations work to build reading community.

Meanwhile nowadays, there are also *Taman Bacaan Masyarakat* (Community Library) established by the local authority. The community libraries are aimed at putting a library close to the community. The number of those community libraries is increasing from year to year supported by the local authority as well as the government. However, the existence of individual volunteers as well as NGO libraries to serve reading materials to the community is also continuing and developing complementing each other with the community libraries.

In 2006, *World Book Day* was held for the first time in Indonesia in order to organize various literacy workers and organizations, while locally, the book exhibitions have been a media for activities among literacy workers and organizations

where they can hold writing workshop, book reviews, talk show, movie show, discussions, and sharing experiences on literacy programs.

Book exhibitions, talk shows, book reviews have been held in various cities and towns. Yogyakarta—well known as a city of culture and education—also holds such activities and sometimes the activities are held by collaborating literary workers, writers, and even artists. Artists may even hold exhibitions in libraries, a writer come to a library to talk about how to write a book etc.

Literacy and Literacy Workers in Yogyakarta

Yogyakarta is a city situated in central Java as a special province. The King of Yogyakarta plays a role as a governor of Yogyakarta. Besides well known from the number of heritages. Yogyakarta is also well known as a city of education and culture. People from all parts of Indonesia and overseas are represented here either as students, workers, business persons etc. The national education of Indonesia was first established in Yogyakarta by a Javanese living in Yogyakarta and a member of the royal family who preferred using Javanese name instead of royal name.

As a city of education, In Yogyakarta there are organizations dealing with both literacy and reading activities. Those organizations are established

by NGOs and social organizations. There are roughly 36 NGOs and social organizations providing library services, reading activities, and literacy programs. Few of them commute from city to rural areas providing reading materials and traditional toys for children, while another organization works in the city and help the minority to read. The community consists of children and youth living in the banks of the river in the city without education and know nothing about what is going on in the city. In addition, there are few individuals who provide reading materials either in a certain location, or offering reading materials from school to school or mosque to mosque.

Sumanto is an example of an individual literacy worker living in a remote area. He worked in Jakarta before he quit his job and went back to his countryside without a job. He began to collect reading materials and then provided those reading materials from door to door by riding his bike—up and down hills. This activity was once to kill his time while he was jobless. But his struggle was then found by organizations and individuals who support his activities. He is now enjoying providing library services on his motorbike and provides both reading materials and computer facilities at home.

Another heroic individual was the late

grandpa Dauzan Farook. He was formerly an armed force member in the colonial period. After he left from the army he started to collect books and magazines and provided those reading materials both at home and outside of his home. His home was designed as a library—named as *Mabulir* Library— and he lived in that library. The term *mabulir* actually means magazines and books to circulate. *Ma* stands for *majalah* or magazines and *bu* stands for *buku* or books and *lir* stands for *bergilir* or to circulate.

However, he seemed not only interested in providing reading materials at home. He was pleased if more and more people read his collections. So, he also rode his bike from one community to another and in his last years before he died he had about 400 communities to serve with books and magazines. People in jails were also his target of literacy. He is very well known in Indonesia due to his struggle to build literate people. To commemorate his struggle for literacy, literacy workers, librarians, and educators work together to hold what is called Indonesia Literacy Festival in Yogyakarta. This was held 100 days after Grandpa Dauzan farook was buried.

Before he died he wrote a message for all literacy workers and people in general:

"Buku adalah peluru untuk dijadikan senjata melawan kehidupan apalagi di zaman globalisasi sekarang ini. Senjata utama untuk berperang adalah ilmu. Dan ilmu itu bisa diperoleh dengan membaca"

A book is a weapon to fight against hard life, especially in the globalization time nowadays. The main weapon to survive is knowledge. Knowledge may be absorbed from reading. (Dauzan Farook)

Mangan ra Mangan Moco Buku

Mangan ra Mangan Moco Buku! Or Eating or Starving Read Books! is the slogan of *Festival Literasi Indonesia* or Indonesia Literacy Festival that was held last year for the first time in Yogyakarta. The festival was prepared as a campaign of literacy activities and increasing network among communities, organizations and individuals working for literacy. The slogan was derived from a Javanese proverb, *mangan ra mangan kumpul* (eating or starving, keep together). The last word was changed into *moco buku* or read books. The theme was chosen to remind people that whether you live prosperously or not, you should read so that you will be able to gain knowledge and can live better.

The festival was held with various activities and it provided literacy workers to discuss fur

ther about the community development and reading society. This festival has also been a media to develop the resources and capacity of individuals to increase the literacy program and enliven the past traditions. Among them were literacy tour (visiting the Mabulir library that was formerly managed by Grandpa Dauzan Farook and Tembi Cultural House); literacy clinic (book preservation and conservation); literacy workshop on blog; talkshow of writers and literacy workers; book donation, and literacy development forum.

An interesting talk show was also held and it discussed about the current issues of literacy in Indonesia and the experience of developing a community library. This program attracted literacy workers and librarians as they wanted to know about the challenges to develop a library and the current issues affecting literacy in Indonesia.

The activities also included cultural literacy as literacy workers were also aware of the disappearance of traditional toys and games. Here in this program traditional toys were

exhibited. Children were also introduced to traditional toys and games and made the aware of the existence of those toys and games. Children interested in fiction and comic writing could also take part in this event because they could

learn from the experts of comic and fiction writing. Meanwhile, due to the rapid Information Technology development, literacy workers also learned the technology that hopefully would be able to develop their activities. One of the activities in IT program during the festival was Blog for Beginners. This program was aimed at those literacy workers who had not known how to design a blog.

The festival was also a place for the literacy workers to know about Gadjah Mada University Library and Librarians. The literacy workers were welcome to make use of the facilities within the library, including for the Blog for Beginners program, participants made use of the library's internet facility.

However, actually Gadjah Mada University has long been participating in literacy programs since the previous years. Besides welcoming children and the community to make use of the university library, Gadjah Mada University Library also participates in literacy workers development. The program includes print materials preservation, library automation, digital collection management, outreach program and simple library management. Besides holding trainings in the library, Gadjah Mada University librarians sometimes have to go to rural areas and help literacy workers to learn various library manage

ment and literacy development. Another activity is the outreach program in which Gadjah Mada University librarians collaborate with literacy workers to hold activities outside of the university.

Indonesia Literacy Festival has been able to gather librarians, literacy workers, writers, book sellers and IT experts to meet together and discuss matters arising in literacy development. By holding such festival, literacy is easier to manage. The experiences of literacy workers, writers, librarians and IT experts are all good to learn.

Appendix I

Events at Festival Literasi Indonesia

Thursday, 6 DECEMBER 2007
09.00 - 17.30 "Literacy Tour"
Visit to Mabulir and Tembi Cultural House,
Yogyakarta.

Friday - Sunday, 7 - 9 DECEMBER 2007
10.00 - 20.00
"Exhibition of Literacy Communities and Cheap
Book Sale"
Festival Literaxsi Indonesia
Koesnadi Hardjasoemantri Cultural Center,
Gadjah Mada University

10.00 - 17.00

“Bring Your Books and Donate them”

Book Donation held by 1001 Books Community Stand of 1001 Book Drop

10.00 - 17.00

“Reading Room and Book Preservation”

Mabulir Library Stand

Friday, 7 DECEMBER 2007

09.30 - 10.00

“Opening of Indonesia Literacy Festival (Festival Literasi Indonesia)”

Main Hall of Festival Literasi Indonesia

10.00 - 11.30

LITERACY: ART 1

“Children’s Art Performance”

Jathilan Dance by Children from Banyusuco, Bantul

Children’s Dance by Children from Kadirejo Village, Muntilan Main Hall of Festival Literasi Indonesia

13.30 - 15.00

LITERACY: WORKSHOP 1

“Bibliotherapy: How to make benefit of reading materials as media of therapy” Speaker: Prapanca

Hari (expert in Bibliotherapy)

Workshop Room of Festival Literasi Indonesia
2nd Floor, Koesnadi Hardjosoemantri Cultural
Center, Gadjah Mada University in collaboration
with Library and Information Studies Center
(LISC)

13.30 - 15.00

LITERACY: TALK 1

"Book Review : « Buku Suara Minoritas" (The
Voice of Minority) Speakers: Sonya, Alex Alkid,
Ira

Moderator: Arsih (PKBI Yogyakarta)

Main Hall, Koesnadi Hardjosoemantri Cultural
Center

Collaboration with PKBI Yogyakarta

15.00 - 16.30

LITERACY: TALK 2

"Book Review : "Karena Engkau Perempuan".(Be-
cause You are female) Speakers : Kun Sri
Budiasih, Ganjar Widhiyoga, Joni Ariadinata
Moderator: IBP Angga Antagia

Main Hall of Festival Literasi Indonesia
in collaboration with Forum Lingkar Pena
Yogyakarta

15.30 - 17.00

LITERACY: WORKSHOP 2

“Write Your Own Book: Learn How to be a Self Publisher”

Facilitator: Nadiah Alwi (Self Publisher)

Workshop Room of Festival Literasi Indonesia
2nd Floor, Koesnadi Hardjasoemantri Cultural
Center, Gadjah Mada University

19.00 - 20.30

LITERACY: FORUM 1

“Developing a Sinergy Between Libraries and Literacy Communities”

Speakers:

Ida Fajar Priyanto (Director, Gadjah Mada University Library)

Wien Muldian (Library Coord., National Education Dept, Republic of Indonesia) Agus M. Irkham (Writer and activist of Indonesia Reading Forum)

Moderator : Swandaru (Indonesia Reading Forum)

Man Hall of Festival Literasi Indonesia

Saturday, 8 DEcEMBER 2007

10.00 - 12.00

LITERACY: FORUM 2

“Revitalization of Library as the Heart of Educational Institution”

Speakers: Machmudin (Association of Indonesian School Information Workers) Heri Zudianto (Mayor of Yogyakarta City)

Moderator : Sumanto (Mitra Tema Library)

Main Hall, Koesnadi Hårdjasoemantri Cultural Center, Gadjah Mada University

13.00 - 14.00

LITERACY: FORUM 3

“Sharing experiences in managing community-libraries” Facilitator: Gunawan Julianto (Rumah Pelangi) Main Hall of Festival Literasi Indonesia

13.30 - 15.30

LITERACY: WORKSHOP 3

“Blog for Beginner”

Facilitator: CahAndong (Blogger Community, Yogyakarta) Sampoerna Corner Room, Gadjah Mada University Library) In collaboration with Gadjah Mada University Library

14.00 - 15.00

LITERACY: IT

“Socialization of Senayan 3.0 software “ Facili-

tator : Team of library@senayan Main Hall of
Festival Literasi Indonesia

15.00 - 16.00

“Video Show : On Community”

Facilitator: Kampung Halaman

Workshop Room, Festival Literasi Indonesia

15.00 - 16.30

LITERACY: FORUM 4

“Local Movement for Literacy and The Opportunity to Develop a Network” Speakers: Puthut EA (Tanda Baca)

Tarlen Handayani (Toko Buku Kecil)

Muhtashib (Mabulir)

Dessy Sekar Astina (Forum Indonesia Membaca)

Firman Venayaksa (Rumah Dunia)

Moderator : Salman Rusdie (Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta) Main Hall of Festival Literasi Indonesia

16.00 - 17.30

LITERACY: WORKSHOP 4

“Designing students’ Bulletin”

Facilitator: Komunitas Cas Cis Cus SMA De Britto

Workshop Room, Festival Literasi Indonesia

2nd floor, Koesnadi Hardjosoemantri Cultural Center, Gadjah Mada University

19.00 - 22.00

"Reflection Nite: Commemorating Grandpa Dauzan Farook"

- Dauzan Farook from the eyes of closest people
- Poetry Reading
- Book Donaton
- Prayer and Epilogue for Grandpa Dauzan Farook

Main Hall of Festival Literasi Indonesia

Sunday, 9 DEcEMBER 2007 09.00 - 10.00

LITERACY: WORKSHOP 5 "How to make a sock doll" Facilitator: Papermoon Community Workshop Room, Festival Literasi Indonesia 2nd floor, Koesnadi Hardjasoemantri Cultural Center, Gajah Mada University

09.00 - 10.00

LITERACY: ART 2

"Children creativity performance"

Satu Sembilan and Kobar Communities Main Hall of Festival Literasi Indonesia

10.00 - 12.00

LITERACY: TALK 3

"Process of Fiction Writing"

Speaker: Herlinatiens (Writer)

Dwicipta (Writer)

Moderator: Slamet Tohari (Umar Kayam Foundation)

Main Hall, Koesnadi Hardjosoemantri Cultural Center, Gadjah Mada University in collaboration with Yayasan Umar Kayam (YUK)

10.30 - 11.30

“Film Show”

Facilitator: Coret Community

Workshop Room, Festival Literasi Indonesia

13.00 - 14.00

LITERACY: WORKSHOP 6 “Comic Writing by Children” Facilitator: Bisbabi Community

Workshop Room, Festival Literasi Indonesia

2nd floor, Koesnadi Hardjosoemantri Cultural Center, Gadjah Mada University

13.00 - 14.00

LITERACY: TALK 4

“Think Differently to Attract Media”

Facilitator: Mayor Harianto (Republik Aeng Aeng)

Main Hall, Koesnadi Hardjosoemantri Cultural Center, Gadjah Mada University

14.30 - 15.30

LITERACY: WORKSHOP 7

“Read and Write a Comedy”

Facilitator: Klinik Penyakit Sedih

Workshop Room of Festival Literasi Indonesia

2nd floor, Koesnadi Hardjasoemantri Cultural
Center, Gadjah Mada University

15.00 - 17.30

LITERACY: TALK 5

"I want to Write"

Speakers:

Ataka A.R, 12 years old (writer of a book en-
titled "Misteri Pedang Skinheald") Rizqi Aulia
Rahmah, 10 years old (writer of a book entitled
"Limá Bunga Impian") Maryam Latifah, 16 years
old (writer of a book entitled "Gadis Itu Aisyah")

Moderator : St. Kartono (teacher De Britto High
School)

Main Hall, Koesnadi Hardjasoemantri Cultural
Center, Gadjah Mada University

19.00 - 20.30

"Get Together of FLI"

A meeting for literacy workers

20.30 - 21.00

Closing of Festival Literasi Indonesia

Appendix II

Committee for Festival Literasi Indonesia.

Secretariat: Jl. Nagan Lor 19, Yogyakarta phone:
+62-0274-372525

Program Committee:

1. Wien Muldian (Library Coordinator, National Education Department, Republic of Indonesia)
2. Dessy Sekar Astina (Forum Indonesia Membaca-YIM)
3. Widiarsa (BIBLIO)
4. Jazzuli (www.pustaka.com)
5. Agus M. Irkham (Forum Indonesia Memaca)
6. Gunawan Julianto (Rumah Pelangi Library)
7. Sumanto (Mitra Tema Library)
8. Asep (Mabulir Library)
9. Mutasib (Mabulir Library)
10. Ida Fajar Priyanto (Perpustakaan UGM)
11. Erwin jambro (Komunitas baca - Mabulir)
12. Ahmad Subhan (BIBLIO)
13. Yuli Andari Merdikaningtyas (Kunci Library and Cultural Studies Center)
14. Tri Suhartini (Pondok Rakyat Foundation)
15. Andri (USC Satu Nama Mobile Library)

Buku dan Perpustakaan: Catatan Memori Bangsa Pembangkit Nasionalisme

Oleh: Purwono

Pengantar

Apabila kita sitir ucapan Richard Whitlock; pecinta buku abad XVII, "*Buku adalah penasehat yang bebas biaya, buku tidak menolak permintaan nasihat, buku adalah permata, buku adalah sahabat yang baik*". Dari paparan ini dapat dipahami betapa pentingnya peranan buku dalam upaya memajukan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab di dalam buku terkandung permata berharga bagi masyarakat. Untuk itu buku perlu dimasyarakatkan. Buku yang memasyarakat ini terasa semakin urgen eksistensinya. Buku merupakan salah satu penyimpan informasi terbaik, bahkan sampai saat inipun:

Dilihat dari perspektif tata dunia baru, di mana kemajuan peradaban pikir semakin tinggi, maka

buku mungkin salah satu sarana yang tidak dapat sepenuhnya tergantikan oleh sarana penyimpanan informasi yang lain. Tentu saja sarana penyimpanan ini akan selalu mengalami perubahan media penyimpanannya, baik media kertas, media non kertas, terekam dalam bentuk analog, terbacakan mata, atau terbacakan mesin (elektronik atau virtual).

Di kalangan intelektual, telah disadari bahwa buku berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalangan ini menjadi konsumen pertama buku-buku baru. Selain karena kehidupannya memang relatif sudah mapan, kalangan ini memang harus selalu membaca buku untuk meng-up to date pengetahuan mereka. Bagi kita justru terdengar aneh bila kalangan ini kurang banyak menggeluti buku-buku. Walaupun tidak sedikit pula ditemukan keanehan-keanehan itu. Misalnya, banyak mahasiswa, pelajar, bahkan dosen, tidak gemar membaca.

Kekuatan utama suatu pustaka bukan saja terletak pada fisiknya, tetapi juga pada nilai informasinya yang terkandung dalam pustaka itu. Oleh karena itu, bentuk fisik dan informasi yang dikandungnya perlu dilestarikan bersama sebagai suatu rekaman budaya dan sejarah kehidupan bangsa. Rekaman budaya dan produk intelektual ini akan menjadi kebanggaan dan acuan dalam pengembangan budaya bangsa dan pembangkit nasionalisme di masa mendatang.

Keterkaitan buku dan perpustakaan

Buku yang dikenal orang sebagai berkas kertas yang dijilid, biasanya diisi karangan literer, terbukti merupakan wahana yang sangat efektif bagi penyebar luasan atau pemencaran, sekaligus pelestarian informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Buku memegang peran penting dalam mencerdaskan kehidupan manusia. Namun tentu saja, ini berbalik kepada manusianya sendiri.

Apabila kita perhatikan memang ada korelasi antara buku dan perpustakaan. Antara buku dan perpustakaan terdapat kaitan sangat erat, baik secara etimologis, historis, maupun fungsional. Perpustakaan bermula dari adanya koleksi buku. Secara etimologis kata perpustakaan berasal dari pokok kata "pustaka" yang berarti naskah atau buku. Kata bahasa Belanda *bibliotheek*, tidak lepas pula dari kata Yunani *biblos* yang berarti buku. Begitu pula kata *library* (Inggris), berpangkal pada kata *liber* (Latin) yang berarti buku. Memang buku merupakan komponen utama dalam sebuah perpustakaan. Oleh karenanya, antara perkembangan perbukuan dan perkembangan perpustakaan dalam kehidupan suatu bangsa terdapat hubungan yang sejajar, makin maju perbukuan makin maju pula perpustakaan. Meskipun perpustakaan modern banyak yang sudah mempergunakan hasil-hasil media elektronik sebagai sarana informasi dan atau merupakan rekaman

memori manusia, namun buku masih merupakan komponen yang dominan dalam koleksi perpustakaan.

Perpustakaan dewasa ini berkembang menjadi sebuah lembaga yang dikembangkan berdasarkan sebuah ilmu yang mandiri dan mengemban fungsi utama sebagai pusat penyimpanan memori (informasi) dan penyaji informasi, terutama informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. Dengan demikian, perpustakaan merupakan suatu institusi yang sangat berdaya guna bagi usaha pengembangan ilmu pengetahuan peningkatan kualitas dan martabat sumberdaya manusia serta bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan nasional dalam rangka kebangkitan berbangsa dan bernegara.

Memori dalam rekaman analog dan digital

Kehidupan mengajarkan kepada kita bahwa memori manusia tidak begitu dapat diandalkan. Bila kita menengok sejarah, kita melihat berbagai bentuk rekaman yang membantu kita mengatasi hambatan ini. Peradaban manusia telah terekam dengan sendirinya oleh berkas-berkas (records). Dan sebuah kenyataan pada kehidupan masyarakat kegiatan itu telah dilakukan oleh praktek kepastakawanan. Sebagai memori obyektif atau dengan kata lain sebagai jenis berkas (records) merupakan subyek kajian ditinjau dari aspek ilmu

perpustakaan yang melestarikan dan menyampaikan bahan-bahan tersebut kepada pengguna.

Semua bentuk rekaman konvensional, yaitu rekaman yang tidak dihubungkan dengan teknologi komputer, memiliki ciri umum. Bentuknya sama antara berkas/rekaman (records) dengan apa yang dituliskan. Oleh karena itu, sesuatu lukisan merupakan wakil realitas fisik atau realitas dengan unsur spasial. Realitas yang didapat (data rekam) dan gambar (berkas) dalam bentuk spasial yang sama. Kesamaan antarberkas/rekaman dan yang direkam sangat serupa sebagaimana lukisan. Bila kita berargumentasi lebih lanjut kita dapat mengatakan bahwa analogi menunjukkan ke bidang persepsi visual (arti yang disampaikan dan emosi yang ditimbulkan oleh lukisan merupakan titik perhatian yang bersifat sekunder).

Transkripsi musikal menggambarkan alur melodi. Perasaan yang ditimbulkan oleh musik tidak penting bagi berkas. Tugas berkas semata-mata hanya merekam suara. Struktur transkripsi notasi sama dengan struktur nada-nada melodi.

Sistem penulisan telah berkembang secara luas dalam berbagai bentuk rekaman, kita dapat mengatakan bahwa pohon tulisan menyalin ucapan (atau tepatnya: *phonetic* dan struktur *phonemic* dari suatu bahasa) ke dalam bentuk grafis. Kita tidak akan meneliti dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana arti dapat diekspresikan oleh struktur

phonetic dan bagaimana arti dari ide/gagasan yang ada pada kita “hanyalah perbedaan bahasa” Hal ini kita cukup melihat analogi antara struktur dan berkas (tulisan) dan struktur *phonemic* sebagaimana yang telah dituliskan. Sebagai suatu *phoneme* dari suatu ucapan tersusun secara linier dalam satuan waktu, oleh karena itu penulisan berarti pengorganisasian suatu rangkaian simbol grafis.

Ringkasnya, pada dasarnya ciri sebuah berkas/rekaman yang tidak berhubungan dengan teknologi komputer berasal dari analogi antara bentuk berkas/rekaman dengan bahan yang direkam. Berkas konvensional adalah berkas analog. Sejauh ini, perpustakaan terutama berurusan dengan buku. Namun dengan hadirnya komputer membawa perubahan yang drastis. Hadirnya komputer membawa banyak masalah untuk mendapatkan pemecahan, dan hanya ada satu yaitu bagaimana mengembangkan suatu kriteria yang seragam dalam mengatasi bahan pustaka analog yang heterogin.

Ketika awal perkembangan penerapan komputer, mula-mula dilakukan percobaan membuat rekaman analog ke dalam komputer. Sejalan dengan perkembangan teknologi, terjadi perubahan pola penyimpanan rekaman analog ke digital. Perubahan dari media penyimpanan analog menjadi digital yang hanya menggunakan prinsip bilangan biner 1 - 0, ternyata memiliki

kemampuan yang luar biasa. Adanya proses konvergensi di dalam proses digitalisasi, yakni penggabungan-penggabungan antara satu media dengan media lain menyebabkan semakin mudah, ringkas, dan efektifnya orang dalam penggunaan media tersebut. Misalnya saja penggabungan antara teks, gambar, suara, film dan lain-lain menyebabkan semakin dimungkinkannya penyajian media dalam satu sarana media saja yakni internet. Munculnya era digital yang akan menciptakan ruang maya (virtual) ini memungkinkan berubahnya wajah semua industri media massa. Mulai dari electronic book (buku elektronik), electronic journal (jurnal elektronik), electronic newspaper (surat kabar elektronik), electronic radio (radio elektronik), electronic television (televisi elektronik) :

Berubahnya industri media massa tersebut memaksa semua produknya yang semula berbentuk analog menjadi digital, seperti buku, film, kaset, VCD, DVD, foto, kertas koran, dan lain-lain. Perubahan wajah industri media massa yang menjadi virtual ini mau tidak mau menyeret dunia perpustakaan untuk mengikuti derap kemajuan teknologi informasi yang ada. Berubahnya produk media massa yang sudah menjadi virtual mengubah juga semua koleksi perpustakaan yang jelas-jelas adalah produk media massa itu sendiri. Nantinya semua koleksi perpustakaan terbacakan

mesin dan dapat tampil dalam bentuk file-file komputer yang harus dimenejemenkan sedemikian, sehingga mudah ditemukembalikan oleh siapapun dan di mana pun. Demikianlah bila disesuaikan dengan konsepsi dasar tujuan aplikasi ilmu perpustakaan di dalam kehidupan.

Perubahan wajah industri media massa menjadi virtual dikondisikan oleh adanya kemungkinan perubahan tatanan masyarakat dari masyarakat industri (*industrial society*) menuju masyarakat informasi (*information society*). Posisi di mana masyarakat menganggap bahwa modal utama sektor ekonomi adalah informasi yang mampu menciptakan lahan kerja baru. Bayangkan ketika masyarakat sudah mencapai tatanan masyarakat informasi (*information society*) ditandai dengan tidak adanya industri media yang sifatnya masif dan bentuk fisik analog. Tidak akan ada surat kabar beroplah sangat besar dengan menyebarkan agenda setting isi berita dengan menganggap bahwa kebutuhan informasi publik semua adalah sama. Demikian juga dengan stasiun televisi dan radio yang sudah benar-benar berpihak ke publik, tidak lagi berpatokan pada *frame time* dan iklan. Dengan adanya era digital, publik sebagai audiennya berkuasa penuh, dan pola penyeragaman kebutuhan masyarakat yang merupakan model masyarakat industri (*industrial society*) ditinggalkan.

Masyarakat akan dianggap sebagai molekuler antar pribadi secara individualistik bukan kolektivistik lagi.. Maksudnya di sini manusia harus diakui sebagai individu-individu yang memiliki kebutuhan unik orang per orang. Sedemikian hebatnya perubahan teknologi informasi yang mampu mengubah tatanan hidup dan pola tingkah laku publik. Perubahan pengakuan kebutuhan orang per orang akan informasi inilah yang memaksa pelaku industri media menciptakan sesuatu media yang khusus dan unik bagi kebutuhan informasi orang perorang. Kehadiran teknologi internet yang pesat saat ini yang disinyalir dapat mengakomodir apa keinginan informasi yang diinginkan oleh publik. Bayangkan di era maya (virtual) di mana kepercayaan publik terhadap informasi lewat internet sudah sangat tinggi dan semua kegiatan sepenuhnya lewat internet.

Situasi positif yang mungkin timbul adalah perubahan dari stasiun penyiaran televisi konvensional menjadi stasiun TV elektronik (e-television). Lewat stasiun televisi elektronik tersebutlah diyakini banyak pihak bahwa akan muncul portal-portal informasi akibat adanya proses konvergensi atau penggabungan media-media penyimpanan, seperti teks, suara, gambar, gambar bergerak dan lain-lain yang serba digital. Kemungkinan yang terjadi dengan adanya portal

informasi ini adalah hilang dan bangkrutnya media-media massa dan penyiaran selain televisi. Oleh karena itu tidaklah heran bila banyak pemain industri media menanggapi kemungkinan tersebut dengan berpaling ke industri media penyiaran televisi dengan pola kepemilikan silang. Bukti yang nyata saat ini adalah sudah banyak pemilik penerbitan surat kabar membuat stasiun televisi dan radio dengan maksud mengantisipasi meledaknya era virtual dan penciptaan portal informasi dimaksud. Dengan munculnya stasiun televisi elektronik yang terjadi adalah perubahan kinerja mereka yang menjadi lebih berfungsi sebagai pusat rujukan (*focal point*) utama bagi masyarakat.

Sistem kerjanya hampir sama seperti bentuk perpustakaan konvensional saat ini dengan kehandalan pada penelusuran dan jasa referensi yang ada, namun semuanya dalam bentuk *on line* (data terbacakan oleh komputer). Audiens tidak perlu lagi menunggu waktu tertentu untuk melihat suatu tayangan televisi. Mereka tinggal memilih keinginannya dengan kemampuan *browsing* (menelusur) lewat sarana internet tentang apa yang mereka mau lihat dan tayangkan. Demikian juga dengan keinginan membaca literatur dan mendengar musik atau *talk show* lewat radio cukup dengan mengakses portal informasi stasiun televisi saja. Semua portal informasi

menyajikan semua kebutuhan informasi yang sesuai dengan keinginan publik orang per orang bukan masif seperti saat ini. Singkatnya semua media massa pada akhirnya berlaku seperti perpustakaan bebentuk digital, yang berpatokan pada apa yang diinginkan audience orang per orang. Dan kehadiran portal informasi itu akan dikelola oleh para pelaku media yang lebih berorientasi pada industri bisnis.

Wadah rekaman memori

Buku merupakan bentuk fisik yang pertama kali, sesuatu kumpulan kertas yang dijilid bersama dan ditulis dengan tinta. Ini merupakan bukti fisik yang memungkinkan untuk tinggal sementara bagi memori yang lelah. Kertas dan tinta dapat dipindahkan ke bahan lain, tetapi kita tetap memperlakukannya sebagai sesuatu wadah secara fisik. Pada tingkat yang lain, sistem penulisan dapat dipandang sebagai sistem sandi (encoding). Hal ini sudah umum dikenal namun bukan merupakan satu-satunya bentuk rekaman memori manusia. Di dalam ilmu matematik berkas sering kali ditemukan dalam bentuk grafis yang berbeda (misalnya, sistem kordinat), seni musik memiliki sistem grafis tersendiri demikian pula seni pertunjukan. Kesemua sistem tersebut dalam berbagai bentuk rekaman memori. Bila kita lihat dari sudut pandang psikologi, kita

akan mengatakan bahwa metode-metode tersebut adalah bagaimana produk memori manusia itu dibuat (penyusunan dari tingkat pemaknaan ke emosi dan pemahaman).

Sejak dulu buku telah membuktikan fungsinya yang sangat efektif sebagai memori manusia dan pranata ilmu pengetahuan. Buku selalu merupakan wadah untuk menampilkan dan memelihara warisan peradaban bangsa, tetapi juga alat ampuh untuk menyebarkan budidaya tersebut kepada masyarakat. Di samping sebagai sarana informasi tidak kalah pentingnya pula peranan buku sebagai sarana komunikasi. Melalui buku orang dapat mengkomunikasikan dirinya dengan orang lain yang tidak terbatas jarak dan waktu. Dengan kalimat lain dikatakan bahwa buku adalah sebuah dunia ide, yang mampu merangkum dan mengabadikan pengalaman manusiawi untuk melindungi batas-batas sejarah, di mana gagasan, pemikiran, penemuan, serta perasaan manusia dikomunikasikan dengan manusia lain, di tempat lain dan di waktu yang lain. Dari buku-buku itulah cakrawala pengetahuan kita akan bertambah. Kita tahu bahwa kini mobilitas psikis lebih dihargai dari pada mobilitas geografis dan mobilitas sosial. Karena orang yang mempunyai mobilitas psikis yang tinggi akan menjadi orang yang dinamis, hidup dan tahu keadaan.

Salah satu isi buku terpenting sejak semula

adalah sebagai wadah ajaran-ajaran suci, sebagai buku suci. Semua agama besar mentradisikan ajaran-ajaran mereka melalui buku. Agama-agama Abraham: Yahudi, Kristen dan Islam disebut agama buku karena mereka semua memiliki Kitab Suci sebagai dasar identitas religius mereka. Begitu misalnya, hanya karena Kitab Suci umat Islam, Al-Qur'an, begitu banyak bangsa, golongan etnik dan budaya: orang Arab, Beber, Hamid, Turk, Slavia Selatan (Bosnia), Kaukasus, Persia, Asia Tengah, Cina, India dan sampai ke bangsa-bangsa Melayu menyatu dalam sebuah komunitas iman yang bukan hanya seiman, melainkan juga mampu untuk mudah berkomunikasi satu sama lain.

Ditemukannya buku menjadi langkah penting dalam perkembangan cara manusia berfikir, khususnya dalam cara ia memahami diri dan realitas seluruhnya. Dalam budaya-budaya nir-buku, warisan rohani masyarakat dipelihara dan diteruskan secara lisan. Sementara itu dengan munculnya tradisi tulis dengan media buku sistem pewarisan ilmu pengetahuan berlangsung di lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, tanpa media tulis dan tanpa buku yang memungkinkan tulisan dalam komunitas besar disatukan dan disimpan, pengetahuan abstrak universal-struktural tidak mungkin berkembang. Ilmu pengetahuan dalam arti yang sebenarnya, sebagai usaha serta menyimpan hasil usaha, untuk secara

sistematik mengetahui struktur, kaitan-kaitan, hukum-hukum yang mendasari peristiwa-peristiwa konkrit singular tidak mungkin tanpa buku. Buku adalah prasyarat muncul dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam semua dimensi.

Penemuan mesin cetak oleh Johannes von Guttenberg dalam abad ke-15 memungkinkan demokratisasi kemampuan memiliki buku dan sekaligus kemampuan untuk membaca. Mesin cetak membuat produksi buku menjadi murah. Apalagi, dengan mudah dan cepat sehelai sehelai "panas" dapat dilipat gandakan dan dilemparkan ke masyarakat. Mulai saat itu penerbitan buku terus menerus meluas. Begitu pula brosur dan *leaflet* dan, sejak abad ke-17 juga koran. Karena itu, kemampuan untuk membaca dan untuk mencari informasi tentang apa saja yang ada dalam tulisan tidak lagi dapat dibatasi pada sebuah elit, melainkan menjadi milik semua.

Masalah yang kemudian muncul adalah sensor dan pelarangan buku. Para penguasa segala zaman peka terhadap kekuasaan buku dan oleh karena itu, sesudah buku semakin menjadi milik masyarakat, berusaha untuk membatasi penggunaannya. Di sini kebebasan untuk membaca apa yang dikehendaki berhadapan dengan kepentingan penguasa untuk mengontrol bacaan rakyatnya. Kebebasan dalam bidang perbukuan memang dapat dirasakan sebagai ancaman. Di

Indonesia, secara umum ada 5 sebab mengapa buku dilarang beredar. Adapun alasan pelarangan ialah: alasan politik, alasan agama, alasan ras, alasan pornografi, dan alasan penerbitan dalam aksara asing.

Kalau kita berpijak pada Pasal 5 Pernyataan PBB, kebebasan untuk menyebarkan dan mencari informasi termasuk salah satu hak asasi manusia. Dasarnya adalah paham kedewasaan warga masyarakat.. Bahwa bacaan anak dikontrol oleh orang tua dapat dimengerti, tetapi apabila anak telah menjadi dewasa ia boleh menentukan sendiri apa yang ingin dibaca. Tugas negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum dan bukan kesejahteraan masing-masing orang, maka sejauh seseorang tidak melanggar undang-undang, bukan urusan negara untuk menentukan apa yang dibacanya.

Setelah budaya buku meluas, yang perlu disadari adalah sang kesadaran atas makna *minat membaca* itu sendiri. Memang, buku merupakan suatu komponen paling penting dalam sikap dan perilaku *membaca*. Namun, yang perlu dibaca sebenarnya bukan sekedar aksara, angka, atau visualisasi lain yang tercetak di media *buku*.

Teknologi masa kini memungkinkan kita juga bisa membaca teks yang muncul di layar televisi atau komputer. Media kertas terbukti bisa diganti media elektronik. Televisi atau komputer

dapat menyajikan gambar, *images*. Namun, *images* tidak membebaskan melainkan membelenggu fantasi. *Images*, tidak memberikan ruang bagi daya imaginasi karena seluruhnya mendeterminasikan persepsi. Tentu saja, kita tidak perlu memusuhi televisi. Televisi jelas ada jasanya. Akan tetapi, kemanusiaan kita berkembang karena membaca buku, bukan karena nonton televisi. Karena itu tidak berlebihan mengatakan bahwa pemanusiaan buku bukan hanya membukukan manusia, melainkan meningkatkan kemanusiaannya. Franz Magnis Suseno (1997) berharap agar generasi televisi dan *instant satisfaction* sekarang tetap senang membaca buku supaya dapat mengalami keasyikan dan kebebasan rohani yang menjadi ganjarannya. Demikian pula Jaya Suprana (1997) mengingatkan, sebenarnya yang bisa dan perlu dibaca memang bukan hanya “buku” saja, melainkan praktis segenap aspek kehidupan yang bisa terungkap daya pengideraan insan manusia.

Perpustakaan dan semangat nasionalisme

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara berdasarkan beberapa “kebenaran politik” (political legitimacy). Bersumber

dari teori romantisme yaitu "identitas budaya", debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori itu.

Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup, dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tumbuhnya ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun, bila suasananya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negeri itu, sirnalah kekuatan ini.

Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan, seperti yang dinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem seperti nasionalisme sosialisme, pengasingan, dan sebagainya. Nasionalisme dapat menonjolkan dirinya sebagai sebagian paham negara atau gerakan (bukan negara) yang populer

berdasarkan pendapat warganegara, etnis, budaya, keagamaan, dan ideologi. Kategori tersebut lazimnya berkaitan dan kebanyakan teori nasionalisme mencampuradukkan sebahagian atau semua elemen tersebut.

Nasionalisme abad ini tidak bisa ditarik mundur ke bentangan abad lalu. Nasionalisme juga bukan lagi produk zaman ini. Ia hanya mewakili kepurbaan. Makna kepahlawanan juga makin digugat ketika cacat historis kian tersingkap, sebagaimana tuduhan atas Tuanku Imam Bonjol. Tantangan-tantangan keindonesiaan tidak terletak pada masa lalu, tapi menghunjam dari masa depan, dengan kecepatan kinetik. Tapi tantangan itu selalu datang dari satu sumber, yakni ilmu pengetahuan, dengan teknologi sebagai variasi. Maka, ketika anak-anak muda lebih banyak berbicara tentang kekuasaan ketimbang mendiskusikan ilmu pengetahuan adalah bagian dari proses destruksi dari idealisme anak-anak muda sendiri. Sebab, bicara tentang kekuasaan hari ini tidak berbeda jauh dengan kontes menyanyi dan menari, yakni bergantung pada perolehan SMS yang Anda terima. Kekuasaan hari ini adalah kekuasaan yang menjauh dari ilmu pengetahuan sehingga menjadi sangat anti-intelektual. Dengan ilmu pengetahuan, nasionalisme jelas akan terkapar jatuh. Doktrin sejarah Indonesia yang mengatakan bahwa pembebasan atas

kolonialisme datang dari nasionalisme adalah omong kosong. Tidak ada itu bambu runcing bisa menang menghadapi meriam. Perlawanan atas nasionalisme pertama dan utama sekali datang dari penguasaan atas ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuanlah yang meruntuhkan kolonialisme, sebagaimana juga meruntuhkan kehendak hegemonis Orde Baru. Kaum inteligensia tentu mendapatkan tempat, baik didikan Barat maupun bukan. Dari sini sebetulnya diskusi tentang nasionalisme baru dan Indonesia baru harus dimulai, yakni seberapa rakus bangsa ini terhadap ilmu pengetahuan, bukan seberapa megah sebuah gedung harus dibangun. Lagi-lagi persoalan menjadi klasik: seberapa besar sebuah perpustakaan dibuat di daerah-daerah ketimbang tempat hiburan, sarana belanja, atau gedung parlemennya. Kekuasaan yang terkejam sekalipun akan mudah dihadapi apabila semua warga negara memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan memadai. Ketakutan terbesar bukanlah kepada anak-anak muda yang miskin harta, tapi lebih kepada anak-anak muda yang papa ilmu pengetahuan.

Kembali ke konsep perpustakaan. Apa yang terbetik dalam benak orang ketika mendengar kata perpustakaan? Bagi para pencinta buku, perpustakaan adalah 'surga' kecil tempat mereka menemukan sejumput kebahagiaan intelektual.

Untuk sejumlah tertentu pelajar, mahasiswa, atau peneliti, perpustakaan adalah 'gudang ilmu' yang wajib 'diacak-acak' isinya untuk menemukan petunjuk yang mereka butuhkan. Akan tetapi, bagi banyak lapisan masyarakat lain, kata perpustakaan tidak lebih berharga dari program *infotainment* televisi. Para pekerja dan eksekutif muda barangkali menempatkan perbendaharaan kata perpustakaan di urutan ke sekian, setelah istilah-istilah akuntansi, ekonomi, dan bidang lain yang terkait dengan pekerjaan rutin harian. Bahkan di kalangan pelajar dan mahasiswa sekali pun, kosa kata perpustakaan kalah pamor dengan toko buku, mal, plaza atau *hypermarket*, dan internet *search engine*. Itu baru soal kata perpustakaan. Apabila lebih khusus bicara soal Perpustakaan Nasional R.I. maka persoalannya bisa jadi lebih runyam. Meskipun sepanjang pengetahuan penulis belum ada survei nasional tertentu yang mencari tahu prosentase masyarakat yang pernah mengunjungi dan memanfaatkan jasa Perpustakaan Nasional. Akan tetapi tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Perpustakaan Nasional mengalami nasib kurang lebih sama dengan persepsi masyarakat terhadap istilah perpustakaan pada umumnya. Perpustakaan Nasional bukanlah institusi populer, apalagi dianggap bermanfaat. Jika 'diadu' dengan keberadaan toko buku, grup-grup perusahaan besar dan perpustakaan milik asing,

citra Perpustakaan Nasional rasaya sudah pasti kalah dengan status "knock out" (KO). Ada banyak faktor yang menyebabkan Perpustakaan Nasional tidak menjadi pilihan utama (atau malah bukan pilihan sama sekali) sebagai tempat layanan yang dibutuhkan masyarakat. Barang kali tidak semua orang paham tentang Perpustakaan Nasional berikut peran dan fungsinya. Dalam perspektif lain, Perpustakaan Nasional sering disalahpahami sebagai lembaga yang sekadar menyimpan manuskrip dan dokumen lawas bersejarah. Walhasil, ia masih sering dipersepsikan sebagai 'museum buku', bahkan tumpang tindih makna dengan Lembaga Arsip Nasional, bukan sebagai lembaga penyedia bahan bacaan dan informasi yang aktual dan mutakhir. Padahal, secara formal, sebagaimana disebutkan dalam Keppres Nomor 11 tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional, keberadaan lembaga ini diarahkan untuk berfungsi sebagai: a) pusat informasi nasional, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya; b) pusat deposit nasional; pengemban Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; c) pusat pengembangan sistem perpustakaan dalam rangka pembina semua jenis perpustakaan; d) pusat pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan, serta pusat hubungan dan kerja sama antarperpustakaan di

dalam dan di luar negeri. Perpustakaan Nasional RI kini menjadi perpustakaan yang berskala nasional dalam arti yang sesungguhnya, yaitu sebuah lembaga yang tidak hanya melayani anggota suatu perkumpulan ilmu pengetahuan tertentu, tapi juga melayani anggota masyarakat dari semua lapisan dan golongan. Walau terbuka untuk umum, koleksinya bersifat tertutup dan tidak dipinjamkan untuk dibawa pulang. Layanan itu tidak terbatas hanya pada layanan untuk upaya pengembangan ilmu pengetahuan saja, melainkan pula dalam memenuhi kebutuhan bahan pustaka, khususnya bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Benarkah demikian? Apabila kita fahami makna kata “nasional” di dalam dokumen resmi IFLA memakai kata *nasional* dalam rangkaian kata *perpustakaan nasional* dan *layanan perpustakaan nasional*. Di Indonesia, selain *perpustakaan nasional* sering juga kita dengar ungkapan *sistem perpustakaan nasional* atau lebih tepat penyebutannya ialah *sistem perpustakaan nasional* (Sudarsono, 2006). Membahas perpustakaan nasional nampaknya harus bertolak dari makna kata nasional ini. Dalam dokumen itu disebutkan pendapat Maurice B. Line bahwa perpustakaan nasional diartikan sebagai perpustakaan: 1). Dengan koleksi *literature* yang dihasilkan suatu bangsa; 2). Yang menampung sebagian besar kekayaan warisan

budaya bangsa; 3). Pemimpin atau koordinator dari seluruh perpustakaan yang dimiliki oleh suatu bangsa; 4) yang melaksanakan layanan secara nasional baik untuk perpustakaan lain atau masyarakat. Dari ke 4 (empat) di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perpustakaan nasional dikembangkan berdasar konsep yang berdimensi 3 (tiga), yaitu: a). *Warisan budaya*, penekanan pada kekayaan literatur yang dihasilkan suatu bangsa. Kelestarian atas koleksi ini menjadi perhatian utama; b). *Infrastruktur*, penekanan pada koordinasi nasional, fasilitasi kepemimpinan, dan jasa. Perhatian utamanya adalah pada pengembangan dan layanan pada perpustakaan lain dalam satu Negara; c). *Layanan nasional yang komprehensif*, penekanan pada layanan kepada pemakai di seluruh penjuru Negara. Perhatian utamanya adalah pelayanan masyarakat umum. Bagi Negara Indonesia yang beragam suku, bahasa, agama, dan budayanya. Kata nasional memang harus lebih cermat kita maknai. Identitas nasional hendaknya tidak hanya didominasi oleh salah satu pihak saja. Nasional hendaknya benar-benar mencerminkan keberagaman yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya tidak mudah. Salah satu pendekatan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai kriteria nasional yang tepat adalah dengan lebih banyak memberi kewenangan kepada daerah atas kepentingannya dalam bidang perpustakaan. Namun kenyataannya juga

harus diperhatikan bahwa kemampuan daerah di bidang kepastakawanan nampaknya mendesak untuk dikembangkan, agar konsep perpustakaan tumbuh secara benar. Kita juga melihat kenyataan bahwa penyediaan jumlah perpustakaan di Indonesia sendiri masih amat kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lebih dari 220 juta jiwa. Data tahun 1999 menyebutkan bahwasanya di Indonesia terdapat 1 (satu) perpustakaan nasional, 2.583 perpustakaan umum, 117.000 perpustakaan sekolah dengan total koleksi 106 juta buku, 798 perpustakaan universitas, dan 326 perpustakaan khusus.

Penutup Dari uraian tersebut, muncul pertanyaan dapatkah buku dan perpustakaan sebagai memori bangsa berkemampuan untuk membangkitkan nasionalisme? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu meninjau lebih dahulu jenis perpustakaan. Jenis perpustakaan ini berkaitan dengan pemakainya yang merupakan anggota masyarakat. Dari berbagai jenis perpustakaan yang ada, hanyalah perpustakaan umum yang berkaitan dengan umum. Inipun ditekankan oleh UNESCO melalui Manifesto Perpustakaan Umum. Dalam manifesto tersebut dinyatakan bahwa perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang sepenuhnya dibiayai oleh dana umum, harus dapat diakses bagi semua anggota masyarakat sehingga mensyaratkan gedung

perpustakaan memiliki letak yang baik/strategis, fasilitas ruang baca dan belajar yang baik, teknologi yang memadai serta jam buka yang memungkinkan anggota masyarakat mengunjunginya. Ketentuan tersebut tidak terdapat pada jenis lain seperti perpustakaan nasional, khusus, sekolah dan perguruan tinggi. Koleksi perpustakaan nasional tidak selalu dapat dipinjam umum sedangkan perpustakaan khusus, perguruan tinggi, dan sekolah tidak dapat digunakan umum walaupun kini ada anjuran agar perpustakaan sekolah membuka dirinya bagi masyarakat sekitarnya. Kembali ke pertanyaan di atas apakah buku dan perpustakaan mampu menjadi agen perubahan: membangkitkan nasionalisme, nenumbuh kembangkan warga negara untuk berkesadaran berbangsa dan bernegara, maka jawabannya mampu namun sebatas pada penggunaannya. Bila dijawab secara makro, maka perpustakaan bukan agen perubahan karena perpustakaan diciptakan dan dibina oleh masyarakat, juga dirusak (dihancurkan) oleh masyarakat (Sulistyo-Basuki, 1991). Menyangkut perpustakaan sebagai agen perubahan, maka hal tersebut dilakukan dalam bentuk tujuan perpustakaan. Tujuan perpustakaan ialah menyimpan pengetahuan, aspek moral, politik, pendidikan, dan penyebaran pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Aldrich, Ella V. *Using books and Libraries*. Englewood-Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1967
- Apostel, Richard and Boris Raymond. *Librarianship and the Information Paradigm*. London: The Scarecrow Press, 1997.
- Buckland,, Michael. *Redesigning Library Services: A Manifesto*. New York: American Library Association, 1992. <http://sunsite.berkeley.edu>. 16/07/2001
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid. 3*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka. 1989.
- Hardjoprakoso, Mastini. 1997. "Buku dan Perpustakaan". Di dalam *Buku Membangun Kualitas Bangsa: Bunga rampai sekitar Perbukuan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1997: 57-92.
- Kasbolah, Kasihani. 1992. "Studi Kepustakaan" di dalam *Forum Penelitian*, 4(1&2) : 179-185.
- Magnis-Suseno, Franz. 1997. "Memanusiakan Buku- Membukukan Manusia". Di dalam *Buku Membangun Kualitas Bangsa: Bunga rampai sekitar Perbukuan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1997: 13-33.
- Rowley, Jennifer. 1996. *Organizing of Knowledge*. London: Library Association.
- Somadikarta, Lily K. 1980/1981. "Perkembangan dalam pengelolaan informasi", di dalam *Analisis Kebudayaan*, 3(1): 92-98.
- Sudarsono, Blasius. *Antologi Kepustakawanan*

Indonesia. Editor Joko Santoso. Jakarta: PP IPI - Sagung Seto, 2006.

Sulistyo-Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Grmedia Pustaka Utama, 1991.

_____, "Potensi Perpustakaan dalam menghadapi Krisis Sosial Budaya". <http://www.pnri.go.id/artikel/seminar/24102000/makalah.htm>

UNESCO. *Unesco Public Library Manifesto*. Paris: Unesco, 1992.

Mengusung Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Meningkatkan Peran Perpustakaan dan Pustakawan dalam Masyarakat

Oleh: Purwani Istiana

Pendahuluan.

Tak terasa genap satu abad kita bangsa Indonesia memperingati hari Kebangkitan Nasional. Peringatan 100 tahun di Gelora Bung Karno Jakarta, dihadiri langsung oleh Kepala Negara dan Ibu Negara beserta pejabat negara lainnya. Acara peringatan ini disiarkan secara langsung melalui media elektronik dan dipublikasikan oleh berbagai media cetak. Dalam acara tersebut ditampilkan beberapa kesenian dan tarian dari berbagai daerah di tanah air antara lain tari Lisoy, tarian Manuk Dadali, lagu Penari Janger, lagu Angin Mamiri dan banyak lagi.

Terlepas dari kemewahan acara tersebut, sajian kesenian dari berbagai daerah tersebut, menyadarkan kita kembali bahwa negara yang kita cintai

ini memiliki keragaman berbagai kesenian yang begitu indah dan menarik. Masing-masing tarian memiliki perlambang ataupun makna yang intinya kegembiraan, semangat, menggugah kesadaran berbangsa, siap membela kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, serta senantiasa menjaga warisan budaya. Semua itu merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dikembangkan.

Semarak peringatan Kebangkitan Nasional juga terasa di wilayah lain. Di beberapa tempat di Yogyakarta misalnya, juga diselenggarakan acara seperti; bedah buku, menggelar wayang kulit semalam suntuk, gerak jalan, senam masal, dan lain-lain. Peringatan tersebut diharapkan mampu menggugah kesadaran generasi muda dalam berbangsa dan meningkatkan jiwa serta semangat persatuan bangsa dengan memahami dan menyadari berbagai perbedaan suku bangsa, sosial, budaya, politik, dan ras (Kedaulatan Rakyat, 2007:6). Keanekaragaman yang ada merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang sangat bernilai.

Kesadaran berbangsa, sebagai satu bangsa yang bersatu harus ditumbuhkan. Perkembangan teknologi dan informasi tidak dijadikan media untuk memecah belah persatuan bangsa, namun sebagai alat untuk mempersatukan bangsa ini. Dengan keadaan dan posisi negara Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau besar dan ratusan pulau-pulau kecil dapat diatasi dengan kemajuan di

bidang teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini akan semakin meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Globalisasi yang dihadapi masyarakat saat ini menjadikan jarak antar wilayah terabaikan. Seolah dunia ini hanya sebuah daerah kecil yang antara masyarakatnya dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Dengan demikian memudahkan akses pengetahuan, budaya, tradisi, gaya hidup, dan sebagainya.

Keanekaragaman budaya dan kesenian yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dengan mudah diakses dan dinikmati oleh negara dan bangsa lain. Oleh karena itu, budaya perlu dilestarikan sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa. Berbagai kesenian, maupun tradisi budaya perlu didokumentasikan sebagai salah satu warisan budaya.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kini masyarakat kita dapat dengan mudah mengakses, mempelajari, dan menikmati tradisi, budaya, dan dapat mengetahui gaya hidup bangsa lain. Dengan demikian perlu peneguhan masing-masing pribadi bangsa Indonesia, bahwa kita memiliki tradisi, seni budaya, dan nilai-nilai yang perlu dijaga dan dilestarikan. Dengan demikian, masyarakat tidak akan mengalami kebingungan karena telah memiliki identitas budaya nasional.

Berbagai seremonial peringatan yang dilakukan untuk mengenang kembali 100 tahun yang

lalu kebangkitan nasional akan berhenti hanya sebatas peringatan saja apabila tidak ada tindakan nyata. Oleh karena itu diperlukan suatu sikap, tindakan, dan kegiatan yang merupakan buah pikiran dari penjabaran Kebangkitan Nasional tersebut. Setelah 100 tahun Kebangkitan Nasional, apakah masing-masing pribadi telah mampu memberikan andil bagi kemajuan masyarakat? Sumbangan sekecil apapun bagi masyarakat akan lebih baik daripada tidak sama sekali.

Perpustakaan merupakan sebuah institusi yang mampu memberikan pencerahan bagi masyarakat di sekitarnya. Melalui koleksi yang dimiliki berisi berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat didayagunakan untuk kecerdasan masyarakat. Tentunya semua yang ada di unit yang bernama perpustakaan tersebut membutuhkan peran sosok pustakawan. Koleksi dan fasilitas yang memadai tidak akan dapat optimal pemanfaatannya tanpa peran aktif dari pustakawan.

Pustakawan memiliki andil sejak koleksi disediakan sampai dengan koleksi tersebut dimanfaatkan oleh pemustaka. Pustakawan akan menentukan buku-buku apa yang dipilih sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Selanjutnya mereka membantu pemustaka untuk menemukan buku/sumber informasi yang sesuai. Begitu besar peran pustakawan dalam memberikan kemudahan dan pemahaman kepada pemustaka. Peran inilah yang

perlu selalu ditingkatkan dengan semangat dan jiwa untuk memberikan yang terbaik bagi pemustaka perpustakaan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Peningkatan peran inilah yang barangkali merupakan penjabaran dari semangat kebangkitan nasional untuk saat ini. .

Semangat Kebangkitan Nasional

Peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional tidak hanya berhenti sebagai seremonial peringatan saja. Setelah peringatan ini, kita perlu mengambil peran sesuai kemampuan dan bidang masing-masing. Kemudian secara bersinergi membangun masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai yang dapat dipetik dari momentum bersejarah Kebangkitan Nasional adalah semangat persatuan dalam keanekaragaman dan semangat untuk bangkit dari kebodohan, keteringgalan, bangkit dari ketidakprofesionalan dan sebagainya. Persatuan dalam keanekaragaman mengandung makna bahwa masing-masing pribadi kita bangsa Indonesia perlu menyadari benar akan keanekaragaman budaya, tradisi, agama dan sebagainya. Nilai persatuan merupakan semangat untuk bahu-membahu saling bekerja sama demi kemajuan bersama. Meyakini bahwa dengan bekerja sama kita akan semakin kuat dan mampu. Kerja sama akan mendorong kita untuk terus belajar, saling memberi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas diri, sehingga mampu

memberikan yang terbaik untuk masyarakat di sekitar kita.

Semangat untuk bangkit dari kebodohan mengandung makna bahwa bangsa ini tidak akan mencapai kemajuan sesuai yang diharapkan jika masyarakatnya tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Kebodohan atau ketertinggalan ini dapat disebabkan karena masih cukup banyak masyarakat kita yang tidak memperoleh kesempatan pendidikan. Bagaimana mungkin masyarakat akan maju, jika mereka masih buta aksara. Menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2007 penduduk buta aksara mencapai 18, 1 juta orang. Menteri Pendidikan Nasional menargetkan tahun 2009, angka buta aksara tersisa 7,5 juta penduduk. Kemampuan membaca merupakan modal utama bagi masyarakat agar mampu mengakses informasi.

Melihat kenyataan di masyarakat tersebut, penulis berpendapat bahwa keberadaan perpustakaan dan pustakawan diperlukan dalam masyarakat. Perpustakaan merupakan salah satu jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan murah sehingga akan jauh dari kebodohan dan keterbelakangan. Peran perpustakaan dan pustakawannya, memungkinkan masyarakat dapat melakukan apa yang disebut dengan long life learning. Berbagai sumber informasi yang

tersedia di perpustakaan tidak membatasi semua orang untuk terus belajar. Belajar tidak terbatas hanya melalui jalur formal saja. Sarana dan sumber informasi yang disediakan perpustakaan dapat dimanfaatkan untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Hal ini tentu saja membutuhkan peran aktif pustakawan.

Peran aktif pustakawan hanya akan dilakukan oleh pustakawan profesional. Dengan semangat 100 tahun kebangkitan nasional ini, pustakawan perlu bercermin, apakah selama ini telah mampu bersikap profesional dalam menjalani profesi sebagai pustakawan. Bangkit dari ketidakprofesionalan artinya pustakawan dalam melaksanakan tugas profesinya diharapkan mampu bersikap profesional, sehingga akan jauh dari sikap-sikap yang akan merusak citra pustakawan. Sikap profesional akan menampilkan sebuah layanan yang memberikan kepuasan bagi pemustaka. Pemustaka akan menerima layanan prima.

Peran Perpustakaan

Telah kita ketahui bahwa kegiatan pokok yang dilakukan di sebuah perpustakaan adalah mengumpulkan, melestarikan, dan menyajikan informasi untuk siap dipergunakan dan diberdayakan oleh pemakainya (Sutarno, 2006:1). Berdasarkan kegiatan pokok tersebut jika kita jabarkan peranan perpustakaan dalam kehidupan di masyarakat akan sangat luas.

Telah kita sadari bersama bahwa dewasa ini informasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Semua orang membutuhkan informasi dalam kehidupan mereka. Kondisinya akan sangat berbeda antara masyarakat yang mudah mengakses informasi dan masyarakat yang kesulitan akses informasi. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang tidak mendapatkan akses informasi menjadi terbelakang. Mereka tidak memperoleh informasi untuk meningkatkan atau mengembangkan pola kehidupannya. Mereka tidak memperoleh tambahan ilmu untuk memperkaya wawasan dan pengalaman. Pada akhirnya mereka tidak mampu untuk memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik.

Masyarakat yang mendapat kemudahan akses informasi akan mampu belajar lebih banyak. Sebab dengan informasi yang diperolehnya akan menambah wawasan dan pengalaman. Dengan ilmu pengetahuan yang didapat selanjutnya dapat menentukan sikap, membentuk pikiran, dan dapat bertindak lebih bijaksana untuk menuju masyarakat yang lebih maju. Mereka mampu menggunakan informasi untuk memperbaiki kehidupannya.

Dalam kehidupan dewasa ini informasi berperan penting. Maka perpustakaan sebagai wadah informasi amatlah dibutuhkan masyarakat. Masyarakat membutuhkan sebuah lembaga yang

mampu menyediakan informasi Lembaga informasi yang bernama perpustakaan itu merupakan unit layanan yang dapat memberikan kemudahan akses informasi dan mampu melestarikan hasil karya masyarakat. Institusi informasi ini juga mendokumentasikan hasil karya budaya masyarakat. Pada gilirannya nanti lembaga/unit tersebut akan mampu memberikan dorongan bagi masyarakat akan arti pentingnya kegiatan dokumentasi karya budaya dan karya intelektual sebagai salah satu sumber proses pembelajaran seumur hidup.

Peranan Perpustakaan di tengah masyarakat adalah:

1. Sebagai pelestari hasil karya masyarakat, sehingga karya tersebut dapat terus dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Disebutkan dalam Undang-Undang Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 bahwa salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.
2. Sebagai pusat sumber belajar. Perpustakaan memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk terus belajar mengembangkan pengetahuan/*long life learning*, dengan menyediakan tempat, sarana, dan berbagai sumber informasi.
3. Mediator transfer informasi. Keberadaan per-

pustakaan di suatu tempat/wilayah membantu percepatan informasi sampai pada pemustaka/masyarakat pengguna.

4. Menjamin kebebasan akses informasi. Perpustakaan dengan koleksi dan sumber informasi yang dimiliki memberikan peluang bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi ataupun untuk mengakses kekayaan budaya dan intelektual masyarakat.

Setelah 100 tahun Kebangkitan Nasional perpustakaan harus pula bangkit untuk berbenah, supaya dapat berperan secara maksimal sebagai pelestari hasil karya masyarakat, pusat sumber belajar, mediator transfer informasi, dan penjamin kebebasan akses informasi. Sebagai pelestari budaya bangsa, apakah sampai saat ini Undang-Undang Serah Simpan Karya Rekam dan Karya Cetak telah dilaksanakan secara menyeluruh? Pelaksanaan undang-undang ini bertujuan untuk mendokumentasikan hasil karya seluruh masyarakat, sebagai salah satu kekayaan budaya dan intelektual masyarakat. Selanjutnya dapat dimanfaatkan secara menyeluruh oleh masyarakat. Semangat untuk maju bersama sebagai satu bangsa, mendasari kesadaran untuk menyerahkan segala bentuk karya tulis dan karya rekam yang dihasilkan. Peranan perpustakaan sebagai pelestari budaya bangsa membutuhkan dukungan dan kesadaran dari seluruh masyarakat. Dalam hal ini

kesadaran bagi penerbit untuk menyerahkan dua buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional dan satu buah kepada Perpustakaan Daerah di ibukota propinsi yang bersangkutan. Selambat-lambatnya tiga bulan setelah diterbitkan. Satu point ini dari Undang-undang tersebut mampu dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua penerbit, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hasil kegiatan pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 ini akan berdampak luar biasa pula bagi pengembangan koleksi perpustakaan. Perpustakaan akan mampu menyajikan koleksi-koleksi terbaru hasil karya budaya dan karya intelektual masyarakat. Selanjutnya perpustakaan akan berperan sebagai pusat sumber belajar. Koleksi yang berasal dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut dapat dimanfaatkan .

Perpustakaan menyediakan berbagai sumber informasi sehingga mampu berperan sebagai mediator transfer informasi. Koleksi yang dimiliki perpustakaan beserta sarana dan prasarananya sangat mendukung perpustakaan dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menambah wawasan. Perpustakaan menyediakan seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat. Memberi kesempatan untuk memanfaatkan perpustakaan. Terutama di perpustakaan umum atau perpustakaan daerah. Perpustakaan umum tersedia di

tiap-tiap wilayah propinsi ataupun kabupaten. Perpustakaan umum berupaya untuk mendekatkan koleksinya dengan masyarakat. Perpustakaan keliling merupakan salah satu upaya yang dilakukan.

Keberadaan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat menjamin kebebasan akses informasi. Siapa saja dapat mengakses informasi yang tersedia di perpustakaan. Memperoleh kesempatan akses informasi merupakan hal yang sangat penting. Akses informasi memungkinkan seseorang untuk menambah ilmu pengetahuan, memperkaya wawasan dan memperoleh nilai tambah untuk mengembangkan pola kehidupan. Layanan perpustakaan umum didasarkan pada kesamaan akses untuk semua orang tanpa memandang perbedaan umur, ras, gender, agama, kebangsaan, bahasa, dan status sosial.

Peranan yang dilakukan oleh perpustakaan akan lebih maksimal jika masing-masing perpustakaan saling bekerja sama. Perpustakaan *sharing* koleksi yang dimiliki. Semangat persatuan dalam Kebangkitan Nasional saat ini, kita implementasikan dalam semangat untuk saling berbagi. Berbagi ilmu pengetahuan guna memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi perpustakaan untuk menyajikan alternatif informasi yang beraneka ragam dari ber-

bagai sumber. Keterbatasan koleksi dapat diatasi dengan kerja sama antar perpustakaan dengan memanfaatkan jaringan internet. Langkah yang telah dilakukan antara lain, terjalannya kerja sama "Yogya Library for All" merupakan salah satu wujud nyata *sharing* pengetahuan. Perpustakaan yang tergabung dalam kerja sama ini antara lain adalah Perpustakaan UGM, Perpustakaan UNY, Perpustakaan UII, Perpustakaan ISI, dan Badan Perpustakaan Daerah Propinsi DIY. Melalui kerja sama ini akan tercapai peningkatan layanan kepada pemustaka. Disebutkan pula dalam UU Perpustakaan bahwa kerja sama dan peningkatan layanan kepada pemustaka dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Segala wujud upaya yang dilakukan oleh perpustakaan dengan menyediakan koleksi, sarana prasarana serta memberikan kemudahan akses informasi tidak akan ada artinya jika tidak dimanfaatkan. Membangun kualitas masyarakat dengan memanfaatkan perpustakaan merupakan langkah cerdas yang harus terus ditingkatkan. Perpustakaan harus terus melakukan promosi agar masyarakat sadar akan pentingnya kegiatan belajar dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan.

Pembelajaran sejak tingkat sekolah dasar bahkan taman kanak-kanak harus sudah dikenalkan dengan perpustakaan. Bagaimana memanfaatkan

koleksi yang tersedia untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Dengan demikian pemahaman terhadap suatu materi pengetahuan tidak dibatasi hanya dari guru saja. Peserta didik berkemampuan dan berkesempatan untuk menggali sebanyak mungkin pengetahuan dengan memanfaatkan sumber informasi yang disediakan perpustakaan.

Peran Pustakawan

Pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dengan memberikan kebebasan akses informasi perlu ditopang keberadaan pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (UU No. 43 Tahun 2007). Pustakawan sesuai undang-undang tersebut mensyaratkan pendidikan khusus di bidang perpustakaan. Hal ini diharapkan akan meningkatkan profesionalisme tenaga perpustakaan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Semangat Kebangkitan Nasional dalam profesi pustakawan harus dipahami sebagai semangat untuk bangkit dari sikap tidak profesional menuju profesionalisme. Pustakawan profesional akan mampu menunjukkan peran yang

luar biasa bagi pemustaka perpustakaan. Pada gilirannya profesi ini tidak lagi dianggap remeh. Sudah bukan saatnya bagi pustakawan untuk mengeluhkan citra pustakawan dan kurang diperhatikannya unit perpustakaan. Namun saatnya kita bangkit berbenah diri meningkatkan kualitas agar mampu berperan lebih, memberikan manfaat bagi pemustaka.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pustakawan antara lain dengan memperhatikan kompetensi seseorang yang akan melaksanakan tugas kepustakawanan. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Pustakawan dengan kompetensi tertentu akan mampu berperan dalam membantu masyarakat memberdayakan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kompetensi yang harus dimiliki pustakawan antara lain adalah:

1. Pengelolaan Informasi; pustakawan harus berkemampuan untuk mengelola informasi sehingga mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Dalam hal ini diperlukan kemampuan mengumpulkan informasi sesuai kebutuhan pemustaka, sehingga mampu memilah dan memilih informasi yang benar-benar diperlukan. Pustakawan harus mampu mengolah informasi baik format cetak

maupun digital, mengemas ulang informasi/*information repackaging*, serta kemampuan temu kembali informasi.

2. Literasi Informasi; pustakawan harus mampu menyampaikan materi yang terkait dengan literasi informasi kepada pemustaka. Oleh karena itu sebelumnya pustakawan harus telah memahami apa itu literasi informasi. Literasi informasi adalah kemampuan untuk menjalani siklus belajar yang tak ada henti (Proboyekti, 2008). Disampaikan pula bahwa orang yang memiliki kemampuan literasi informasi mengetahui kapan dan mengapa membutuhkan informasi, bagaimana dan dimana mendapatkan informasi tersebut, mampu mengevaluasi apakah informasi yang didapat tepat dan dapat menggunakan dan mempresentasikan dengan benar. Dengan kompetensi literasi informasi, pustakawan berkemampuan dan selalu bersemangat untuk terus belajar.
3. Kemampuan Interpersonal. Kemampuan interpersonal berkaitan dengan kemampuan seseorang berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan baik dengan individu lain. Ketika berinteraksi dengan individu lain diperlukan kemampuan berkomunikasi. Pustakawan dituntut untuk menciptakan komunikasi yang menyenangkan, sehingga pemustaka tidak merasa segan menghubungi pustakawan.

4. Kemampuan Intrapersonal. Kemampuan intrapersonal adalah kemampuan seseorang untuk memahami dirinya sendiri. Karakteristik seseorang yang memiliki kemampuan intrapersonal adalah (Istiana, 2007):
- a. memiliki tanggung jawab,
 - b. mampu mengenali perasaannya, dan mengarahkan emosi pribadinya,
 - c. mempunyai percaya diri,
 - d. berani mengambil keputusan,
 - e. mampu memotivasi diri-sendiri,
 - f. mampu mengintropeksi diri dan memperbaiki kekurangannya

Kompetensi yang tersebut di atas akan menjawab kebutuhan perpustakaan akan pustakawan yang mampu mendukung proses pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat. Pustakawan yang demikian akan berperan sebagai pengelola informasi (Manajemen Informasi) dan pengelola pengetahuan (Manajemen Pengetahuan). Mengelola informasi untuk saat ini tidak terbatas pada sumber informasi tercetak saja, namun juga sumber informasi digital. Manajemen informasi adalah tehnik pengaturan atau organisasi agar informasi mudah dicari dan digunakan kembali oleh pemakai (Wicaksono, 2004). Untuk dapat menjalankan peran ini pustakawan harus memiliki

kemampuan dan ketrampilan dalam jaringan global/*internet literate*. Sedangkan pengelolaan pengetahuan/*knowledge management* hanya dapat dilakukan oleh pustakawan yang memiliki kemampuan dan semangat bekerja serta wawasan yang cukup luas (Sudarsono, 2006:96). Manajemen Pengetahuan adalah teknik membangun suatu lingkungan pembelajaran sehingga orang-orang di dalam terus termotivasi untuk terus belajar memanfaatkan informasi yang ada, serta pada akhirnya mau berbagi pengetahuan (Kamil, 2005). Kamil menyebutkan pula bahwa untuk mampu berperan dalam manajemen pengetahuan pustakawan harus mampu mengembangkan dirinya. Pengembangan yang dimaksud antara lain adalah mampu memahami peranannya yang berdasarkan kemitraan, memberikan kontribusi bagi lembaganya, bukan hanya terfokus pada ilmu perpustakaan dan mampu menransfer kemampuannya melalui pelatihan.

Perkembangan akses informasi yang begitu luas, kesempatan untuk memperoleh informasi melalui jaringan global tidaklah menyurutkan peran pustakawan. Hal ini perlu disadari oleh seluruh pustakawan Indonesia. Di era global saat ini justru kita pustakawan harus lebih aktif lagi menunjukkan peran di bidang kita. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi membuat pustakawan mampu mengelola

dan menyajikan informasi dengan lebih lengkap, dari beragam sumber, lebih menarik dan lebih cepat. Di sisi lain ada tuntutan untuk pandai memilah dan memilih informasi yang paling diminati dan bermanfaat bagi masyarakat. Memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang yang digeluti merupakan syarat yang harus dipenuhi agar terwujud profesionalisme pustakawan.

Penutup

Perpustakaan dan pustakawan harus berupaya untuk bangkit, meningkatkan perannya dalam masyarakat. Peringatan seratus tahun Kebangkitan Nasional merupakan kebangkitan kita semua untuk segera memperbaiki dan meningkatkan peran kita dalam masyarakat. Sebagai lembaga layanan masyarakat perpustakaan dituntut untuk terus menerus berbenah dan mau tidak mau harus berbenah. Ini dilakukan untuk lebih mampu memberikan makna bagi masyarakat sebagai pusat sumber belajar. Sebagai salah satu wahana yang cukup murah untuk mengakses informasi untuk mengembangkan wawasan, menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan secara mandiri.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2007. Satu Abad Kebangkitan Nasional. *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta. hal: 6
- Istiana, Purwani. 2007. *Meningkatkan Profesionalisme sebagai Langkah Awal Peningkatan Citra Positif Pustakawan*. Makalah disampaikan pada lomba Pustakawan Berprestasi Propinsi DIY.
- Kamil, Harkrisyati. 2005. Peran Pustakawan dalam Manajemen Pengetahuan. *Pustaka: Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi*, 1 (1) Juni: 19-22.
- Kompetensi Guru dan Pembinaan tenaga Kependidikan. <http://www.ditplb.or.id/2006/index.php?menu=profile&pro=57> (tanggal akses 15 Juni 2008 pukul 21.45 WIB)
- Proboyekti, Umi. 2008. *Literasi Informasi di Perguruan Tinggi*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Penyusunan Modul Literasi Informasi di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta 12-13 Mei 2008.
- Saputra, Gani Gaos. 2006. Peran Strategis Perpustakaan Nasional RI dalam Preservasi dan Diseminasi Khazanah Kearifan Lokal Sebagai Social Capital Bangsa. *Visipustaka Volume 8 Nomor 2*; 28-35.
- Sударsono, Blasius. 2006. *Antologi Kepustakawanan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Sukarjono. 2006. Jogja Library for All: Menuju Peneguhan Yogyakarta sebagai Pusat Pendidikan Terkemuka. *Bulletin Sangkakala*. Badan

- Perpustakaan Daerah Propinsi DIY. Edisi ke-3: 1-3*
Sutarno NS. 2006. *Perpustakaan dan Masyarakat*.
Jakarta: Sagung Seto.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- Wicaksono. Hendro. 2004. Mengembangkan Kualitas
dan Layanan Perpustakaan Berbasis Teknologi
Informasi. [http://hendrowicaksono.multiply.com/
journal/item/8](http://hendrowicaksono.multiply.com/journal/item/8) (tanggal akses 15 Juni 2008 pukul
22.00 WIB)

Jadikan Nilai-nilai Bangsa Sebagai Pembangkit Semangat Kerja

Oleh: Nurhayati

Pendahuluan

Suatu bangsa tidak bisa maju apabila masih terjebak pada masa lalu. Masa lalu seyogyanya hanya diperlukan sebagai inspirasi untuk menatap masa depan yang lebih gemilang. Lalu bagaimana agar bangsa kita bisa menatap masa depan dengan semangat baru?

Dalam menyongsong masa depan, ada baiknya bangsa ini menengok kesuksesan bangsa-bangsa lain. Pada dekade tahun enampuluhan bangsa Indonesia memiliki tingkat "Human Development Index"/HDI yang tidak kalah dengan HDI dari bangsa-bangsa Asia Tenggara lainnya. Bahkan bangsa kita berada di atas negara-negara tetangga. Sekitar empat puluh atau lima puluh tahun yang

lalu Malaysia, Singapura, dan Thailand merupakan negara ASEAN yang memiliki tingkat kemampuan sumber daya manusia di bawah kemampuan sumberdaya manusia Indonesia

Dalam perjalanan waktu ternyata mereka lebih maju pesat melalui berbagai upaya sehingga saat ini kemampuan rata-rata sumber daya manusia negara-negara tersebut melampaui kemampuan rata-rata sumberdaya manusia bangsa kita. Hal ini disebabkan antara lain bahwa negara mereka memberikan perhatian yang sangat besar dalam pembangunan sumberdaya manusia melalui pendidikan, penelitian, dan pelatihan.

Seiring perjalanan waktu, HDI kita lambat laun justru mengalami penurunan. Sebagaimana pernah diutarakan Menkeu Sri Mulyani di sebuah seminar bahwa martabat bangsa ini tak dipandang di jajaran bangsa-bangsa, demikian pula di forum ekonomi dunia.

Saat ini, posisi HDI kita masih sulit disetarakan dengan HDI negara-negara Malaysia, Pilipina, Thailand, apalagi dengan Singapura dan lebih menyedihkan lagi bila dipadankan dengan Jepang. Bahkan yang lebih membuat bangsa kita prihatin adalah Vietnam yang relatif muda dalam menikmati kemerdekaan negaranya, lama diporandakan perang dan sistem komunis yang kaku, kini sumber daya manusianya telah melampaui HDI bangsa Indonesia. Vietnam telah

menjadi negara yang masuk dalam layar radar dunia.

Lalu mengapa ini semua bisa terjadi? Bukankah kita telah memiliki semangat perjuangan, telah melaksanakan pembangunan, juga sudah mempunyai nilai-nilai luhur bangsa. Mari sejenak kita menengok nilai-nilai bangsa yang bisa kita jadikan spirit. Bangsa akan menjadi maju apabila setiap orang melakukan tugas masing-masing secara maksimum. Peran individu menjadi penting demi kemajuan, tetapi nampaknya bangsa ini masih menghadapi berbagai hambatan hingga seolah kalah dalam beradu.

A. Bangsa Indonesia.

Setiap bangsa selain melakukan pembangunan yang lebih giat, mereka juga memiliki falsafah hidup, nilai-nilai, dan komitmen yang dijalankan secara mantap. Begitu pula bangsa Indonesia. Bangsa kita memiliki falsafat dan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa sendiri, maupun nilai-nilai yang diambil dari agama dan kepercayaan mayoritas bangsa kita. Misalnya dalam hadist Nabi Muhammad S.A.W. telah disebutkan bahwa ada dua nikmat yang banyak dilupakan manusia yaitu nikmat sehat dan peluang kesempatan. Ajaran ini mengandung arti bahwa manusia itu harus beraktivitas positif atas waktu dan kesehatan yang dimilikinya. Namun demikian kesempatan ini sering disia-siakan.

Ahli kesehatanpun memberikan nasehât yaitu , apabila kita ingin tetap sehat maka buatlah sibuk. Jangan malas. Kalau saja nilai-nilai tersebut dipahami dengan benar dan diimplementasikan dengan sungguh-sungguh niscaya kita menjadi bangsa yang hebat.

Nilai-nilai tersebut antara lain tentang pemanfaatan waktu dimana bangsa kita diajarkan untuk selalu waspada dari lima hal terhadap lima hal lainnya. Dalam hal ini Rasulullah S.A.W. menyatakan:

- a. Gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu
- b. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu
- c. Gunakan masa kayamu sebelum kekuranganmu
- d. Gunakan masa luangmu sebelum diberi kesempatan waktu
- e. Gunakan masa hidupmu sebelum tiba saat kematianmu

(H.R. Baehaqi)

Selain itu kita juga telah mendapatkan falsafah bijak yang menyebutkan bahwa:

- a. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin.
- b. Hari esuk harus lebih baik dari hari ini.
- c. Sesudah kesulitan pasti ada kelapangan , maka apabila telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan yang lainnya dengan sungguh-sungguh.(Q.S. Al-Insyirah: 6-7).

Agama yang ada juga telah mengajarkan betapa pentingnya memanfaatkan waktu. Menyia-nyikan waktu atau bermalas-malasan sama halnya dengan menerima tipu daya iblis terhadap manusia. Oleh sebab itu bangsa yang berintegritasi moral tinggi senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Secara umum salah satu nilai yang diajarkan oleh agama kita adalah kejujuran dan keterbukaan.

a. Kejujuran

Kejujuran bagi bangsa ini sangat penting karena dengan nilai ini akan muncul perasaan mau mengakui kekurangan, kesalahan, dan keterpurukan sehingga dari kesadaran ini lahir semangat baru dan optimisme baru dengan tujuan untuk memajukan bangsa dari keterbelakangan dan kemiskinan

b. Keterbukaan

Apabila bangsa sudah memiliki kesadaran, maka yang menjadi giliran adalah keterbukaan harus tertancap dalam sanubari bangsa kita. Coba kita menengok sebentar tentang kinerja aparat negara ini. Dari pandangan masyarakat citra pegawai negeri belum baik. Masyarakat masih memiliki kesan bahwa PNS sebagai pegawai yang malas, tidak disiplin, dan lamban dalam memberikan pelayanan publik, masih suka disogok, menipu, korupsi dan sebagainya. Citra yang negatif ini masih

ada kendati sebenarnya banyak PNS yang memiliki kinerja yang baik, integritas moral yang tinggi, memiliki jiwa pengabdian yang kuat dan sebagainya. Citra negatif tersebut harus dibuang jauh-jauh sebab jika tidak, maka pembangunan bangsa akan terhambat.

Sekarang, mengapa bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur, begitu juga sumber daya alam yang melimpah justru tidak mampu menjadi bangsa yang besar? Barangkali kekurangan kita adalah belum semua lapisan bangsa ini memahami nilai-nilai luhur tersebut dan belum menjalankannya secara bersungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari.

B. Bangsa Lain

Indonesia memiliki sumberdaya alam yang banyak, tetapi nampaknya persoalan bangsa juga tumbuh banyak sehingga ini juga dapat menyebabkan bangsa kita masih tertinggal dibanding bangsa-bangsa yang serumpun. Bangsa-bangsa lain yang maju seperti bangsa Jepang, bangsa Korea juga sukses konon karena menerapkan budaya dan disiplin kerja yang tinggi.. Malaysia memperkenalkan budaya memandang ke Timur, maksudnya adalah mempelajari budaya masyarakat Jepang pada awal tahun 1980. Budaya memandang ke Timur bukan lah belajar untuk menjadi

bangsa Jepang tetapi mengambil semua aspek positif dalam diri bangsa Jepang.

Jadi tidak ada salahnya belajar dari bangsa lain apabila ingin maju. Dulu, bangsa Jepang belajar pada bangsa Cina dan belakangan belajar ke Barat. Jepang yang merupakan negara kekaisaran dimana penggunaan istilah kaisar (tenno) dipakai sejak abad ketujuh. Pada permulaan abad tersebut organisasi pemerintahan yang bergaya Cina mulai dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan Jepang, dan budaya pribumi yang canggihpun berkembang pesat. Hal ini mengungkapkan bahwa ada tradisi yang perlu dipegang erat atau dipegang teguh dan ada budaya yang harus berubah terus.

Seperti telah disaksikan, pada akhir Perang Dunia II ekonomi Jepang hancur. Kota-kota besarnya menjadi puing-puing, wilayahnya diduduki tentara asing dan negara terpecah-pecah. Setelah perang usai, Jepang masih diwajibkan membayar pampasan perang kepada negara-negara yang telah dirugikan akibat agresi yang dilakukannya. Namun dalam kurun waktu kurang dari empat puluh tahun, Jepang telah bangkit menjadi salah satu negara adidaya dalam industri dan perdagangan.

Kebangkitan Jepang dari kehancuran dahsyat dalam Perang Dunia II bukan karena keajaiban, melainkan diperoleh melalui semangat juang

yang tinggi, disiplin ketat, dan kerja keras yang dilandasi atas berbagai nilai-nilai luhur. Semangat apa saja yang dimiliki mereka sehingga Jepang dapat membuktikan kesuksesannya yang mengagumkan sekaligus telah mampu meminimalkan hal-hal negatif yang dapat menghambat pembangunan. Setidaknya Jepang memiliki lima nilai atau semangat yang dipegang dan dilaksanakan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yakni: semangat *bushido*, disiplin *samurai*, budaya *keisan*, prinsip *kai zen*, dan prinsip *keiretsu-zuibatsu*

1. Semangat Bushido

Orang Jepang memiliki semangat kerja keras yang diwarisi secara turun menurun yang akhirnya melahirkan semangat bushido. Bushido itu berarti kesatria, pendekar, atau samurai. Semangat bushido ini selalu dipegang teguh dari waktu ke waktu karena bushido telah menjadi jalan hidupnya kesatria sebab "dou" artinya hidup

Semangat bushido melahirkan proses belajar tak kenal lelah. Semangat ini semula dipelajari Jepang dari Barat. Namun kini dunia Barat yang terpukau dan harus belajar dari Jepang. Ini akibat dari semangat kesungguhan (semangat bushido) yaitu semangat untuk terus menerus melakukan perbaikan yang melibatkan setiap orang mulai dari pimpinan puncak sampai pekerja lapangan.

Lalu bagaimana agar kita bisa berjiwa

bushido dan prinsip apa saja yang harus dipegang erat. Untuk itu ada tujuh nilai luhur yang senantiasa dijunjung oleh bangsa Jepang dalam menjalankan semangat bushido yakni:

a.Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai utama yang harus dimiliki seseorang dalam bekerja sehari-hari. Sikap dan perilaku jujur akan mendapat respek yang baik dari orang lain.

b.Kehormatan

Seorang yang berjiwa bushido tahu sepenuhnya cara untuk menepati janji dan ini untuk menjaga kehormatan.

c.Keberanian

Seseorang harus berani mengambil inisiatif dan keputusan yang tepat, berani memanfaatkan peluang, mampu mengerjakan sesuatu dengan cara yang berbeda, berani dengan situasi baru, pantang menyerah, dan sebagainya.

d.Kesetiaan

Kesetiaan merupakan bentuk pengabdian kepada lembaga tempat seseorang bekerja baik perusahaan maupun organisasi pemerintah.

e.Kepekaan

Kepekaan adalah perasaan respek terhadap orang lain serta tidak menganggap remeh orang lain. Dari kepekaan ini timbul perasaan ingin membantu atau ingin melayani.

f. Kerendahan hati

Seorang yang rendah hati itu bukan berarti rendah diri. Rendah hati merupakan keterampilan yang tinggi untuk merebut hati orang lain. Ia tahu kapan harus berpihak kepada siapa dan untuk apa. Bangsa yang rendah hati adalah bangsa yang mau dan mampu untuk mencari sumber inspirasi dari bangsa lain yang lebih maju.

g. Keadilan

Seseorang yang baik akan dapat berada di tengah, bertindak ramah, dan tidak bohong

Demikian jika kita berjiwa bushido maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang cemerlang dan pekerja yang sukses

2. Disiplin Samurai

Jaman dahulu, pahlawan Jepang yang dikenal dengan sebutan samurai akan melakukan harakiri atau bunuh diri dengan menusukkan pedang ke bagian perut jika kalah dalam pertarungan. Hal ini justru memperlihatkan usaha mereka untuk menebus harga diri yang hilang akibat kalah perang.

Kini semangat atau disiplin samurai masih kuat tertanam dalam sanubari bangsa Jepang, namun bukan lagi melakukan harakiri. Semangat samurai digunakan untuk membangun ekonomi, menjaga harga diri dan kehormatan bangsa secara teguh. Disiplin samurai ini telah membuat bangsa Jepang sulit menerima kekalahan. Bagi mereka,

kalah tidak berarti mati. Kekalahan dapat ditebus kembali dengan kemenangan dan keberhasilan dalam bidang lain. Jika terpaksa kalah, maka mereka mau kalah dengan penuh harga diri. Disiplin samurai telah menciptakan bangsa Jepang menjadi bangsa yang:

- a. Tidak mudah menyerah karena sumberdaya alam yang minim;
- b. Tidak takut pada cobaan dan kesusahan akibat bencana alam yang melanda;
- c. Pintar memanfaatkan segala sumber yang ada;
- d. Jika melakukan suatu pekerjaan, maka mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang terbaik;
- e. Tidak boros.

3. Budaya Keisan.

Satu hal lagi yang menjadi kunci keberhasilan bangsa Jepang adalah keinginan mereka yang tinggi untuk memperbaiki diri dan mencapai keinginannya. Untuk mewujudkan keinginan ini, mereka menerapkan konsep budaya keisan, yaitu perubahan secara berkesinambungan dalam budaya kerja mereka. Dengan cara mereka harus selalu bersikap kreatif, inovatif, dan produktif. Konsep keisan memerlukan kerajinan, kesungguhan, minat dan keyakinan, hingga akhirnya timbul kemauan untuk selalu belajar dari orang lain.

Perubahan sangat penting untuk membuat mereka mampu bersaing dengan negara yang di-

anggapnya lebih maju. Untuk memajukan perindustriannya, Jepang tidak bergantung pada teknologi Barat. Namun mereka mempelajari dan meniru teknologi itu, kemudian teknologi tersebut disesuaikan dengan budaya kerja dalam perusahaan Jepang.

Dalam konsep keisan, apapun bentuk perubahan yang dilakukan, kecil maupun besar dapat memberikan hasil dan kemajuan. Sebab, perubahan juga dapat membebaskan seseorang, masyarakat, dan negara dari kungkungan budaya dan cara berpikir yang tidak relevan. Hal ini berarti bahwa kita harus meninggalkan cara lama tetapi cara lama itu juga dapat dikembangkan tanpa menghilangkan dasarnya.

4. Prinsip Kai Zen

Bangsa Jepang memiliki komitmen yang tinggi pada pekerjaan mereka. Setiap pekerjaan perlu dilaksanakan dan diselesaikan sesuai jadwal agar tidak menimbulkan pemborosan. Jika tidak mengikuti jadwal, maka penyelesaian pekerjaan akan lambat dan menimbulkan kerugian. Apabila pekerjaan itu dilakukan terlalu cepat, maka dapat menimbulkan kekeliruan. Oleh karena itu perusahaan di Jepang menerapkan peraturan "tepat waktu". Inilah yang dimaksud dengan prinsip Kai Zen, yang intinya adalah mengoptimalkan biaya dan waktu untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dalam kuantitas besar.

Untuk mencapai prinsip ini karyawan harus memberikan seluruh perhatian pada pekerjaan dan tidak boleh membuang waktu dengan obrolan tidak berguna, bercanda, atau istirahat terlalu lama. Hampir seluruh perusahaan Jepang menerapkan prinsip Kai Zen yang merupakan penerapan kualitas kerja yang menekankan pada tiga aspek utama yaitu: peningkatan kerja secara terus menerus, dapat diukur, dan dilaksanakan secara bertahap.

5. Prinsip Keiretsu dan Zaibatsu

Secara tradisional, yang dimaksud dengan keiretsu adalah gabungan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga yang sama. Usaha tersebut merupakan usaha yang diwariskan secara turun temurun, seperti yang sekarang ada adalah Mitsubishi, Mitsui, dan Sumitomo. Mitsubishi yang berdiri sejak tahun 1870, pada awalnya merupakan perusahaan perkapalan, kemudian memasuki bidang pertambangan, perbankan, dan sebagainya. Melalui anak-anak perusahaan dan juga rekan perusahaan mereka membentuk satu gabungan dan serikat yang disebut zaibatsu. Sistem penggabungan ini diyakini dapat menjadikan sebuah perusahaan yang besar, kuat, dan memonopoli. Jadi sistem ini melambangkan bahwa persatuan akan menghasilkan kebersamaan dan kebersamaan akan melahirkan kekuatan

C. Yang Perlu Bagi Kita

Jika Jepang dapat menjadi nomor satu dan menciptakan keajaiban dalam bidang ekonomi, maka tidak ada alasan bagi negara lain termasuk Indonesia untuk tidak bisa mendapatkan kedudukan yang sama. Jika Jepang bisa, maka negara lain pasti bisa, walaupun tidak bisa sama persis seperti Jepang, tetapi bangsa lain dapat meniru Jepang. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam upaya kita untuk mengadakan perubahan:

- a. Ukuran kemajuan Jepang dapat diukur dari pendapatan per kapita dan taraf hidupnya yang menempati posisi kedua tertinggi di dunia setelah Swiss. Swiss merupakan negara yang memiliki Produk Nasional Bruto (PNB) tertinggi di dunia.
- b. Selain memiliki simpanan khusus kedua tertinggi di dunia, Jepang memiliki PNB kedua tertinggi di dunia, Jepang juga tidak memiliki hutang luar negeri. Merupakan pula satu-satunya negara Asia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain.
- c. Bangsa Jepang mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan tanpa menghilangkan identitas dan jati diri yang telah mengakar kuat
- d. Bangsa Jepang mampu bekerja dalam waktu yang panjang tanpa mengenal lelah, tidak mudah bosan, dan tidak gampang putus asa.

- e. Negara Jepang bukan hanya memiliki tingkat inflasi rendah, melainkan juga tingkat pengangguran yang rendah.
- f. Semangat kebersamaan di kalangan pekerja Jepang sangat tinggi. Salah satunya ditandai dengan sifat bangsa Jepang yang berusaha untuk tidak mengeluarkan pendapat pribadi karena dikawatirkan akan mempengaruhi kepentingan kelompok.
- g. Masyarakat Jepang suka membaca. Waktu yang ada digunakan untuk membaca misalnya takala sedang berada di kereta ulang-alik pengangkut karyawan.
- h. Minat dan kecintaannya terhadap ilmu membuat mereka bisa merendahkan diri untuk belajar.
- i. Bangsa Jepang melibatkan aspek emosi dan intuisi untuk menghasilkan inovasi yang sesuai dengan selera pasar.
- j. Jepang tidak senang menyimpan dendam atas segala perbuatan musuhnya. Jepang lebih suka berkompromi dan menjalin hubungan dengan negara yang pernah menghancurkannya, dan negara-negara yang pernah dijajahnya.
- k. Musuh adalah rekan bisnis utama dalam perdagangan dan hubungan diplomatik. Jadi tidak ada perang. Bila tidak dapat mengalahkan musuh, kita harus bisa berteman dengannya. Itulah prinsip Jepang.

- l. Selama lebih dari seabad, Jepang merupakan negara yang paling banyak meniru negara luar. Tetapi sekarang negara luar banyak yang meniru dan menjadikan Jepang sebagai contoh karena kesuksesannya di bidang ekonomi.
- m. Menjelang tahun 1978 gaji pekerja Jepang lebih tinggi dari pada gaji pekerja AS dan berkali-kali lebih tinggi dari pada gaji pekerja negara-negara Asia lainnya.
- n. Pekerja Jepang mampu mengerjakan berbagai pekerjaan dalam waktu yang sama. Artinya seorang pekerja Jepang rata-rata dapat mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh lima orang.
- o. Secara tradisi, pimpinan eksekutif Jepang telah diajarkan agar selalu mengamalkan sikap saling membantu
- p. Cara hidup bangsa Jepang berbeda dengan bangsa Asia yang lain. Mereka senantiasa bergerak gesit dan berjalan dengan cepat
- q. Bangsa Jepang tidak menganggap tempat kerja hanya sekadar tempat mencari makan, tetapi juga menganggapnya sebagai bagian dari keluarga dan kehidupannya.
- r. Orang Jepang rela menghabiskan waktu mereka di tempat kerja dari pada pulang lebih cepat ke rumah. Pekerja yang lebih cepat pulang ke rumah dianggap sebagai pekerja yang tidak penting.

D. Bagaimana Membangkitkan Semangat?

Untuk membangkitkan semangat bekerja yang baik dibutuhkan stimulus atau rangsangan yang positif baik yang berasal dari dirinya sendiri atau lingkungan. Dari organisasinya sendiri maupun dari lembaga lain, jika itu dirasa baik. Seorang pustakawan perlu memandang lembaga pelayanan masyarakat yang lain jika lembaga tersebut lebih memukau.

Berikut ini ada sembilan nilai dasar rimbawan atau ahli hutan yang harus dihayati, dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh rimbawan:

1. **Jujur:** Adalah sikap ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan.
2. **Tanggungjawab:** Adalah kemampuan dan kemauan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu serta berani memikul akibat atas putusan dan tindakan yang dilakukan!
3. **Ikhlas:** Adalah sikap rela untuk berbuat yang positif bagi orang lain, yang datang dari sanubari
4. **Disiplin:** Adalah sikap mental yang tercermin dalam perilaku kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan kerja, hukum dan norma kehidupan bermasyarakat.

5. Visioner: Adalah mempunyai wawasan atau pandangan jauh ke masa depan dan arah tujuan yang ingin dicapai.
6. Adil: Adalah perbuatan yang dilandasi rasa tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Peduli: Adalah sikap memperhatikan orang lain dan lingkungan.
8. Kerjasama: Adalah kemauan dan kemampuan untuk bekerjasama dengan semua pihak untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal
9. Profesional: Adalah kemampuan konseptual, analisis dan teknis dalam bekerja yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan, sehingga putusan dan tidakannya didasari atas rasionalitas dan etika profesi.

Kita harus menerapkan nilai-nilai luhur bangsa dalam budaya kerja dan kehidupan jika ingin maju dan berhasil seperti Jepang. Konsep tersebut dapat dijadikan dorongan agar kita selalu berpikir mencari perubahan untuk memperbaiki cara kerja, dan cara pandang terhadap sesuatu.

Daftar Pustaka

- Ann Wan Seng. 2007. *Rahasia Bisnis Orang Jepang*. Jakarta: Hikmah
- Keene, Donald. 2006. Japanese Literature as a Bridge for the World . *Japan Echo* June 2006
- Saragih, Simon. 2008. Forum Ekonomi Dunia: Indonesia Seperti Kafilah Berlalu. *Kompas* 18 Juni 2008: 9
- Suhartrislakhadi, Deddy dan Wiyanto, Agus. 2007. Sembilan Nilai Dasar Rimbawan Sebagai Sumber Perubahan Sikap Untuk Melejitkan Kinerja Widyaiswara Sebagai Satria Rimbawan. *Silvika* Edisi 54/XII/2007
- Susanto, Adhi. 1992. Mengamati Aspek-Aspek Perkembangan Teknologi di Jepang dan di Indonesia. *Jurnal Studi Jepang*. 1 (2) 1992
- Tsunenari, Tokugawa and Akihiko Nakamura. 2007. The Way of the Samurai: Bushido as Character Education. *Japan Echo* April 2007

Tahun 2008: Tonggak Kebangkitan Atau Kebangkrutan Kepustakawanan?

Oleh: Sri Rumi

Abstrak

Kepustakawanan Indonesia pada tahun 2008 ini menjadi titik penentuan untuk menuju kebangkitan atau kebangkrutan. Momentum ini perlu dipertegas kembali mengingat profesi pustakawan sebagai modal intelektual perpustakaan mengalami kemandegan/ stagnan, terjebak rutinitas, dan terbelenggu oleh persoalan klasik. Kini persoalannya berpulang pada pustakawan sendiri apakah akan bangkit dari tidur panjang atau justru semakin mati suri untuk selanjutnya berhenti secara total.

Semangat kebangkitan nasional sebagai dorongan untuk tetap konsisten meretas kepustakawanan agar tetap eksis dalam berkiprah di masyarakat informasi ini. Apalagi dengan lahirnya

Undang-Undang No.43 Tahun 2007, dimana profesi pustakawan mendapat jaminan penghasilan, jaminan kesejahteraan sosial, pembinaan karier, kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam tulisan ini akan dibahas apakah tahun 2008 ini sebagai tahun kebangkitan atau justru kebangkrutan bagi profesi pustakawan. Semuanya itu tergantung pada diri pustakawan sendiri. Untuk dapat menuju kebangkitan pustakawan yang perlu diperhatikan adalah kompetensi profesi dan kompetensi diri.

Kata Kunci: Kebangkitan Pustakawan. Profesi Pustakawan.

A. Latar Belakang

Tanggal 20 Mei 2008 genap 100 tahun organisasi Boedi Utomo didirikan oleh para mahasiswa Stovia yang disponsori oleh dokter Sutomo. Gagap gempita acara 100 tahun kebangkitan diperingati di Stadion Bung Karno yang disiarkan oleh seluruh stasiun televisi dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sejenak kita diajak untuk mengingatkan beragamnya budaya dan tarian dari bumi Aceh sampai Papua. Sebagai bangsa kita bangga mempunyai kekayaan tarian daerah yang berbeda-beda, namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan RI. Pro dan kontra pun muncul dari

adanya peringatan yang spektakuler di masa prihatin ini. Apapun pendapat orang yang pasti acara yang menghabiskan biaya itu mestinya mempunyai pesan moral untuk mempersatukan Negara Kesatuan Indonesia yang sudah terkoyak oleh berbagai kepentingan politik maupun non politik. Pastinya kita tidak ingin bangsa ini menjadi ajang pertumpahan darah hanya karena "ego" daerah, suku, agama, pandangan politik, usia, jenis kelamin, bahasa, dan warna kulit. Di masa yang sulit seperti ini kita seharusnya merapatkan barisan, dan menggalang perasaan sebangsa dan setanah air Indonesia.

Sekarang, apa hubungannya antara pustakawan dengan peringatan Kebangkitan Nasional? Adakah benang merahnya? Kenapa kebangkitan ini juga perlu diungkap? Sejauh mana kiprah pustakawan setelah 100 tahun terjadi Kebangkitan Nasional dan 10 tahun Reformasi? Dalam tulisan ini akan diuraikan pernik-pernik kepustakawanan menuju masyarakat informasi setelah 100 tahun Indonesia Bangkit dan 10 tahun mengalami masa Reformasi.

B. Kebangkitan Versus Kebangkrutan

Kebangkitan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:76) berasal dari kata dasar bangkit yang berarti bangun (dari tidur, duduk) lalu berdiri, atau bangun (hidup) kembali, timbul, atau

terbit. Makna kebangkitan ini dapat juga disimak dari pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertema “Indonesia Pasti Bisa” pada peringatan ke 100 tahun Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2008 lalu yang menekankan tentang:

1. Kemandirian Bangsa.

Kemandirian berarti jangan sampai terjerat hutang, tidak tergantung pada teknologi dan perekonomian asing, dan tidak didikte oleh orang-orang asing. Penggunaan Software Open Source bagi mayoritas masyarakat Indonesia adalah salah satu upaya agar bangsa ini menjadi mandiri, tidak terlalu tergantung pada vendor asing maupun konsultan asing, dan sekaligus juga untuk menghemat devisa nasional.

2. Daya Saing Bangsa yang Tinggi.

Masyarakat yang cerdas, produktif, efisien, inovatif, kreatif, kerja keras, rajin, tepat waktu, dan tidak membuang-buang waktu. Kemampuan untuk memproduksi perangkat telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi adalah juga bagian dari peningkatan daya saing nasional bangsa Indonesia.

3. Peradaban Bangsa yang Tinggi:

Yakni masyarakat yang beradab, karakter yang terhormat, mulia, demokrasi, teratur, terencana, jujur, sikap toleransi yang tinggi, maju, namun juga tetap menjaga kesederhanaan.

Kondisi ini apabila dikaitkan dengan profesi pustakawan, yang secara formal diakui Pemerintah pada tahun 1988 itu, apa yang mereka lakukan. Kebangkitan di dunia kepustakawanan dimaknai sebagai era untuk terus memencarkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan informasi yang menjadi kekuatan, komoditas, dan kebutuhan semua orang. Peringatan kebangkitan ini menjadi momentum tepat sebagai wahana introspeksi, evaluasi, dan memperbaiki diri dan profesi, serta memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepustakawanan. Semestinya sudah tidak perlu terjebak oleh persoalan-persoalan klasik misalnya dana, citra pustakawan dan perpustakaan, apresiasi masyarakat dan pimpinan, budaya baca, dan lainnya. Sebaiknya sekarang kita mulai bekerja dan berkarya terus yang muaranya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemustaka. Sudah waktunya kita bangkit dari tidur panjang ini, supaya para pustakawan tidak hanya menjadi penonton di tengah hingar bingar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi yang dimanfaatkan perpustakaan sejak tahun 1980 an telah mampu merubah citra perpustakaan dari negatif, kaku, dan membosankan itu menjadi positif, enak, dan mengasyikkan. Pemustaka sudah mulai menghabiskan waktu luangnya untuk berselancar di dunia maya di ruangan perpustakaan yang nyaman, dan aman.

Selayaknya kepercayaan pemustaka terhadap lembaga perpustakaan saat ini dapat dijadikan era kebangkitan di dunia kepustakawanan. Memang diakui bahwa pemanfaatan teknologi di perpustakaan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun demikian pemustaka sudah merasa membutuhkan perpustakaan. Oleh karena itu pustakawan dan pengelola perpustakaan perlu memerhatikan keinginan dan kebutuhan pemustaka. Untuk itu perlu diupayakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjalin jejaring dengan sesama profesi pustakawan secara lokal, nasional, regional, dan internasional.
2. Belajar terus menerus sepanjang hayat/*long life learning* untuk menambah wawasan dan pengetahuan, agar dapat mengikuti perkembangan.
3. Berkarya dan berinovasi untuk memberikan pelayanan prima tanpa melanggar prosedur dan aturan yang telah disepakati bersama.
4. Berjiwa kewirausahaan/*entrepreneurship* dengan tetap mengindahkan etika dan norma yang berlaku. Hal ini bukan menjadikan perpustakaan sebagai lahan untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan.
5. Bersikap jujur, dapat dipercaya, sportif, dan transparan, dalam berlaku dan bertindak.
6. Terbuka untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak dibatasi oleh waktu dan

tempat. Sebab memperoleh informasi merupakan hak azasi tiap orang.

7. Berwawasan luas, menghargai pendapat orang lain, mempunyai prinsip, dan berkepribadian menarik/*inner beautiful*, sopan, dan supel.
8. Menjalin komunikasi dengan berbagai pihak baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga ada koordinasi dan kerjasama yang terjalin dengan baik. Sehebat apapun pustakawan tidak akan bisa bekerja sendirian. Untuk maju bersama diperlukan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak
9. Selalu aktif dalam organisasi profesi seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). IPI sebagai satu-satunya wadah resmi untuk para pustakawan yang memberikan advokasi bagi para anggotanya.
10. Berkompeten, secara pribadi (SQ, EQ), dan profesi (IQ), sehingga pustakawan dapat bersaing di era global ini, dan perannya semakin diperhitungkan.
11. Mengerti dan dapat mengoperasikan peralatan teknologi informasi dan bahasa asing baik secara pasif maupun aktif.

Berkaitan dengan kompetensi pustakawan, Blasius Sudarsono (2005) menyatakan bahwa pustakawan Utama dan Madya semestinya mem-

punyai “*core competencies*”, yang terdiri dari 7 kompetensi, yaitu filosofi dan etika, kelengkapan kepribadian, administrasi, manajemen koleksi, layanan publik, layanan teknis, dan teknologi.

Kemudian kebangkrutan mengandung makna menderita kerugian besar sehingga gulung tikar, atau bangkrut karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Makna bangkrut untuk profesi pustakawan adalah kondisi dimana profesi pustakawan ini tidak dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Dengan demikian ada dan tidak ada ternyata tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan. Apalagi profesi ini masih dianggap asing oleh sebagian masyarakat dan jumlahnya sedikit yakni 2.972 orang (Kartini, 2008)

Profesi pustakawan masih asing, karena profesi ini belum sepopuler profesi lainnya seperti dokter, apoteker, hakim, jaksa, notaris, bankir, dosen, peneliti, dan lainnya. Ketidakpopuleran ini antara lain disebabkan kurangnya promosi dan sosialisasi. Di satu sisi justru pustakawan merasa “malu” karena “terlanjur” menjadi profesi pustakawan. Akibat dari sikap ini adalah mereka merasa rendah diri/*minderjarig* (bahasa Belanda).

Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa mereka yang bekerja di perpustakaan termasuk pustakawan hanya sebagai penjaga buku. Maka

wajar mereka menganggap pustakawan itu rendah karena mereka tidak memperoleh informasi yang cukup tentang kepustakawanan. Di samping itu kegiatan pustakawan jarang diekspos oleh media massa cetak dan elektronik. Profesi ini selalu luput dari pemberitaan seperti profesi lain. Padahal media massa diakui sebagai alat yang paling baik untuk promosi, mengingat jangkauannya yang bisa sampai pelosok nusantara. Untuk itu semestinya pustakawan sendiri yang mensosialisasikan profesinya kepada masyarakat. Bagaimana caranya ? Caranya bekerja secara profesional, ramah, supel, jujur, ikhlas sehingga pemustaka merasa puas dengan kinerja pustakawan, jadi ada kesan positifnya. Apabila sudah ada kesan positif apresiasi itu akan berubah sendiri dan profesi pustakawan semakin dibutuhkan.

Disisi lain, pustakawan dikatakan langka karena baru ada 2.972 (Kartini, 2008). Data ini adalah yang berstatus sebagai PNS (sesuai dengan definisi pustakawan menurut Kepmenpan No.132/2002). Ini berarti bila dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang berjumlah 225 juta jiwa, ternyata kalau diprosentase baru mencapai 0,0012 persen. Rasionya setiap pustakawan harus melayani 78.479 orang. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan mengingat dalam masyarakat informasi, pustakawan sebagai agen perubahan/*agent of change* sehingga profesi pustakawan tidak hanya mengu-

rusi buku-buku dan majalah cetak, tetapi juga informasi digital yang dibutuhkan pemustaka.

C. Merajut Optimisme Profesi Pustakawan

1. Profesi Pustakawan

Profesi Pustakawan sangat prospektif, untuk berkembang dan dilirik orang. Pelan tetapi pasti bahwa profesi ini sudah mengalami kemajuan yang lebih baik bila dibandingkan dengan profesi yang serumpum misalnya arsiparis. Ternyata pustakawan sudah lebih menjanjikan baik ditinjau dari besarnya tunjangan maupun perkembangan kariernya. Padahal semestinya karier arsiparis sudah lebih dulu mendapat jaminan pendidikan dan karier berdasarkan UU No.7 Tahun 1971 tentang Pokok-pokok Kearsipan. Kenyataannya arsiparis belum berkembang seperti pustakawan yang baru saja dijamin kelangsungan kariernya oleh UU No.43 Tahun 2007. Selayaknya pustakawan berbangga dan angkat topi dengan perjuangan para tokoh-tokoh senior pustakawan Indonesia. Mereka telah bersusah payah mengalami jatuh bangun untuk dapat meyakinkan Pemerintah sehingga diakui sebagai jabatan fungsional sejak tahun 1988.

2. Rumpun Jabatan Pustakawan

Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai

Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang pengembangan dan pemeliharaan koleksi arsip, perpustakaan, museum, koleksi benda seni dan benda yang sejenis serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berhubungan dengan kearsipan dan kepustakaan. Contoh jabatan fungsional keahlian adalah Arsiparis dan Pustakawan sebagai fungsional ketrampilan yaitu Asisten Arsiparis dan Asisten Pustakawan.

Meningkatnya jabatan fungsional, ini diharapkan untuk dapat meminimalkan masalah birokrasi di Indonesia. Dengan Keppres No. 87 Tahun 1999 telah diatur rumpun jabatan fungsional PNS. Dalam Keppres tersebut ada 25 jenis rumpun jabatan fungsional PNS selain pustakawan adalah rumpun jabatan matematika, dan statistik, rumpun kekomputeran, rumpun ilmu hayat, rumpun pengawasan dan keamanan.

3. Syarat dan Jenjang Jabatan Pustakawan

Jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:

- a. Mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Sarjana (Strata-1);

- b. Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan;
- c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya. Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional keahlian menurut pasal 5 dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu:
 - a). Jenjang Utama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
 - b). Jenjang Madya, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - c). Jenjang Muda, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utama

nya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- d). Jenjang Pertama, yaitu jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsinya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

Sedang Jabatan fungsional ketrampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya:

- a. Mensyaratkan kualifikasi teknisi profesional dan atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3);
- b. Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional dari suatu bidang profesi;
- c. Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.

Berdasarkan penilaian bobot jabatan fungsional, maka jabatan fungsional ketrampilan menurut pasal 6 dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan yaitu:

- a. Jenjang Penyelia, adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu, dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- c. Jenjang Pelaksana, adalah jenjang jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
- d. Jenjang Pelaksana Pemula, adalah jenjang

jabatan fungsional ketrampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

4. Besarnya Tunjangan Fungsional Pustakawan

PNS yang menduduki jabatan menduduki jabatan fungsional pustakawan mendapat tunjangan fungsional di luar gaji setiap bulannya. Besarnya untuk tingkat keahlian diusulkan

- a. Jenjang Utama, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon Ia (menurut Perpres No.26/2007 sebesar Rp 5.550.000,-).
- b. Jenjang Madya, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIa (Rp Rp 4.375.000,-)
- c. Jenjang Muda, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIIa (Rp 1.260.000,-).
- d. Jenjang Pertama, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IVa. (Rp 540.000,-)

Sedangkan besarnya tunjangan jabatan fungsional ketrampilan diusulkan:

- a. Jenjang Penyelia, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IIIa (Rp 1.260.000,-)

- b. Jenjang Pelaksana Lanjutan, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon IVa (Rp 540.000,-)
- c. Jenjang Pelaksana, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon Va (Rp Rp 360.000,-)
- d. Jenjang Pelaksana Pemula, setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon Vb.(tidak ada datanya).

Kalau memperhatikan pemaparan diatas ternyata tunjangan pustakawan masih belum sesuai seperti yang dituangkan dalam Keppres No.87 Tahun 1999. Namun demikian sesuai kelayakan dan kemampuan Pemerintah, maka tunjangan pustakawan kini telah mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 47 Tahun 2007 yang berkisar antara Rp 240.000,- s/d Rp 700.00,-, dan ini sudah lebih tinggi bila dibandingkan dengan tunjangan Arsiparis. Menurut Keppres No.40 Tahun 2006 Arsiparis mendapat tunjangan antara Rp 197.000,- s/d Rp 550.000. Juga lebih tinggi dari tunjangan fungsional umum, dimana pegawai negeri sipil golongan IV (semua golongan) hanya mendapat Rp. 185.000,-/bulan. Sedangkan tunjangan fungsional pustakawan terendah golongan II/b sebesar Rp. 225.000,-/bulan. Ini menandakan bahwa profesi Pustakawan sudah mendapat apresiasi dari pemerintah,

meskipun masyarakat belum memberikan penghargaan sebagaimana layaknya. Hal ini masih harus diperjuangkan terus menerus.

5. Profesi Pustakawan adalah Pilihan

Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2). Hal ini berarti bahwa pustakawan juga mempunyai hak yang sama untuk hidup layak. Pemerintah sudah memberikan fasilitas gaji dan tunjangan fungsional yang besarnya sudah ditentukan dalam Keppres No. 47 Tahun 2007. Bila dibandingkan dengan arsiparis sudah lebih besar, namun bila dibandingkan dengan profesi yang lain misalnya dosen dan guru, ternyata masih ada dibawahnya. Itu saja bagi pustakawan yang PNS, bagi yang non PNS belum mendapat tunjangan, sehingga menjadi pustakawan adalah pilihan hidup yang penuh dengan tantangan dan hambatan. Dengan demikian, maka tidak aneh apabila ada beberapa pustakawan yang pindah jalur ke jalur struktural yang dikira lebih menjanjikan. Masalahnya, mengingat profesi pustakawan di Indonesia masih langka, akan lebih baik ilmunya dimanfaatkan di jalur fungsional, sehingga kepustaawanan di Indonesia dapat berkembang.

C. Penutup

Judul diatas yang berupa kalimat tanya, hanya bisa dijawab secara tepat oleh para pustaka

wan berlandaskan sikap jujur sesuai dengan hati nurani. Setidaknya tahun 2008 dapat dijadikan tonggak berharga apakah sebagai kebangkitan atau justru kebangkrutan bagi dunia kepustakawanan di Indonesia. Secara intern pustakawan sendiri untuk menentukan nasib profesinya, sedang secara ekstern pemerintah sebagai regulator andilnya juga ditentukan oleh bagaimana pustakawan dapat mempresentasikan profesinya. Kesimpulannya bangkit dan bangkrutnya profesi pustakawan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kinerja, profesionalisme pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka. Oleh karena itu sebagai pustakawan harus jeli dalam melihat peluang-peluang yang semakin jelas dan terbuka lebar untuk tidak ragu-ragu lagi melibatkan diri sebagai agen perubahan bagi lingkungannya.

Dengan disahkannya UU No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, semakin terbuka jalan yang lapang untuk profesi pustakawan. Saatnya pustakawan berpikiran secara visioner, tetapi tetap berpijak di dunia nyata. Tahun 2008 ini sebagai masa peralihan antara generasi tua dan generasi muda di lingkungan pustakawan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah ada harapan yang besar bahwa generasi muda pustakawan akan mampu merubah dunia kepustakawanan di Indonesia. Semoga.

Daftar Pustaka

Hernandono. *Problem Yang Dihadapi Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama. Makalah Kerja. Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama se Indonesia di Jakarta tanggal 29-31 Agustus 2005*

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20070531114255>,
diunduh tgl 22 Juni 2008 pukul 14.46

<http://www.unmit.org/legal/IndonesianLaw/keppres/kp199987.htm>. diunduh tgl 22 Juni 2008 pukul 15.44.

<http://www.djpp.depukumham.go.id/inc/buka.php?d=2000+7&f=ps28-2007.htm>
diunduh tgl 22 Juni 16.46 .

<http://www.google.co.id/search?id=&q=rumpun+pustakawan&meta=0%3DcountryID>
diunduh tgl 22 Juni 2008 pukul 19.06

Kartini. *Pengembangan Jabatan Pustakawan. Makalah Rapat Koordinasi Pengembangan Pustakawan dan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan di Jakarta tanggal 23 - 24 Juli 2008*

Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Pidato Presiden RI Soesilo Bambang Yudoyono pada Hari Kebangkitan Nasional ke 100 Tahun; Kemandirian, Daya Saing, dan Peradaban Yang Tinggi.

Sudarsono, B. *Membangun Kemampuan Pustakawan.
Makalah Kerja
Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama Se In-
donesia di Jakarta tanggal 29-31 Agustus 2005*

Perangkat Lunak Gratis: Awal Kebangkitan Perpustakaan di Tanah Air

Oleh: Heri Abi Burachman Hakim

Pendahuluan

Bagaikan dua sisi mata uang yang berbeda, itulah analogi yang tepat untuk menggambarkan kondisi perpustakaan di negeri ini. Di satu sisi ada perpustakaan yang telah maju pesat dan mampu menjelma sebagai perpustakaan yang diperhitungkan. Di sisi lain ada perpustakaan yang kondisinya memprihatinkan karena berbagai keterbatasan. Dengan demikian terjadi ketimpangan dalam pengembangan perpustakaan di Indonesia.

Perpustakaan yang maju dan dapat menjadi perpustakaan yang diharapkan masyarakat antara lain adalah perpustakaan yang mampu mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan perpustakaan. Hal ini akan

memungkinkan perpustakaan untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada pemakai... Optimalisasi eksistensi teknologi informasi dan komunikasi terlihat dari implementasi otomasi serta pembangunan perpustakaan digital. Otomasi perpustakaan memungkinkan perpustakaan melakukan pelayanan secara otomatis dengan komputer sehingga pelayanan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan benar. Sedangkan digitalisasi perpustakaan memungkinkan koleksi perpustakaan dapat diakses oleh pengguna tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Konsep perpustakaan seperti ini tentu akan semakin memanjakan pemustaka dalam mengakses layanan perpustakaan.

Namun demikian di sisi lain masih banyak perpustakaan yang kondisinya memprihatinkan. Perpustakaan ini biasanya kurang mendapat perhatian serius. Pengolahan koleksi, layanan peminjaman, dan pengembalian koleksi pada perpustakaan yang termasuk dalam kategori ini pada umumnya dilakukan secara manual. Dengan layanan manual ini perpustakaan tidak mampu memberikan layanan yang cepat.

Salah satu penyebab tidak semua perpustakaan mampu melakukan otomasi adalah harga perangkat lunak yang mencapai angka jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Bahkan sering terjadi bahwa harga perangkat lunak ini lebih mahal dari pada harga perangkat keras.

Di tengah mahalnnya harga perangkat lunak untuk membangun otomasi dan perpustakaan digital, maka bagi perpustakaan yang tidak mampu menjangkau perangkat lunak komersil dapat menggunakan perangkat lunak gratis sebagai alternatif. Sebab . saat ini banyak perangkat lunak gratis yang dapat digunakan oleh perpustakaan baik untuk otomasi perpustakaan maupun untuk membangun perpustakaan digital.

Sayang, tidak semua pengelola perpustakaan mengerti tentang keberadaan perangkat lunak gratis ini. Padahal seiring dengan semakin terjangkaunya harga perangkat keras, perangkat lunak gratis dapat menjadi alternatif sebagai pengganti perangkat lunak komersil. Keberadaan perangkat lunak ini semakin membuka peluang bagi perpustakaan untuk melakukan otomasi perpustakaan atau membangun perpustakaan digital.

Untuk memberikan pengetahuan tentang perangkat lunak gratis yang dapat digunakan perpustakaan, penulis mencoba memaparkan dalam tulisan ini. Semoga tulisan ini mampu memberikan pengetahuan tentang perangkat lunak gratis yang dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan serta menyadarkan pengelola perpustakaan bahwa membangun otomasi dan perpustakaan digital bukanlah pekerjaan yang sulit dan mahal.

Perangkat Lunak Gratis Sebagai Peluang

Implementasi otomasi dan pembangunan perpustakaan digital diperlukan sedikitnya dua komponen utama. Komponen tersebut adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Jika kedua komponen ini tidak terpenuhi maka otomasi dan digitalisasi perpustakaan hanyalah sebuah konsep.

Selama ini membangun perpustakaan digital atau otomasi perpustakaan dianggap merupakan program yang mahal. Otomasi atau pembangunan perpustakaan digital menjadi program yang mahal karena perpustakaan harus menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak sekaligus. Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan inilah yang menyebabkan tidak semua perpustakaan di Tanah Air mampu melakukan otomasi perpustakaan atau membangun perpustakaan digital.

Akan tetapi, saat ini muncul harapan bagi seluruh perpustakaan di Tanah Air untuk melakukan otomasi atau membangun perpustakaan digital. Harapan ini muncul di saat harga perangkat keras yang makin terjangkau oleh perpustakaan serta tersedianya perangkat lunak gratis yang dapat digunakan perpustakaan. Saat ini harga perangkat keras semakin terjangkau, komputer dan perangkat keras lainnya bukan lagi barang mewah bagi masyarakat Indonesia. Selain itu tersedianya berbagai aplikasi software yang dapat digunakan

secara gratis semakin membuka peluang perpustakaan untuk melakukan otomasi perpustakaan dan membangun perpustakaan digital.

Dengan semakin terjangkaunya harga perangkat keras dan tersedianya perangkat lunak gratis maka biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka otomasi perpustakaan menjadi semakin murah. Pengelola perpustakaan cukup menyiapkan anggaran pengadaan perangkat keras karena perangkat lunak dapat diperoleh secara gratis. Saat ini modal utama untuk membangun otomasi perpustakaan hanyalah perangkat keras. Pengelola perpustakaan tidak akan dipusingkan dengan masalah harga perangkat lunak otomasi.

Eksistensi perangkat lunak gratis semakin membuka peluang bagi perpustakaan di Indonesia untuk melakukan otomasi. Bagi perpustakaan yang tidak memiliki keterbatasan anggaran, maka dapat memanfaatkan perangkat lunak gratis ini.

Berdasarkan sifat dan karakteristiknya, perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis oleh perpustakaan setidaknya dapat dibedakan menjadi dua kategori. Kategori yang pertama yaitu perangkat lunak yang masuk dalam kategori *open source*. Sedangkan kategori yang kedua yaitu perangkat lunak yang termasuk dalam kategori *freeware*.

Perangkat lunak gratis yang termasuk dalam

kategori *open source* secara harfiah dapat dipahami sebagai perangkat lunak berbasis *open source* yang dapat diperoleh dan digunakan secara gratis oleh perpustakaan. Sedangkan definisi dari perangkat lunak berbasis *open source* sendiri adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna memperoleh perangkat lunak lengkap dengan *source code* perangkat lunak tersebut sehingga memungkinkan pengguna memodifikasi *source code* sesuai dengan kebutuhan. Jika pengguna dapat memodifikasi *source code* perangkat lunak berarti pengguna dapat memodifikasi perangkat lunak tersebut sesuai kebutuhan. Dengan demikian perangkat lunak gratis yang termasuk dalam kategori *open source* dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan perpustakaan.

Berbeda dengan perangkat lunak yang termasuk dalam kategori *open source*, perangkat lunak *freeware* adalah perangkat lunak yang dapat diperoleh secara gratis tanpa disertai *source code* perangkat lunak dan walaupun *source code* diberikan, pengguna tidak memiliki kekuatan legal untuk mengubah atau mendistribusikan kembali *source code* perangkat lunak (Pendit, 2007; 1997). Karena *source code* pada jenis perangkat lunak ini tidak dapat diperoleh oleh pengguna. Oleh karena itu pengguna tidak memiliki peluang untuk memodifikasi perangkat lunak.

Perangkat lunak yang dapat digunakan secara

gratis oleh perpustakaan ada yang *freeware*. Pengelola perpustakaan hendaknya mampu memilih jenis perangkat lunak yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan perangkat lunak gratis *open source* atau *freeware*.

Perangkat Lunak Gratis untuk Otomasi Perpustakaan

Definisi otomasi perpustakaan adalah pemanfaatan mesin, komputer, dan peralatan elektronik lainnya untuk memperlancar tugas-tugas perpustakaan (Lasa HS, 1998). Definisi yang sama tentang otomasi perpustakaan juga diungkapkan oleh Kumorotomo dan Subandono (1999), menurut mereka otomasi perpustakaan adalah pemanfaatan komputer untuk pengelolaan aktivitas perpustakaan yang menyangkut pengadaan bahan pustaka, pengolahan, dan pelayanan.

Berdasarkan dua definisi di atas maka otomasi perpustakaan tidak hanya sebatas memanfaatkan komputer dalam kegiatan administrasi perpustakaan atau pemanfaatan komputer untuk membangun database koleksi perpustakaan. Selama ini pengelola perpustakaan sering beranggapan bahwa apabila perpustakaan telah menggunakan komputer dalam kegiatan administrasi perpustakaan atau telah memiliki database koleksi perpustakaan yang dapat diakses melalui OPAC (Online Public Access Catalog) atau

katalog komputer maka perpustakaan tersebut telah terotomasi. Otomasi bukan hanya pemanfaatan komputer dalam kegiatan administrasi perpustakaan atau memanfaatkan komputer untuk membangun database koleksi perpustakaan. Otomasi perpustakaan mencakup pemanfaatan komputer dalam seluruh kegiatan perpustakaan seperti pengadaan bahan pustaka, pengolahan, pelayanan, penelusuran, dan penyusunan laporan.

Untuk melakukan otomasi diperlukan perangkat lunak otomasi perpustakaan. Perangkat lunak ini dapat diperoleh dengan cara membeli atau menggunakan perangkat lunak gratis. Ternyata tidak semua perpustakaan mampu membeli perangkat lunak ini karena harganya yang cukup mahal. Apalagi bagi perpustakaan yang memiliki keterbatasan anggaran.. Mahalnya harga perangkat lunak otomasi inilah yang menyebabkan banyak perpustakaan yang tidak mampu melakukan otomasi perpustakaan.

Sebagai alternatif, agar perpustakaan mampu melakukan otomasi perpustakaan, pengelola perpustakaan dapat menggunakan perangkat lunak gratis. Perangkat lunak gratis tersebut ada yang bersifat *open source* atau bersifat *freeware*. Perangkat lunak gratis bersifat *open source* yang dapat digunakan perpustakaan untuk membangun otomasi perpustakaan antara lain OpenBiblio(<http://obiblio>.

sourceforge.net), Koha(www.kora.org), emilda (www.emilda.org, PhpMyLibrary(www.phpmylibrary.org, Otonomigen.X (www.krmg.itb.ac.id), X-igloo-(http://sourceforge.net/projects/iglooyha/) dan Senayan. Software tersebut saat ini sedang hangat diperbincangkan karena perangkat lunak ini memiliki fasilitas yang lengkap sebagai sebuah perangkat lunak berbasis *open source* (www.senayan.diknas.go.id). Sedangkan perangkat lunak gratis yang bersifat *freeware* adalah Athenaum Light dan perangkat lunak ini yang paling banyak digunakan oleh perpustakaan di Indonesia.

Dari Berbagai Aplikasi di atas OpenBiblio, Koha, Emilda, PhpMyLibrary dan Atheneum Light adalah perangkat lunak gratis buatan luar negeri. Sedangkan Otomigen-X, X-igloo dan Senayan adalah perangkat lunak gratis buah karya putra-putri Indonesia.

Berbagai perangkat lunak yang telah disebutkan di atas adalah sedikit contoh dari perangkat lunak gratis yang dapat digunakan perpustakaan untuk membangun otomasi perpustakaan secara gratis. Jika ingin melihat perangkat lunak gratis lainnya yang dapat digunakan secara gratis dapat dilihat di situs www.sourceforge.net. Di dalam situs ini terkumpul banyak perangkat lunak berbasis *open source* untuk perpustakaan, apakah itu perpustakaan untuk membangun oto-

masi perpustakaan atau untuk membangun perpustakaan digital.

Perangkat Lunak Gratis untuk Perpustakaan Digital

Secara sederhana perpustakaan digital dapat dipahami sebagai perpustakaan yang menghimpun koleksi dalam format digital (koleksi digital). Koleksi digital ini dapat berupa file-file komputer dalam format .doc, xls, pdf, audio, jpg, png dan masih banyak lagi format file lainnya. Dengan koleksi dalam format digital ini memungkinkan pengguna mengakses koleksi perpustakaan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.

Menghimpun koleksi digital ini dapat dilakukan dengan menelusur informasi digital di Internet kemudian mengunduhnya dan menjadikannya sebagai koleksi perpustakaan atau dengan cara mendigitalkan koleksi perpustakaan. Cara yang kedua inilah cara yang membutuhkan energi serta dana yang besar.

Setelah perpustakaan memiliki koleksi digital maka perpustakaan perlu menyajikan koleksi tersebut dengan sistem layanan tertentu sehingga koleksi tersebut mudah diakses. Caranya adalah dengan menggunakan perangkat lunak perpustakaan digital. Perangkat lunak perpustakaan digital memungkinkan pengguna menelusur koleksi digital yang dimiliki perpustakaan sekaligus meng-

akses koleksi digital tersebut langsung dari perangkat lunak tersebut.

Untuk membangun perpustakaan digital tidak perlu menganggarkan dana pembelian perangkat lunak. Perpustakaan dapat menggunakan perangkat lunak secara gratis. Perangkat lunak yang dimaksud antara lain adalah Ganesha Digital Library (GDL) atau Greenstone Digital Library. Kedua perangkat lunak perpustakaan digital ini termasuk dalam kategori perangkat lunak berbasis *open source*. GDL dapat diperoleh dengan cara mengunduh pada web KMRG ITB di www.kmrg.itb.ac.id. dan greenstone dapat diperoleh dengan mengunduhnya di www.greenstone.org.

Kini telah banyak perpustakaan yang telah menggunakan kedua perangkat lunak ini untuk membangun perpustakaan digital. Akan tetapi diantara kedua perangkat lunak ini GDL adalah perangkat lunak perpustakaan digital yang paling banyak digunakan di Indonesia.

Penutup

Pada paparan di atas telah disebutkan banyak perangkat lunak gratis yang dapat digunakan perpustakaan. Perangkat lunak gratis tersebut dapat digunakan untuk melakukan otomasi atau pembangunan perpustakaan digital.

Jika melihat begitu banyaknya tersedia perangkat lunak gratis untuk membangun otomasi

perpustakaan maka tidak ada lagi alasan untuk menunda otomasi perpustakaan atau pembangunan perpustakaan digital. Pengelola perpustakaan tidak dapat lagi mengkambing hitamkan ketidaktersediaan perangkat lunak sebagai penyebab kegagalan otomasi perpustakaan atau pembangunan perpustakaan digital. Saat ini yang diperlukan adalah motivasi pengelola perpustakaan untuk belajar menggunakan berbagai perangkat lunak gratis.

Perpustakaan tidak perlu takut menggunakan perangkat lunak gratis. Memang pihak pengembang tidak memberikan garansi atas penggunaan perangkat lunak tersebut, sehingga apabila di dalam perangkat lunak terdapat *bugs* (kelemahan atau kekurangan) semua menjadi resiko pengguna. Namun demikian, setiap perangkat lunak gratis memiliki forum atau *mailing list* pengguna. Melalui *mailing list* atau forum pengguna para pengguna perangkat lunak gratis saling bertukar pengalaman, berbagi ilmu dan mencoba untuk menyempurnakan perangkat lunak jika di dalam perangkat lunak tersebut terdapat *bugs*.

Banyak *mailing list* yang dapat digunakan sebagai sarana belajar memanfaatkan perangkat lunak gratis. Saat ini ada *toolib*, *ics-isis*, *the-ics* dan *idln* yang merupakan *mailing list* di bidang perpustakaan yang akan membantu jika saat menggunakan perangkat lunak ini perpustakaan mengalami masalah. Bahkan perangkat lunak Senayan

menyediakan forum khusus yang membahas tentang *bugs-bugs* yang ada di dalam senayan. Semua masalah akan dipecahkan secara bersama melalui *mailing list* ini.

Eksistensi perangkat lunak ini dapat dijadikan sebagai awal kebangkitan perpustakaan di Indonesia. Bangkit di tengah keterpurukan karena tidak tersedianya dana bagi pengembangan perpustakaan. Jika seluruh perpustakaan di Indonesia mampu memanfaatkan eksistensi perangkat lunak gratis maka seluruh perpustakaan akan mampu menjadi perpustakaan impian pemustaka. Apabila ini terwujud maka perpustakaan tidak akan dipandang sebelah mata.

Semoga dengan momentum peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional dan semakin populer-nya perangkat lunak gratis kondisi perpustakaan di negeri ini mulai berubah. Perubahan menjelma sebagai institusi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Anctil, Eric dan Jamshid Beheshti. 2004. "Open source Integrated Library Systems: An Overview". Dalam <http://www.anctil.org/users/eric/oss4ils.html>, tanggal 1 Maret 2007, Pukul 08.00

- Kumoroto, Wahyudi dan Subandono Agus Margono .1999. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-organisasi Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Hakim, Heri Abi Burachman.. *Evaluasi Kualitas OpenBiblio Sebagai Perangkat Lunak Otomasi Perpustakaan Berbasis Open source*. *Fihris*, II (1), 2007
- Lasa Hs. 1998. *Kamus Istilah Perpustakaan*. Yogyakarta, Kanisius
- _____.2005. *Manajemen Perpustakaan*. Yogyakarta, Gama Media.
- Pendit, Laxman Putu dkk. 2007. *Perpustakaan Digital: Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia*. Yogyakarta, Sagung Seto.
- Purwoko; Hakim, Heri Abi Burachman; dan Arif Surachman. *Kajian Awal Aplikasi Open source untuk Otomasi Perpustakaan: Studi Kasus X-igloo, OpenBiblio, Weblis, PhpMyLibrary*. *Fihris*, I (1) 2006
- Vimal Kumar V. 2007. "Selection and Management of Open source Software in Libraries". Dalam <http://eprints.relis.org>. tanggal 3 Maret 2007, Pukul 10.00.
- Wahono, Romi Satria. 2006. "Teknologi Informasi untuk Perpustakaan: Perpustakaan Digital dan Sistem Otomasi Perpustakaan". Dalam www.ilmukomputer.com tanggal 27 Februari 2007, Pukul 09.00.

Memahami Perilaku Pengguna

Oleh: Pergola Irianti

Pendahuluan

Komunikasi antargenerasi sejak tahun 1908 sampai saat ini masih berlangsung dengan baik. Hal ini ditandai dengan masih diingatnya peristiwa satu abad yang lalu, yakni kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional merupakan momen untuk mengenang didirikannya Boedi Oetomo tanggal 20 Mei 1908. Pendirian tersebut dimaksudkan untuk membangkitkan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme bangsa Indonesia untuk melawan penjajah.

Semangat tersebut telah membawa kemajuan bangsa sampai era teknologi informasi ini. Beraneka ragamnya teknologi canggih saat ini telah membawa perubahan pada manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok (masyarakat).

Kondisi ini berpengaruh pada tuntutan masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya termasuk tuntutan terhadap kondisi perpustakaan. Untuk itu perpustakaan harus melakukan perubahan apabila tidak ingin ditinggalkan pemustakanya.

Dengan perubahan tersebut, perpustakaan diharapkan tetap eksis dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat dalam rangka ikut serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, perpustakaan harus menerapkan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan. Pemanfaatan teknologi informasi di perpustakaan akan mampu menangani sebagian besar pekerjaan teknis perpustakaan. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya manusia perpustakaan dalam pekerjaan teknis lambat laun akan berkurang.

Perubahan paradigma perpustakaan

Perubahan paradigma perpustakaan bertujuan untuk mengadaptasi gejolak perubahan eksternal dan pemanfaatan peluang. Hal ini menyebabkan perubahan sistem layanan jasa perpustakaan dan informasi jauh lebih luas daripada sekedar layanan pinjam buku, layanan referensi, layanan penelusuran dan lainnya. Menurut Buckland (1988) layanan tersebut berubah dari layanan perpustakaan menjadi layanan informasi. Hal ini berakibat pada derasnya arus kebutuhan

terhadap informasi yang baru pula. Oleh karena itu dengan perubahan paradigma perpustakaan itu, perpustakaan diharapkan memberikan layanan prima. Yakni bentuk layanan yang berorientasi pada pengguna.

Dikemukakan oleh Mustafa (1998) bahwa pada era teknologi informasi akan membawa perubahan paradigma layanan perpustakaan. Akibat perubahan paradigma tersebut antara lain; 1) prestasi perpustakaan bukan lagi diukur berdasarkan kekayaan koleksi dan jumlah pengunjung ke perpustakaan, melainkan dari jumlah orang yang menggunakan layanan, meskipun mereka tidak datang secara fisik ke perpustakaan; 2) penyediaan fasilitas perpustakaan berteknologi tinggi, harus lebih mengarahkan pustakawan pada penyediaan muatan informasi yang dapat disajikan kepada pengguna. Dalam hal ini pustakawan harus mengubah sikap dan budaya kerja yang menuntut kerja cepat, tepat, dan efisien.

Berkaitan dengan pelayanan ini, menurut Mustafa (1998), ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan agar memiliki citra yang lebih positif. Kompetensi itu antara lain: berorientasi pada kebutuhan pemustaka, memiliki kemampuan-kemampuan; berkomunikasi dengan baik, berbahasa asing yang memadai, pengembangan secara teknis dan prosedur kerja, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi,

dan melaksanakan penelitian bidang perpustakaan.

Pemegang kendali perpustakaan dengan paradigma baru tersebut, sepenuhnya tetap ada pada para pustakawan. Pustakawan sebagai individu memiliki keunikan dalam bertindak atau bertingkah laku. Keunikan tersebut sering tidak disadari oleh pustakawan dalam melaksanakan tugasnya. Terkait dengan masalah kepuasan pengguna terhadap layanan perpustakaan ini pernah dilakukan penelitian. Handayani, dkk. (2004) dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa dari lima dimensi (indikator) kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan, ada dua dimensi yang tidak sesuai dengan harapan pengguna. Kedua dimensi tersebut adalah ketanggapan dan jaminan yang meliputi: kesediaan pustakawan membantu pemustaka menemukan informasi, ketanggapan pustakawan terhadap masalah yang disampaikan oleh pengguna, sikap ramah pustakawan, dan komunikasi pustakawan dengan pemustaka. Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan agar pustakawan diberikan pelatihan terkait dengan cara berkomunikasi dan etika layanan.

Penelitian Supriadi, dkk. (2004) menyimpulkan bahwa perhatian pustakawan dalam melayani pemustaka perlu lebih ramah dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu disarankan agar pustakawan yang bertugas di bidang layanan

perlu ditambah wawasan mengenai konsep layanan yang berorientasi pemustaka/*user oriented*

Berbeda dengan kedua penelitian di atas, Widodo (2005) melakukan penelitian mengenai kepuasan petugas perpustakaan yang terkait dengan intensi prososial. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara intensi prososial dengan kepuasan kerja pustakawan, dimana semakin tinggi intensi prososial akan semakin tinggi pula kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa apabila perilaku prososial pustakawan terhadap pemustaka lebih sering dilakukan, maka kepuasan kerjanya meningkat dan kepuasan pengguna menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas ada dua hal penting bagi pustakawan untuk mengubah sikap dan mampu berperilaku sebagai pustakawan profesional, sehingga citra positif menjadi label pustakawan masa kini. Kemampuan berkomunikasi dengan baik, kesediaan membantu menemukan informasi, tanggap terhadap masalah yang disampaikan pengguna, bersikap ramah, memiliki sikap prososial yang tinggi merupakan sebagian dari bentuk-bentuk perilaku yang dapat dilakukan oleh pustakawan dalam berinteraksi dengan pemustaka. Pengetahuan perilaku manusia pada umumnya dibahas secara lengkap dalam ilmu Psikologi.

Psikologi di perpustakaan

Pengertian psikologi menurut Crow & Crow (Djamarah, 2002) adalah ilmu yang mempelajari dan berusaha memahami tingkah laku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, serta memahami bagaimana manusia berpikir dan berperasaan.

Secara umum beberapa definisi psikologi juga dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain Mussen dan Rosenzweig, Woodworth dan Marquis, serta Morgan (Septiyantono, 2003) yang menyimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti dan mengkaji tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan dan interaksi antarmanusia.

Terkait dengan tugas perpustakaan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, Sugiarto (1999) menjelaskan bahwa dimensi kualitas layanan terdiri atas: (1) tanggung jawab/*responsibility*, yakni tanggung jawab yang mencakup kecepatan dan ketepatan dalam memberikan layanan serta keakuratan dalam memberikan informasi, (2) kepekaan /*responsiveness*, yaitu kepekaan terhadap kebutuhan pengguna yang diiringi dengan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan tersebut, (3) kepastian layanan /*assurance*, yaitu bentuk layanan langsung dalam membantu pemustaka, yang didukung dengan pengetahuan dan keterampilan, (4) empati, merupakan kemampuan untuk

memahami dan memperhatikan kondisi psikologis pemustaka, yang dalam hal ini diperlukan upaya untuk memberikan kenyamanan kepada pemustaka. Diungkapkan pula oleh Sugiarto (1999) bahwa layanan yang baik adalah layanan yang sangat memperhatikan individu sebagai pribadi yang unik dan menarik. Untuk itu layanan yang baik harus disesuaikan dengan konsep pribadi yang meliputi unsur-unsur kepribadian, penampilan, perilaku dan komunikasi, yaitu ramah, sopan dan penuh hormat, yakin, rapi, ceria, senang memaafkan, senang bergaul, senang belajar dari orang lain, senang pada kewajaran dan menyenangkan orang lain.

1. Perilaku pemustaka

Pada uraian sebelumnya dikemukakan bahwa layanan perpustakaan pada era teknologi informasi, didominasi oleh media internet. Meskipun demikian penulis yakin bahwa masih ada pemustaka yang menyempatkan diri untuk berkunjung secara fisik ke perpustakaan. Dalam kondisi ini pustakawan perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai agar mampu memberikan layanan prima kepada pemustaka.

Dalam komunikasi dengan pemustaka, pustakawan perlu mempelajari seluk beluk perilaku pengguna sebagai wujud dari seluruh aktivitas jiwa manusia itu sendiri. Agar pustakawan berhasil menganalisis perilaku pemustaka, perlu dipikirkan

sebelumnya: siapa pemustaka dan apa yang menjadi kebutuhan mereka, serta kapan dibutuhkan?

Menurut Mangkunegara (2005), perilaku pemustaka adalah tindakan yang dilakukan individu, kelompok, atau organisasi terkait dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa yang dibutuhkan yang dapat dipengaruhi lingkungan. Kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari perilaku pemustaka. Apabila kebutuhannya tidak terpenuhi akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya jika kebutuhannya terpenuhi, pemustaka akan memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi rasa puasnya.

Dalam memberikan layanan, pustakawan harus mampu mengangkat dan melindungi harga diri pemustaka tanpa terhalang oleh penampilannya. Pustakawan perlu menciptakan hubungan baik dan selalu bersikap proaktif, memberikan sambutan lebih dahulu, menawarkan bantuan apa yang dapat dilakukannya, dan mampu memberikan perasaan nyaman pemustaka sebelum memperoleh apa yang mereka butuhkan.

Menurut Septiyantono (2003) ada berbagai sifat dan karakter pemustaka yang perlu dipahami agar pustakawan dapat menghadapinya dengan baik. Berikut ini beberapa karakter dan cara menghadapi pemustaka: (a) pendiam dapat dihadapi dengan penyambutan secara ramah untuk menarik

perhatiannya, (b) tidak sabar, dapat mengemukakan bantuan kita secara maksimal dan secepat mungkin, (c) banyak bicara dengan menawarkan bantuan dan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang ditawarkan dengan penjelasannya, (d) banyak permintaan, dengarkan dan segera penuhi permintaannya serta minta maaf dan memberi alternatif lain apabila permintaan tidak tersedia, (e) peragu, dengan memberi kepercayaan, tenang, dan tidak memberikan banyak pilihan namun mengikuti selernya, (f) senang membantah harus dihadapi dengan tenang, dan jangan pernah terpancing untuk berdebat, (g) lugu dihadapi dengan menerima apa adanya, menanyakan keperluannya dan melayani berdasarkan permintaan, (h) siap mental, dihadapi dengan membiarkannya memilih yang dikehendaki, tanpa banyak bertanya, memuji pemakai dan ucapkan terimakasih atas kunjungannya, (i) yang curiga dihadapi dengan memberikan jaminan yang baik dan jangan tunjukkan sikap seolah-olah petugas lebih unggul, (j) yang sombong hadapi dengan tenang, sabar menghadapi sikapnya dan tidak terlalu serius, serta berikan kesan bahwa pemustaka tersebut perlu dihormati.

2. Perilaku pustakawan

Sebagai sosok yang memberikan layanan kepada pemustaka, pustakawan diharapkan

memiliki kepribadian yang baik agar mampu memberikan layanan terbaik. Kepribadian menurut Heldebrand (Septiyantono, 2003) adalah sesuatu hal yang baik atau tidak baik dalam hal kelazimannya dan direspon secara positif atau negatif oleh mereka yang melakukan kontak.

Menurut Stern (Septiyantono, 2003), potensi yang dimiliki oleh seseorang dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Demikian halnya dengan pustakawan layanan, diharapkan mampu mengembangkan kepribadiannya secara optimal agar mampu mempengaruhi pemustaka untuk selalu menggunakan jasa yang tersedia di perpustakaan.

Menurut Mangkunegara (2005), sebenarnya pustakawan layanan identik dengan pribadi penjual jasa. Berdasarkan falsafah penjual yang dikemukakan Mangkunegara tersebut, yaitu bagaimana menjual dapat memberi kepuasan bagi kedua belah pihak, baik pihak pembeli maupun bagi pihak penjual. Demikian halnya dengan pustakawan layanan, diperlukan upaya layanan yang dapat menimbulkan rasa puas bagi pemustaka maupun bagi dirinya sendiri. Selain perhatian terhadap pemustaka perlu pula dipikirkan bagaimana menciptakan hubungan baik dan berkelanjutan, dengan demikian pustakawan akan memperoleh minimal dua keuntungan yaitu perpustakaan menjadi terkenal dan citra sebagai pustakawan profesional lebih terangkat.

Septiyantono (2003) juga mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan pustakawan dalam memberikan layanan prima, antara lain: (a) mampu berkomunikasi secara verbal maupun non verbal, (b) mampu bekerja secara individual maupun kelompok, (c) mampu berkomunikasi dalam tiga konsep yaitu sikap, perhatian, dan tindakan.

Penutup

Rendahnya kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan dapat disebabkan masih rendahnya pengetahuan pustakawan dalam berinteraksi dengan pemustaka. Hal ini perlu mendapat perhatian para pengelola perpustakaan. Interaksi yang merupakan salah satu bentuk komunikasi antara pustakawan dan pemustaka dengan karakteristik atau pribadi yang berbeda, kadang menimbulkan masalah dalam komunikasi.

Untuk mengatasi keadaan tersebut, perlu kiranya pengelola perpustakaan membekali para pustakawan dengan pelatihan layanan jasa, pelatihan kepribadian dan sebagainya yang intinya lebih meningkatkan kualitas hubungan antar-individu untuk meningkatkan kualitas layanan di perpustakaan.

Daftar Pustaka

- Buckland, Michael K. 1988. *Library and Services in Theory and Content*, 2nd ed. London: Pergamon Press.
- Djamarah, S. B. 2002. *Psikologi Belajar*. Bandung: Rineka Cipta.
- Handayani, R., Keban, Y.T., Ratminto Analisis Kepuasan Pemakai Terhadap Layanan Perpustakaan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Sosiosains*, April, 17 (2) 2004, : 303-317
- Mangkunegara, A.A. A.P. 2005. *Perilaku Konsumen*. Bandung: Refika Aditama.
- Mustafa, B. 1998. Perubahan Paradigma Layanan Perpustakaan Memasuki Era Teknologi Informasi, dalam E. Koswara, dkk., *Dinamika Informasi Dalam Era Global*. Bandung: Pengurus Daerah IPI Jawa Barat dan Remaja Rosdakarya.
- Septiyantono, Tri dkk. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga.
- Sugiarto, E. 1999. *Psikologi Pelayanan Dalam Industri Jasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Supriyadi, Eri; Darwin; dan Moelyono. Analisis Kualitas Layanan Perpustakaan Pada UPT Perpustakaan Universitas Jember. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*”, Volume II, (1) 2004, : 22-31.

Widodo, S.; Moelyono; Isbandiyah.. Hubungan Intensi Prososial Dengan Kepuasan Kerja Pustakawan Universitas Gadjah Mada. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*", Volume II, (2) 2005: 18-24.

Era Kebangkitan Kepustakawanan Indonesia

Oleh: Lasa Hs

Pendahuluan

Perpustakaan sebagai institusi yang bergerak di bidang pendidikan dan kemasyarakatan selalu berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan tingkat perkembangan kecerdasan masyarakat. Perkembangan ini meliputi aspek manajerial, sumber daya manusia, sistem, sarana prasarana, maupun koleksinya.

Semula perpustakaan dikonotasikan sebuah gedung/ruang sebagai tempat buku dengan segala bentuknya ditunggu petugas yang agak judes. Kini pengertian perpustakaan telah berubah menjadi institusi keilmuan yang dikelola secara profesional. Keberadaan perpustakaan dengan tujuan utama untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa . Mereka akan mampu sejajar dengan bangsa lain apabila mampu memanfaatkan perpustakaan dan sumber informasi lain sebagai sumber pendidikan, informasi, penelitian, pelestarian, dan rekreasi kultural. Maka keberadaan perpustakaan yang representatif akan mampu membangkitkan kecerdasan mereka dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan berkehidupan secara individu.

Latar Belakang

Era keterbukaan ini merupakan era yang kondisional kebangkitan kepustakawanan. Hal ini dipengaruhi oleh:

1. Keterbukaan Informasi dan Kemajuan Teknologi.

Era keterbukaan ini merupakan peluang tiap individu untuk menciptakan informasi, mengakses, mengelola, dan mengembangkannya. Dari sinilah seseorang akan eksis dalam kehidupan intelektual dan kemasyarakatan. Sebab mereka mampu membangkitkan dirinya dan membangunkan kesadaran masyarakat dan bangsanya.

2. Perkembangan Ilmu Perpustakaan

Sesuai tuntutan dan peningkatan kebutuhan masyarakat, kini di Indonesia terdapat 24 perguruan tinggi negeri/swasta yang membuka jurusan /program studi/minat bidang perpustakaan sejak

diploma sampai doktor. Perkembangan pendidikan kepastakawanan ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat pada bidang tersebut. Di samping itu meningkatnya pendidikan kepastakawanan berarti mulai tumbuh kesadaran masyarakat akan sumber belajar yang berupa perpustakaan yang representatif.

3. Perkembangan Profesi Pustakawan

Memang profesi pustakawan relatif baru di negeri ini. Wajar apabila sebagian masyarakat belum mengenalnya dan belum mengakui eksistensi pustakawan. Pustakawan kini sebagai tenaga kependidikan, fungsional, dan tenaga profesi. Dalam hal ini Pemerintah tengah mengembangkan profesi ini antara lain keluarnya beberapa peraturan dan perundangan tentang perpustakaan dan kepastakawanan misalnya SK Menpan No. 132/2002 yang saat ini dalam proses revisi karena dianggap kurang mengadopsi perkembangan kegiatan kepastakawanan. Sebagai pedoman pelaksanaan keputusan tersebut kini Perpustakaan Nasional telah menerbitkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 merupakan pedoman kuat dalam pengembangan perpustakaan dan pustakawan di Indonesia. Di samping itu sebagai tindak lanjut

dan realisasi undang-undang tersebut, kini sedang disusun standarisasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan.

Beberapa peraturan perundangan lain merupakan peluang pengembangan perpustakaan, ilmu perpustakaan, dan profesi pustakawan. Peraturan dan perundangan itu antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional RI, Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Fungsional Pustakawan, dan lainnya

4. Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Pemerintah dan masyarakat menyadari pentingnya pendidikan dalam kehidupan berbangsa. Kemajuan bangsa antara lain dapat diukur dari kualitas pendidikannya. Dalam hal ini Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain perbaikan sarana prasarana, sertifikasi guru, maupun peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 % dari APBN mulai anggaran 2009.

Tujuan

Kepustakawanan merupakan sumber daya

yang mampu menggerakkan bidang lain. Sumber ilmu pengetahuan ini berperan strategis dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan formal dan nonformal. Pengembangan ini dengan tujuan:

1. Mengembangkan Berbagai Bidang

Dalam usaha mengembangkan berbagai bidang diperlukan ilmu pengetahuan dan informasi terkait. Bahkan cepat atau lambat suatu bidang dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan dalam bidang itu sendiri

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Dalam berbagai survei dan penelitian ditunjukkan bahwa sumber daya manusia kita menduduki posisi bawah di tingkat dunia bahkan di tingkat ASEAN. Hal ini tentu saja dipengaruhi rendahnya kualitas pendidikan kita. Selama ini pendidikan kita masih berorientasi pada NEM, IP, dan gelar dengan mengabaikan penguasaan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan wawasan. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan serius tentang sumber informasi yang bernama perpustakaan.

3. Mengembangkan profesi Pustakawan

Memang profesi pustakawan relatif baru di negeri ini. Maka wajar apabila sebagian masyarakat belum mengenalnya dan belum mengakui eksistensi pustakawan. Pustakawan kini sebagai profesi, fungsional, dan tenaga kependidikan akan eksis atau tidak tergantung upaya pustakawan itu sendiri dan lembaga/organisasi terkait. Dalam hal

ini Pemerintah melalui Perpustakaan Nasional RI telah dan sedang mengembangkan profesi ini. Bukti-bukti empiris langkah-langkah tersebut antara lain pengakuan pustakawan sebagai fungsional dengan terbitnya SK Menpan berturut-turut Nomor 18 Tahun 1988, Nomor 33 Tahun 1998, dan Nomor 132 Tahun 2002. Kini SK Menpan tersebut dalam proses revisi. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan merupakan pedoman dan standar yang kuat dalam pengembangan perpustakaan dan pustakawan di Indonesia.

Dalam rangka peningkatan kualitas perpustakaan dan pustakawan, maka kini sedang disusun standarisasi perpustakaan (perguruan tinggi, khusus, sekolah, dan umum) dan sertifikasi pustakawan.

Kepustakawanan dalam Pusaran Sejarah

Istilah keustakawanan secara formal di negeri ini muncul pada SK MENPAN Nomor 33 Tahun 1998 dan SK MENPAN Nomor 132 Tahun 2002. Dalam SK MENPAN Nomor 33 Tahun 1998 keustakawanan diartikan sebagai ilmu dan profesi di bidang pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Kemudian dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008 disebutkan bahwa kepus-

takawanan adalah ilmu dan/atau profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

Kepustakawanan telah berkembang lama di Amerika antara lain ditemukannya Sistem Klasifikasi Persepuluhan Dewey/*Dewey Decimal Classification/DDC* oleh Melville Louis Kossuth Dewey pada tahun 1876. Kemudian pada tanggal 6 Oktober 1876 di Philadelphia lahir organisasi kepustakawanan American Library Association/ALA. ALA merupakan organisasi kepustakawanan terbesar dan tertua di dunia itu besar pengaruhnya terhadap pengembangan ilmu perpustakaan, perpustakaan, dan profesi pustakawan (Feather and Sturger, 2003 dalam Lasa Hs, 2006).

Sesuai perkembangan intelektual manusia, maka perkembangan-perpustakaan semakin luas. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa perpustakaan telah berkembang Sebelum Masehi di Mesir, Persia, dan Cina. Misalnya saja Raja Ashurbanipal (668 - 631 SM) telah membangun perpustakaan dan memiliki koleksi lebih dari 20.000 *clay tablet*. Dalam pengelolaannya tentu saja diperlukan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Pengembangan kepustakawanan semakin menunjukkan eksistensinya antara lain dengan ditemukannya teori katalogisasi oleh Antonio Panizi (Itali) pada tahun 1841 M yang ditulisnya dalam buku *Rules for Compiling of the Catalogue*.

Kemudian sistem Klasifikasi Persepuluhan Universal/*Universal Decimal Classification* diciptakan oleh Paul Otlet dan Henri La Fontaine (Belgia) pada tahun 1889.

Pengetahuan tentang perpustakaan dan informasi semakin kokoh dengan ditemukannya *Five Laws of Library Science* oleh Shiyali Ramamrita Ranganathan seorang pustakawan India. Dalam filosofi tersebut, kepustakawanan bukan sekedar pelayanan informasi, tetapi lebih menekankan kajian-kajian tentang informasi dan aspek-aspeknya. Prinsip pertama hukum perpustakaan tersebut adalah *books are for use* dimaksudkan bahwa rekaman ilmu pengetahuan dan informasi itu harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Sumber-sumber informasi yang tidak dimanfaatkan berarti kemubadziran. Hal ini berarti bahwa semua hal yang mendukung penyebaran dan pengembangan informasi menjadi tanggung jawab perpustakaan. Prinsip kedua *every reader his book*, berarti bahwa tiap pemustaka bahkan setiap individu memiliki hak untuk memperoleh, mengelola, menyebarkan, dan mengembangkan informasi. Oleh karena itu pustakawan harus pandai-pandai mempromosikan informasi kepada masyarakat pada umumnya. Maka disinilah makna bahwa informasi itu menjadi komoditi masyarakat. Prinsip ketiga *every book its reader*, berarti bahwa informasi dan ilmu

pengetahuan itu untuk semua orang tanpa membedakan ras, suku, agama, maupun aliran politik. Prinsip ini memberikan peluang dalam penyebaran informasi seluas-luasnya. Prinsip keempat adalah *save the time of the reader*. Hal ini berarti bahwa siapa yang cepat memperoleh informasi, maka mereka dapat memanfaatkannya/waktu secara efisien dan efektif untuk melakukan aktivitas. Apalagi akses informasi ini didukung teknologi informasi yang akan mempermudah dan mempercepat kegiatan tersebut. Prinsip kelima adalah *a library is a growing organism*. Hal ini berarti bahwa sumber informasi selalu tumbuh dan berkembang. Perkembangan ini menuntut adanya layanan informasi yang lebih efektif dan efisien.

Penemuan Shiyali Ramamrita Ranganathan ini mendorong adanya kajian-kajian kepastakawanan dan dari sinilah lahir teori *conspectus*, bibliometrika, *scientrometrics*, dan informatika. Kemudian kajian utama informatika ini meliputi hukum bibliometrika klasik, analisis sitasi dan *co-citation*, indikator ilmiah/*scientific indicators*, pertumbuhan dan perhatian pertumbuhan/*abscelence* dan penggunaan sumber daya (Walfrom, 2000 dalam Pendit, 2003: 21-22).

Indonesia

Kepustakawanan di Indonesia telah dimulai sejak lama dan diduga sejak tahun 400 an saat

lingga berupa batu dengan tulisan Palawa ditemukan dari periode Kutai. Lingga tersebut berisi tulisan tentang raja Kutai (Sulistya-Basuki, 1994: 7). Ini kalau digunakan teori bahwa kepustakawanan adalah ilmu dan profesi di bidang pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Hal ini juga diperkuat keterangan Fa-Hsien seorang musafir yang menyatakan bahwa di kerajaan Ye-poti (Tarumanegara) dijumpai kaum Brahmana yang dalam mengajarkan agama tentunya berdasarkan buku-buku keagamaan.

Kehadiran orang-orang Inggris, Perancis, dan Denmark ke Indonesia tidak memengaruhi kepustakawanan. Mereka ke nusantara ini semata-mata untuk melakukan kegiatan bisnis.

Embrio perpustakaan di Indonesia diduga sudah muncul pada masa kejayaan Majapahit. Saat itu para pujangga telah menulis karya sastra di atas daun lontar, bambu, kulit kayu, atau kulit bambu. Tulisan-tulisan itu berisi doa, mantera, silsilah raja, pelipur lara, dan ajaran kepercayaan yang disimpan di istana raja sebagai koleksi kerajaan.

Mulai tahun 1.000 an sastra Jawa semakin berkembang dan muncullah karya sastra agung oleh para pujangga kraton. Karya sastra yang terkenal saat itu antara lain Arjuna Wiwaha karya Mpu Kanwa, Bharata Yudha karya Mpu Sedah

dan Mpu Panuluh. Kemudian pada abad XIV Mpu Tantular termasyhur dengan karya sastranya (Nurhadi, 1983: 32)

Sementara itu menurut catatan Sulistya-Basuki (1994: 10) bahwa Belanda pada tahun 1624 merencanakan untuk mendirikan perpustakaan gereja di Batavia (sekarang Jakarta). Namun karena berbagai pertimbangan dan kesulitan, baru pada tanggal 27 April 1643 perpustakaan itu berdiri. Lebih satu abad kemudian berdirilah perpustakaan khusus di Batavia pada tanggal 24 April 1778 dengan nama *Bataviasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Perpustakaan ini kemudian mengeluarkan katalog buku pertama di Indonesia pada tahun 1846 dengan judul *Bibliotecae artiumcientiaerumquae Batavia Floret Catalogue Systematicus* hasil suntingan P. Bleeker. Lembaga tersebut dalam perjalanannya berganti nama menjadi *Koninklijk Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* yang pada tahun 1950 lembaga ini menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Lembaga ini pada tahun 1962 diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan berubah nama menjadi Museum Pusat dan saat itu juga telah memiliki beberapa koleksi. Koleksi ini lalu dikenal dengan Perpustakaan Museum Nasional. Dalam perjalanannya kemudian pada tahun 1980 Perpustakaan Museum Nasional ini dilebur ke Pusat Pembinaan Perpustakaan yang pada tahun

1989 dilebur lagi menjadi bagian dari Perpustakaan Nasional RI.

Untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia, Belanda mendirikan beberapa lembaga dan balai di beberapa kota antara lain Lembaga Meteorologi dan Geofisika (1866), Landsarchief (Arsip Nasional) (1892), Biro Pusat Statistik (1925) di Batavia. Kemudian di Bogor berdiri Lembaga Kepustakaan Bibliotheca Bogoriensis (1842), Lembaga Penyakit Hewan (1908), Balai Penyelidikan Pertanian (1918). Kemudian di Bandung didirikan Perpustakaan Negara Pasteur (1890), Balai Hidrologi dan Hidrometri (1914), dan Observatorium Boscha (1920) yang kemudian menjadi Lembaga Astronomi Lembang. Pendirian lembaga-lembaga tersebut juga diikuti pendirian perpustakaan masing-masing yang merupakan awal perkembangan perpustakaan khusus di Indonesia.

Organisasi Kepustakawanan

Dalam pengembangan profesi diperlukan organisasi profesi. Organisasi ini sebagai media penyaluran aspirasi anggota, menyejahterakan anggota, melindungi anggota, dan menjaga kualitas layanan profesi. Organisasi kepustakawanan di Indonesia menurut beberapa catatan didirikan pertama kali pada tahun 1912 di Batavia (sekarang Jakarta) atas saran Dr. H.J. van

Lummel. Beliau adalah seorang guru di HBS Koning Wilhelm di Batavia. Kemudian pada tahun 1916 terbentuklah organisasi Vereniging tot Bevordering van het Bibliothekwenzes (Perkumpulan Untuk Memajukan Ilmu Perpustakaan) yang bertujuan: 1) mendorong berdirinya perpustakaan baru dan membantu perpustakaan rakyat yang telah ada; 2) memajukan usaha sentralisasi perpustakaan; 3) mengusahakan peminjaman antarperpustakaan di Hindia Belanda (Indonesia); 4) memajukan lalu lintas pertukaran dan peminjaman bahan pustaka di dunia internasional; 5) mengumpulkan dan memajukan sumber referensi dan tugas rujukan; 6) mendirikan biro penerangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dokumentasi; 7) mendirikan gedung untuk perpustakaan umum; 8) usaha lain untuk tercapainya tujuan tersebut.

Keanggotaan organisasi ini semula terbatas di Batavia lalu menyebar ke Medan, Surabaya, Tegal, Semarang, Bogor, Bandung, Bondowoso, dan Salatiga. Saat itu tercatat 62 orang anggota dan terbanyak dari perpustakaan khusus. Sampai dengan tahun 1920, organisasi ini tak terdengar kegiatannya dan sejak itu pula sampai pendudukan Jepang praktis tidak ada organisasi kepus-takawanan.

Sejak Indonesia merdeka mulai tumbuh kesadaran untuk mendirikan perpustakaan dan

perlunya wadah untuk mengembangkan ilmu perpustakaan dan mengembangkan kerjasama antarperpustakaan. Maka pada tahun 1949 berdirilah organisasi kepustakawanan Vereniging van Bibliotheca Resen van Indonesie di Jakarta dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu perpustakaan dan kerjasama antarperpustakaan. Kegiatan ini berhenti menjelang tahun 1950. Kemudian pada tahun 1953 di Jakarta berdiri Asosiasi Perpustakaan Indonesia/API, yakni perkumpulan ahli perpustakaan di Yogyakarta dan Bogor dan masih bersifat lokal. Atas anjuran Depdikbud saat itu berlangsung Konferensi Perpustakaan Seluruh Indonesia tanggal 25 - 27 Maret 1954 di Jakarta. Beberapa keputusan konferensi ini antara lain: 1) mendorong berdirinya Perkumpulan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia/PAPSI; 2) perlu adanya pendidikan ahli perpustakaan; 3) perlu adanya Dewan Perpustakaan Nasional; 4) mendirikan perpustakaan umum; 5) kerjasama antarperpustakaan di Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi Asosiasi Perpustakaan Indonesia/API bergabung dengan Perkumpulan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia/PAPSI. Kemudian pada Kongres PAPSI bulan April 1956 diputuskan untuk diperluas dan nama organisasi ini menjadi Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi/

PAPADI. Kongres PAPADI pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 19 - 22 Oktober 1957. Kemudian pada pertemuan antar anggota di Jakarta pada tanggal 12 Juli 1962 dan organisasi ini berubah menjadi Asosiasi Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi/APADI. Sementara itu pada tanggal 5 Desember 1969 di Jakarta terbentuk Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia/HPCI dengan tujuan: 1) membina perkembangan perpustakaan khusus di Indonesia; 2) memupuk hubungan antar anggota.

Kesadaran perlunya organisasi kepustakawanan yang kuat semakin meningkat, maka muncul pemikiran adanya penyatuan beberapa organisasi kepustakawanan yang telah ada. Kemudian terjadilah pertemuan pada tanggal 21 Januari 1973 yang diikuti oleh pengurus APADI Pusat, APADI Cabang Jakarta, Bogor, Bandung, HPCI, dan Himpunan Pustakawan DIY di Bandung. Dalam pertemuan itu disepakati akan menggelar Kongres Pustakawan Se Indonesia pada tanggal 5 - 7 Juli 1973 di Ciawi Bogor. Dari kongres itulah lahir Ikatan Pustakawan Indonesia/IPI dan Drs. Sukarman K. terpilih sebagai ketua, Drs. J.P. Rompas sebagai sekretaris, dan Ny. Yayah Wartomo, SH sebagai bendahara. IPI sebagai organisasi profesi bertujuan: 1) menghimpun, menampung, dan menyalurkan aspirasi mereka yang berprofesi dalam ilmu perpustakaan dan

ilmu pengetahuan lainnya yang berkaitan dan atau bekerja dalam bermacam-macam jenis perpustakaan atau badan-badan lain yang ruang lingkupnya berkaitan dengan perpustakaan; 2) mengusahakan mereka yang termasuk dalam pasal 5 ayat 1 Anggaran Dasar ini pada tempat yang semestinya di dalam masyarakat; 3) meningkatkan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu perpustakaan demi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kesejahteraan masyarakat; 4) menempatkan ilmu pengetahuan lainnya yang berkaitan pada tempat yang semestinya di antara ilmu-ilmu pengetahuan.

Ikatan Pustakawan Indonesia telah berusaha meningkatkan kualitas pustakawan di negeri ini melalui berbagai seminar, pelatihan, kunjungan, dan penerbitan. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh IPI antara lain adanya dikotomi pustakawan negeri dan pustakawan swasta, seleksi anggota, akreditasi pendidikan kepustakawanan, dan peningkatan kualitas pustakawan.

Memang diakui bahwa semula Ikatan Pustakawan Indonesia menjadi wadah bagi seluruh pustakawan Indonesia. Organisasi ini telah melakukan berbagai usaha dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama dengan tugas dari lembaga tempat dimana pustakawan bekerja. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan IPI

selama ini antara lain: 1) upaya penambahan jumlah perpustakaan; 2) memperjuangkan profesi pustakawan sebagai tenaga fungsional; 3) mempromosikan perpustakaan di kalangan masyarakat dan pemerintahan; 4) melakukan kerjasama dengan organisasi terkait dengan profesi pustakawan; 5) memberikan pembinaan terhadap anggota dengan berbagai kegiatan ilmiah; 6) memberikan pembinaan terhadap lembaga pendidikan pustakawan; 7) berperan aktif untuk melahirkan berbagai pedoman dan standar perpustakaan; 8) berperan aktif dalam penyusunan Undang-Undang Perpustakaan; dan 9) aktif dalam berbagai kegiatan nasional, regional, dan internasional dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi (Zulfikar Zen, 2006).

Era reformasi yang puncaknya terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 membawa perubahan besar. Kekuasaan yang dulu cenderung sentralistik dan militerisme berubah menjadi pemerintahan desentralistik dan dunia demokrasi mulai terbuka. Kebebasan pers dan kebebasan mendirikan partai politik terbuka luas, sehingga pada Pemilu 2009 nanti terdapat 38 partai yang siap berlaga. Hal ini juga berpengaruh pada aspek kehidupan individu, masyarakat, dan profesi. Dari iklim inilah lalu lahir beberapa organisasi kepustakawanan antara lain Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia/FPPTI (12 Oktober 2000) di Ciawi

Bogor, Forum Perpustakaan Khusus Indonesia/FPKI (18 Nopember 2000), Forum Perpustakaan Umum Indonesia/FPUI (4 Juni 2002) di Cipayung Bogor, Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia/FPSI (8 Agustus 2002) di Cisarua Bogor, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia/ISIPII (23 Maret 2006), dan Himpunan Pengelola Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah/HIMPUSMA (26 Mei 2007) di kota Yogyakarta yang didirikan oleh Lasa Hs dan kawan-kawan.

Pendidikan Kepustakawanan

Pendidikan kepustakawanan di Indonesia semula berupa kursus yakni Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan (20 Oktober 1952 - 1955) yang diikuti oleh para lulusan SLTA. Kursus yang berlangsung dua tahun itu untuk memenuhi kebutuhan akan ahli-ahli perpustakaan pada semua jenis perpustakaan, sejak perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, sampai pada perpustakaan instansi/khusus. Kursus ini pertama kali dimulai tanggal 20 Oktober 1952 berdasarkan SK Menteri PPK tanggal 8 September 1952 Nomor: 30418/Keb. Kemudian pada tahun 1955 kursus ini disempurnakan menjadi dua setengah tahun dengan pengakuan lulusannya sama dengan lulusan sarjana muda (golongan E II) dan nama

kursus itu diubah menjadi Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan di bawah pengawasan Biro Perpustakaan. Pada tahun 1959 muncul pemikiran untuk meningkatkan kursus ini menjadi Akademi Perpustakaan. Setelah didiskusikan akhirnya kursus ini menjadi Sekolah Perpustakaan sebagai terjemahan Library School di luar negeri yang masa studinya menjadi 3 tahun setelah SLTA. Setelah kursus dan sekolah perpustakaan itu berjalan sekitar 9 tahun, maka timbul pemikiran untuk lebih ditingkatkan lagi, lalu bidang perpustakaan dijadikan salah satu jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya sejak tanggal 7 Oktober 1963 secara administratif Jurusan Ilmu Perpustakaan ini dipindahkan dari FKIP IKIP (saat itu) ke Fakultas Sastra (kini FIB) UI sampai sekarang. Bidang perpustakaan semakin berkembang lalu di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta membuka program studi, jurusan, maupun minat bidang perpustakaan baik jalur profesional maupun jalur akademik. Adapun perguruan tinggi yang menyelenggarakan jalur profesional antara lain:

No	Perguruan Tinggi	Program
1.	Universitas Gadjah Mada	D 3
2.	Universitas Indonesia	D 3
3.	UIN Sunan Kalijaga	D 3
4.	Universitas Diponegoro	D 3
5.	Universitas Negeri Sebelas Maret/UNS	D 3
6.	Institut Pertanian Bogor	D 3
7.	Universitas Airlangga	D 3
8.	Universitas Hasanuddin	D 3
9.	Universitas Bengkulu	D 3
10.	Universitas Lampung	D 3
11.	Universitas YARSI	D 3
12.	Universitas Sumatera Utara	D 3
13.	Universitas Lancang Kuning	D 3
14.	Universitas Sam Ratulangi	D 3
15.	Universitas Terbuka	D 3
16.	IAIN Imam Bonjol	D 3
17.	IAIN Ar Raniry Aceh	D 3
18.	Universitas Muhammadiyah Makasar	D 3

Adapun beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan jurusan, program studi, maupun minat bidang perpustakaan jalur akademik antara lain:

No	PT	Jur./Prodi/minat
1.	Universitas Gadjah Mada	S 2
2.	UIN Sunan Kalijaga	S 1
3.	Universitas Negeri Yogyakarta	S 3
4.	Universitas Indonesia	S 1, S 2
5.	Universitas Padjadjaran	S 1, S 2
6.	Universitas YARSI	S 1
7.	Universitas Diponegoro	S 1
8.	Universitas Wijayakusuma	S 1
9.	UIN Syarif Hidayatullah	S 1
10.	Univ. Pendidikan Indonesia	S1
11.	Universitas Hasanudin	S 1
12.	Universitas Sumatera Utara	S 1
13.	Universitas Islam Nusantara	S 1

Banyaknya lulusan pustakawan perguruan tinggi ternyata belum mampu memengaruhi jumlah pustakawan (PNS) bila dibanding dengan tenaga perpustakaan yang lulusan non perpustakaan. Berdasarkan pendidikan formal perpustakaan dan non perpustakaan per 18 Juli 2008 adalah sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Bidang Perpustakaan	Bidang Non Perpustakaan	Jumlah
1.	SLTA	-	849	849
2.	D1	-	15	15
3.	D2	369	22	391
4.	D3	274	38	312
5.	SM	6	133	139
6.	S1	435	671	1106
7.	S2	103	57	160
Jumlah		1187	1785	2.972

Sumber: Kartini, 2008: 4

Melalui pengembangan pendidikan kepustakawanan tersebut dan berbagai pelatihan, diharapkan mampu menciptakan pustakawan yang profesional, mandiri, kreatif, berwawasan ke depan, percaya diri, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepustakawanan perlu memperhatikan pilar-pilar pendidikan yakni belajar mengetahui/*learning to know*, belajar melakukan/*learning to do*, belajar hidup dalam kebersamaan/*learning to live together*, dan belajar menjadi diri sendiri/*learning to be*.

Berangkat dari pemikiran ini perlu peninjauan ulang akan kurikulum pendidikan kepustakawanan. Di era yang kompetitif ini perlu penekanan pada penguasaan teknologi informasi, profesionalisme, kewirausahaan, manajemen,

pengembangan diri, dan manajemen ilmu pengetahuan.

Kinerja pustakawan pada umumnya kurang profesional dan masih berorientasi pada rutinitas dan birokrasi. Meskipun secara formal kita telah memiliki 1106 pustakawan lulusan S1 dan 160 orang lulusan S 2 baik pustakawan maupun non pustakawan ternyata belum mampu mengembangkan prosedur, teori, dan pemikiran kepustakawanan yang signifikan.

Faktor-Faktor Kebangkitan

Dalam pengembangan kepustakawanan terdapat peluang dan kondisi pendukung antara lain peraturan perundangan, anggaran pendidikan 20 % dari APBN, perkembangan pendidikan kepustakawanan, upaya sosialisasi kepustakawanan, peran organisasi profesi, dan era keterbukaan.

1. Perangkat Peraturan/Perundangan, dan Kebijakan

Dalam usaha pengembangan kepustakawanan sebenarnya tersedia seperangkat peraturan perundangan sebagai unsur pendukung. Peraturan dan perundangan yang terkait dengan kepustakawanan dalam arti luas telah memberikan peluang pengembangan bidang tersebut. Beberapa peraturan dan perundnagan itu antara lain:

a. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional

Kedudukan Perpustakaan Nasional merupakan kedudukan yang strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang maju dapat dilihat dari peradaban, budaya, kemajuan berpikir, dan perilaku bangsa itu sendiri. Kemudian tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat ditengarai dari kondisi perpustakaan sebagai lembaga penyimpan hasil budaya dan peradaban dari waktu ke waktu.

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

Kedudukan dan fungsi Perpustakaan Nasional sebagai lembaga non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden merupakan suatu keuntungan. Dengan kedudukan ini Perpustakaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan perpustakaan dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan pelayanan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan.

Dengan tugas pokok tersebut Perpustakaan Nasional memiliki wewenang dan tanggung jawab besar terhadap pengembangan semua jenis perpustakaan dan tenaga perpustakaan sebagai

penggerak sumber daya perpustakaan yang lain. Dengan adanya perpustakaan yang representatif diharapkan mampu memberikan fasilitas akses informasi bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab kemajuan suatu bangsa antara lain dapat diukur dari kualitas dan kuantitas karya tulis, karya cetak, dan karya rekam sebagai media penyimpan hasil pemikiran, peradaban, dan budaya suatu bangsa.

Di sinilah letak peran Perpustakaan Nasional RI yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1989 sebagai aset nasional yang menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, meningkatkan ketrampilan untuk mencapai kehidupan yang berkualitas rohaniah dan jasmaniah.

Keberadaan Perpustakaan Nasional sebagai pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibu kota negara itu merupakan posisi strategis dalam kebangkitan dunia kepustakawanan. Sebab dengan kedudukan itu Perpustakaan Nasional memiliki tugas-tugas:

- a). Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
- b). Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan

- c).Membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
- d).Mengembangkan standar nasional perpustakaan

Dengan demikian, Perpustakaan Nasional memiliki tanggung jawab untuk:

- a).mengembangkan koleksi nasional;
- b).melestarikan hasil budaya bangsa;
- c).memasyarakatkan perpustakaan;
- d).mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri (UU No.43 Tahun 2007)

Apabila diperhatikan *point-point* tugas Perpustakaan Nasional tersebut memang cukup berat dalam pengembangan sistem perpustakaan dan kepastakawanan secara nasional terutama dalam rangka pembangunan nasional.

Dalam pembangunan bangsa tidak lepas dari pengembangan ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi. Di sinilah peran Perpustakaan Nasional dan perpustakaan lain dalam pengelolaan sumber ilmu, informasi, dan teknologi. Sebab kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pengembangan intelektual dan artistik bangsa itu sendiri.

- b.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak & Karya Rekam

Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya antara lain diperlukan adanya usaha

pelestarian dan pemanfaatan hasil karya intelektual maupun karya artistik anak bangsa. Kekayaan itu merupakan manifestasi dan ekspresi cipta, rasa, dan karya manusia Indonesia. Khazanah keilmuan ini merupakan faktor penting dalam menunjang pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan penyebaran informasi.

Sehubungan dengan tujuan itulah, maka disusun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Penyusunan ini dalam rangka usaha menghimpun, melestarikan, dan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam secara nasional. Karya cetak dan karya rekam tersebut pada hakekatnya berisi pemikiran, informasi, ilmu pengetahuan, ajaran, nilai, dan hasil penelitian yang perlu diwariskan, disebarluaskan, dan dikembangkan lebih jauh. Hal ini untuk menjaga agar dalam perkembangan suatu bangsa tidak tercabut akar-akar budaya. Disinilah perlunya pelestarian oleh lembaga negara sebagai kekayaan intelektual bangsa.

Undang-undang tersebut merupakan upaya agar karya rekam, karya tulis, dan karya cetak itu terkumpul menjadi koleksi nasional. Yakni semua karya tulis, karya cetak, dan karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam

maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Koleksi nasional ini akan terwujud apabila semua penerbit, perusahaan rekaman, dan perorangan berkesadaran untuk menyerahkan produk mereka ke Perpustakaan Nasional maupun Badan Perpustakaan setempat. Disamping itu apabila masyarakat terinspirasi oleh undang-undang ini, maka mereka akan menyerahkan karya intelektual dan artistik ke perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, atau perpustakaan umum di mana mereka menjadi anggota potensial. Sebab keberadaan perpustakaan di suatu lembaga dan masyarakat sebenarnya merupakan lembaga deposit bagi masyarakat yang bersangkutan.

Sesuai perubahan politik yang mengarah pada desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah, maka Pemerintah Provinsi DIY mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan ini dimungkinkan dilaksanakan oleh provinsi lain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa setiap Penerbit dan Pengusaha Rekaman wajib menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekam kepada Badan Perpustakaan (Pasal 3). Kewajiban ini merupakan upaya pendokumentasian karya intelektual dan karya artistik masyarakat setempat, pelestarian, dan pengembangannya. Sebab karya-karya tersebut merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa. Hasil karya manusia ini sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya dan terutama pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, informasi, dan pelestarian kekayaan budaya bangsa.

c. SK MENPAN No. 132 Tahun 2002

Jabatan pustakawan diakui secara resmi sebagai jabatan fungsional pertama kali dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan. Setelah peraturan tersebut berjalan selama sepuluh tahun, maka dilakukan revisi dan terbitlah Surat Keputusan MENPAN Nomor 33 Tahun 1998. Mengingat perkembangan fungsional begitu cepat, lalu Pemerintah menata jabatan-jabatan fungsional yang mulai tumbuh di negara kita. Lalu untuk pengembangan

jabatan fungsional diterbitkan Surat Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya

Untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Keputusan MENPAN tersebut diperlukan petunjuk teknis yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pustakawan tim penilai, dan pejabat terkait. Maka Perpustakaan Nasional RI sebagai lembaga pembina perpustakaan dan pustakawan seluruh Indonesia menerbitkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Dengan petunjuk teknis ini diharapkan mampu menyamakan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait sehingga pelaksanaan pengembangannya dapat optimal.

Petunjuk teknis tersebut ternyata masih menimbulkan berbagai persepsi dan mengalami berbagai kendala dalam penerapannya. Dengan berbagai pertimbangan dan realita di lapangan, maka Perpustakaan Nasional RI menerbitkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008.

Dalam Petunjuk Teknis yang terakhir ini diberikan penjelasan, contoh-contoh kasus, dan lampiran-lampiran yang memudahkan pema-

haman. Dengan demikian perbedaan penafsiran antara pihak-pihak terkait dapat diperkecil.

Apabila pustakawan mampu memahami peraturan dan perundangan tersebut secara cerdas, maka mereka akan mampu mencapai karir puncak. Namun disayangkan sebagian besar pustakawan kita kurang bisa menangkap peluang tersebut dan selalu saja berharap kenaikan tunjangan fungsional tanpa menghasilkan produk intelektual sebagai ciri khas seorang profesional.

Seharusnya mereka mampu melahirkan gagasan, ide, dan pemikiran dalam pengembangan ilmu perpustakaan, perpustakaan, dan profesi pustakawan. Peluang itu tidak mungkin diperoleh oleh para pegawai administrasi pada umumnya. Seorang pustakawan berkesempatan luas untuk mengembangkan diri melalui kegiatan mengajar di SLTA, memberi kuliah di perguruan tinggi, memberikan bimbingan, melakukan penelitian, menjadi nara sumber pertemuan ilmiah, menjadi konsultan, maupun menjadi penulis. Kegiatan-kegiatan ini sebenarnya merupakan kegiatan kemandirian yang merupakan ciri profesional. Karena rendahnya pemahaman tentang hakekat profesi, maka kinerja dan pola pikir para pustakawan belum menampakkan kemandirian.

Di satu sisi, pustakawan sebagai sumber daya yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan dan informasi seharusnya mampu menggerakkan

sumberdaya manusia dan fungsional lain. Sebab dalam pengembangan semua bidang diperlukan ilmu pengetahuan dan informasi.

d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Rancangan undang-undang perpustakaan telah lama disiapkan dan baru tahun 2007 berhasil disetujui Dewan Perwakilan RI sebagai undang-undang meskipun harus melewati berbagai proses. Undang-Undang yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 129 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774 tanggal 1 Nopember 2007 itu merupakan landasan yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, ilmu perpustakaan, dan profesi pustakawan. Hal ini merupakan secercah harapan adanya kebangkitan kepustakawanan di Indonesia.

Perkembangan kepustakawanan tidak lepas dari perkembangan ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan merupakan kajian dan pendekatan proses pengumpulan, pengelolaan, pelestarian, dan pemberdayaan sumber-sumber informasi. Sebagai suatu ilmu, dalam kajian-kajian ini ilmu perpustakaan mengadopsi teori-teori maupun konsep dari bidang lain seperti statistik, psikologi, manajemen, komputer, matematika, bisnis, dan lainnya. Dari interaksi ini lahirlah ilmu baru seperti statistik perpustakaan, teknologi infor-

masi perpustakaan, psikologi perpustakaan, dan lainnya. Dengan adanya interaksi yang semakin intensif, maka akan semakin banyak dilahirkan konsep dan teori baru.

Undang-undang yang menelan biaya milyaran rupiah itu juga akan mengangkat eksistensi perpustakaan pada umumnya. Kalau dulu perpustakaan dimaknai sebagai gedung/ruang untuk tempat penyimpanan koleksi, maka kini pengertian perpustakaan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kini perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka (Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 Bab I Pasal 1 ayat 1).

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa perpustakaan sebagai lembaga ilmu pengetahuan harus dikelola oleh tenaga profesional dengan standar tertentu, mengelola sumber ilmu pengetahuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi masyarakat. Melalui sumber informasi, fasilitas, dan sarana prasarana yang dikelola perpustakaan, masyarakat dapat meningkatkan kualitas diri. Dalam hal ini masyarakat dapat melakukan proses belajar sepanjang hayat/*long life learning* dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa:

Penyelenggaraan perpustakaan ke depan tidak asal ada. Penyelenggaraan perpustakaan harus dikelola secara profesional dan dalam penyelenggaraannya harus berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pustakawan sebagai sumber daya yang menggerakkan perpustakaan itu bukan sembarang orang yang bekerja di perpustakaan tanpa memiliki ilmu pengetahuan dan kompetensi yang memadai. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki pendidikan dan kompetensi dalam bidangnya yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dengan pernyataan yang tegas ini dapat dipahami bahwa pustakawan adalah seorang ilmuwan karena memiliki ilmu pengetahuan tentang kepustakawanan dan berkewajiban untuk menyumbangkannya melalui media cetak, tatap muka (mengajar, menyuluh, menyampaikan makalah dalam temu ilmiah), atau media cetak (buku, surat kabar, majalah, jurnal dll) maupun melakukan penelitian (SK MENPAN No. 132/2007).

Dari kesempatan ini seorang pustakawan memiliki peluang besar untuk berprestasi di bidang kepustakawanan sehingga dapat mencapai

karir puncak yakni Pustakawan Utama. Hal ini merupakan bentuk penghargaan formal terhadap pustakawan sebagai tenaga profesional dan ilmuwan sama dengan guru, dosen, dokter, peneliti, hakim, dan lainnya.

Lahirnya undang-undang tersebut merupakan titik awal/*starting point* kebangkitan (angin segar) dan merupakan landasan hukum yang kokoh sebagai keberadaan, pelaksanaan, dan pengembangan perpustakaan pada umumnya. Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi memiliki akses strategis dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan pembelajaran masyarakat secara formal, informal, maupun nonformal. Dalam hal ini perpustakaan memiliki peran dan fungsi untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Anggaran Pendidikan 20 % APBN

Sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi, akhirnya Pemerintah memenuhi anggaran pendidikan tahun 2009 menjadi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN. Terlepas dari kepentingan politik, langkah ini merupakan iktikad baik dan tanggung jawab Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan. Pendidikan merupakan kunci kemajuan dan kecerdasan

bangsa yang harus dipikirkan bersama. Kemajuan bangsa memang terletak pada kualitas pendidikannya. Dari sinilah, maka disusun berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Maka ditetapkan visi pendidikan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani dan masyarakat Indonesia baru. Masyarakat Indonesia baru tersebut adalah masyarakat yang memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung hak azasi manusia, saling pengertian, dan berwawasan global (Mulyasa, 2003: 19)

Pemenuhan anggaran 20 % dari APBN itu tentunya untuk meningkatkan sarana fisik dan non fisik penunjang kegiatan belajar mengajar antara lain berupa perpustakaan sekolah. Sesuai Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa setiap sekolah/madrasah harus memiliki perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan tetap harus memperhatikan standar nasional pendidikan.

Kemudian untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka perpustakaan sekolah wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik. Dengan penyediaan koleksi yang memadai

ini, diharapkan mampu menambah wawasan siswa dan guru sebagai pendidik. Guru yang kurang wawasannya berakibat tidak mampu berpikir ilmiah apalagi dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah.

Sungguh mengenaskan dunia pendidikan kita apabila para guru tidak mampu menulis karya ilmiah. Kalau demikian bagaimana akan diperoleh lulusan yang berkualitas karena pendidikanpun tidak memiliki wawasan yang luas.

Guru diangkat sebagai tenaga fungsional berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 084/1993. Fungsionalisasi guru ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan sekaligus kesejahteraan guru. Dalam hal ini guru diberi kesempatan untuk berprestasi antara lain dengan indikator angka kredit. Dengan angka kredit yang dapat dicapai, maka setiap guru berpeluang untuk mencapai puncak karir yakni guru utama yang sejajar dengan fungsional lain yakni guru besar, pustakawan utama, dokter utama, peneliti utama, dan lainnya.

Namun demikian, kesempatan itu ternyata kurang dimanfaatkan. Sebab dengan pandainya mengemukakan berbagai alasan, sebagian besar guru tidak mampu memenuhi angka kredit dari unsur pengembangan profesi. Tanpa adanya unsur nilai pengembangan profesi ini, maka

seorang guru cukup *pasrah bongkokan* pada golongan IV/a. Sebab untuk naik jabatan/pangkat/golongan IV/b harus membuat karya tulis ilmiah.

Booming guru pada golongan IV/a terjadi di berbagai daerah, dan salah satu contoh terjadi di Kabupaten Kulonprogo. Data stagnasi atau kemandegan kenaikan pangkat guru yang menduduki golongan IV/a di Kabupaten Kulonprogo saat ini mencapai 2.837 dari sekitar 7.000 guru yang tersebar di semua jenjang sekolah atau hampir mendekati separuh jumlah guru (Kedaulatan Rakyat, 11 Juli 2008)

3. Perkembangan Pendidikan Kepustakawanan

Kepustakawanan sebagai ilmu dan profesi di bidang pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Dengan demikian mereka yang bergerak dalam profesi kepustakawanan ini harus memiliki ilmu pengetahuan dan kompetensi. Kompeten dalam hal ini berarti bahwa seorang pustakawan harus memiliki dan menerapkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap untuk bekerja sesuai standar yang diharapkan di tempat kerja. Dengan demikian, seorang pustakawan dituntut untuk menguasai dan mampu menerapkan ketrampilan tugas, mengelola tugas, manajemen ilmu pengetahuan/*knowledge management*, dan mampu berperan dalam lingkungan pekerjaan.

Seorang profesional akan mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi apabila memiliki ilmu, pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

Pendidikan kepustakawanan yang dulu berupa kursus ahli perpustakaan selama satu tahun, kini telah dibuka minat bidang/program studi/jurusan ilmu perpustakaan sejak diploma sampai doktor di 24 perguruan tinggi negeri/swasta. Sebab kini seorang diakui sebagai pustakawan bukan karena telah lama bekerja di perpustakaan. Kini, seorang boleh mengaku dirinya sebagai pustakawan apabila memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (Undang-Undang No. 43 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 8). Dengan demikian, pustakawan harus memenuhi kualifikasi standar nasional perpustakaan yang dalam hal ini yang dimaksud adalah standar tenaga perpustakaan.

Penguasaan ilmu, pengetahuan dan pemilikan kompetensi ini menjadi keharusan mengingat pustakawan itu sebagai pengelola perpustakaan yang berfungsi sebagai sumber informasi. Sumber informasi yang dikelolanya diharapkan mampu menjadi sebagai bagian dari masyarakat dunia

dan ikut serta membangun masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society - WSIS, 12 Desember 2003.

4. Upaya Sosialisasi Kepustakawanan

Pengembangan profesi kepustakawanan dan perpustakaan dipengaruhi oleh usaha para profesional terkait, lembaga pendidikan profesi, organisasi profesi, pemerintah, maupun lembaga tempat bekerja para pustakawan. Usaha-usaha sosialisasi dan promosi yang selama ini telah dilakukan antara lain melalui seminar, workshop, bedah buku, pelatihan, penerbitan, penyuluhan, dan berbagai lomba bidang kepustakawanan melalui media cetak maupun elektronik.

Sosialisasi ini perlu dilakukan terus menerus dan perlu peningkatan kualitas maupun kuantitasnya. Sebab perkembangan suatu bidang dipengaruhi sejauh mana usaha para profesional yang terkait.

5. Peran Organisasi Kepustakawanan

Suatu profesi memerlukan organisasi untuk menampung aspirasi, mengembangkan profesi, menyejahterakan anggota, dan mengawasi kualitas profesionalisme. Melalui organisasi ini, para profesional secara mandiri dapat mengatur pengembangan diri dan profesi mereka. Mereka dapat

menentukan arah kebijakan dalam pencapaian prestasi dan karir secara terbuka, bertanggung jawab, dan mengedepankan profesionalisme. Oleh karena itu pustakawan harus mampu berperilaku yang menunjukkan keprofesionalannya yang diterima oleh organisasi profesi dan masyarakat sebagai kliennya.

Seperti halnya organisasi lain, organisasi ke-pustakawanan tumbuh dari berbagai organisasi lalu menjilma menjadi Ikatan Pustakawan Indonesia/IPI. Kemudian dalam perkembangannya muncul lagi berbagai organisasi ke-pustakawanan yang bersifat sektarian, jenis, bahkan tingkat intelektual. Hal ini sangat mungkin terjadi karena ketidakmampuan IPI dalam mengadopsi berbagai aspirasi dari mereka yang bekerja di berbagai perpustakaan. Mungkin saja munculnya berbagai organisasi ke-pustakawanan itu seperti Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia/FPPTI, Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi/FKP2T, Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia, Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan Indonesia/ISIPI, Himpunan Pengelola Perpustakaan Sekolah Muhammadiyah/HIMPUSMA memang merupakan kebutuhan untuk eksis dan pengembangan profesi. Hal ini juga terjadi pada organisasi profesi lain di bidang kesehatan. Ikatan Dokter Indonesia/IDI yang dulu dianggap sebagai satu-satunya organisasi dokter, ternyata kini juga lahir organisasi

untuk dokter-dokter anak, gigi, ahli jantung, penyakit kulit, dan lainnya. Perkembangan ini semata-mata untuk mengembangkan spesialis mereka.

Perkembangan organisasi kepastakawanan memang belum seperti perkembangan organisasi profesi lain seperti IDI, IKAHI, PGRI, IKADIN, dan lainnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor:

1. Sistem keanggotaan tidak ada seleksi

Keanggotaan organisasi kepastakawanan (IPI, FPSI, dll) tidak mensyaratkan pendidikan profesi. Hal ini berbeda dengan profesi seperti IDI, PGRI, IKADIN yang mensyaratkan keanggotaan dengan pendidikan profesional seorang dokter, guru, hakim misalnya.

Tidak adanya persyaratan pendidikan profesi ini justru menyulitkan pembinaan dan pengembangan profesi. Sebab dengan adanya heterogenitas pendidikan itu akan terjadi kesenjangan wawasan, cara berpikir, dan komunikasi para anggota

2. Masih tergantung pada birokrasi

Model kepengurusan kepastakawanan selama bertahun-tahun sangat tergantung pada birokrasi. Hal ini menunjukkan kekurangdewasaan dalam berorganisasi. Dengan ketergantungan ini menunjukkan kurang adanya rasa percaya diri dan kurang mandiri

3. Belum menjadi kebanggaan

Para pengelola perpustakaan belum merasa bangga dan belum menjadi kebutuhan untuk

menjadi anggota organisasi profesi. Keterlibatan mereka dalam organisasi profesi seolah-olah karena adanya keterikatan dinas dan kepentingan sesaat (angka kredit, pergaulan, dll.). Kondisi ini mungkin disebabkan bahwa organisasi profesi itu belum/tidak menyentuh langsung kebutuhan para pengelola perpustakaan. Mereka cenderung pasif bahkan apatis terhadap keberadaan organisasi profesi.

Penutup

Kepustakawanan merupakan ilmu dan/atau profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang keberadaannya memengaruhi bidang lain. Sebab dalam pengembangan bidang dan profesi diperlukan sumber ilmu pengetahuan, dokumentasi, dan informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, maupun karya rekam. Peran ini perlu ditingkatkan terus menerus sebagai pendorong tercapainya masyarakat yang cerdas secara intelektual, sosial, religis, politik, dan ekonomi.

Pengembangan kepustakawanan memiliki banyak peluang antara lain adanya kebijakan pemerintah, berkembangnya lembaga pendidikan kepustakawanan, organisasi profesi, era keterbukaan, dan adanya usaha sosialisasi. Cepat tidaknya pengembangan ini tergantung usaha pustakawan, tim penilai, lembaga pengguna pustakawan,

organisasi profesi, lembaga tempat bekerja pustakawan, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Daftar Pustaka

- Guru dan Karya Tulis Ilmiah*. Kedaulatan Rakyat, 11 Juli 2008
- Kartini. *Kebijakan Pengembangan Pustakawan*. Makalah Rapat Koordinasi Pengembangan Pustakawan dan Tim Penilai di Jakarta tanggal 23 - 24 Juli 2008.
- Lasa Hs., 2006. *Profesi Pustakawan: Harapan dan Tantangan*. Pidato Pengukuhan Sebagai Pustakawan Utama UGM tanggal 6 September 2006
- Nurhadi, Muljani A. 1983. *Sejarah Perpustakaan dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pendit, Putu Laxman.
Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sulistya-Basuki. 1994. *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pustakawan dan Angka Kredinya*
- Surat Keputusan Menpan No. 132 Tahun 2002 Tentang Pustakawan dan Angka Kreditnya*

*Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 11 Tahun
Tentang Perpustakaan Nasional RI*

*Surat Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2007
tanggal 28 Juni 2008 tentang Tunjangan
Fungsional*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta. Jakarta: Cemerlang*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2007 tentang Perpustakaan.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1990 Tentang Serah Sipan Karya Cetak
dan Karya Rekam*

Para Penulis

Ida Fajar Priyanto

Lulusan Loughborg University ini lahir di Kotagede Yogyakarta. Ia kini sebagai Kepala Perpustakaan UGM dan telah menjelajah seantero dunia untuk menyampaikan makalah, studi banding, maupun kunjungan. Pengelola D 3 Manajemen Informasi & Perpustakaan FISIPOL UGM ini juga mengajar di Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga dan S2 Perpustakaan UGM.

Purwono

Lahir tanggal 14 April 1947 di Klaten, kini bertugas sebagai Penanggungjawab Perpustakaan Fakultas Teknik UGM. Beliau juga aktif sebagai dosen di D3 Manajemen Informasi & Perpustakaan FISIPOL UGM, S2 Perpustakaan UGM, Jurusan Ilmu Perpustakaan & Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pustakawan Utama UGM ini pernah menjadi Ketua IPI DIY.

Kini masih dipercaya sebagai Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan UGM, UPN, UII, dan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Disamping itu juga aktif menulis di berbagai media cetak.

Purwani Istiana

Penanggungjawab Perpustakaan Fakultas Geografi UGM ini lahir di Yogyakarta tanggal 23 Juni 1973. Ia pernah terpilih sebagai Pustakawan Teladan II DIY tahun 2007. Kini beliau juga aktif menulis artikel bidang perpustakaan yang dimuat oleh Gagasan, Media Informasi, Berkala Ilmu Perpustakaan & Informasi, Papyrus, Buletin UII, Sangkakala, dan Buletin IPI.. Lulusan S 1 IPI Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga ini juga aktif dalam seminar/workshop bidang perpustakaan dan sebagai Pengurus Forum Pustakawan UGM dan Pengruus IPI DIY.

Nurhayati

Lahir di Blitar 1 Februari 1960. Kini bertugas sebagai Penanggungjawab Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Sejak 1 Mei 1990 sampai tahun 1997 pernah ditugaskan di Perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM. Lulusan S2 Perpustakaan UGM ini juga mengjar di D 3 Manajalen Informasi & Perpustakaan Fisipol UGM.

Sri Rumani

Pustakawan Madya UGM kelahiran Sleman ini sekarang ditugasi sebagai Penanggungjawab Perpustakaan FISIPOL UGM. Ia pernah terpilih sebagai Pustakawan Teladan III Tingkat Nasional. Di samping itu ia dipercaya sebagai Ketua Redaksi Berkala Informasi & Perpustakaan dan Media Informasi. Penulis produktif ini juga mengajar di Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Heri Abi Burrachman Hakim

Putra asli Yogya ini lahir 26 September 1982. Kini ia bekerja di Perpustakaan FISIPOL UGM dan aktif menulis. Artikel-artikelnya dimuat oleh Kompas, Media Informasi, Kedaulatan Rakyat, Bernas Yogya, Fihris, dan Buletin UII. Lulusan S1 Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga ini juga aktif dalam seminar/*workshop* bidang perpustakaan.

Pergola Irianti

Penanggungjawab Perpustakaan Fakultas Psikologi UGM ini lahir di Yogyakarta 14 Nopember 1958. Ia juga rajin menulis di beberapa publikasi perpustakaan antara lain Media Informasi, Berkala Ilmu Perpustakaan & Informasi, dan Buletin Perpustakaan UII. Profesi pustakawan yang ditekuninya telah mendorongnya untuk maju melalui pendidikan, penulisan, diskusi, maupun penelitian.

Lasa Hs.

Pustakawan UGM kelahiran Boyolali ini selama 30 tahun bertugas di Perpustakaan Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan sejak Nopember 2006 sebagai Kabid Pelayanan Perpustakaan UGM. Di samping sebagai pustakawan, juga sebagai dosen di D3 Manajemen Informasi & Perpustakaan FISIPOL UGM, S 2 Perpustakaan UGM, D 3 Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian UGM, S 1 Institut Pertanian (INTAN) Yogyakarta, dan Jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia juga sebagai redaksi Berkala Ilmu Perpustakaan & Informasi, Media Informasi, dan Mentari. Sebagai penulis, dari tangannya telah ditulis buku & naskah buku sebanyak 39 judul yang diterbitkan oleh 13 penerbit. Artikel-artikelnya telah dimuat beberapa media cetak.